

TESIS

**PENYUSUNAN DATA PRIMER UNTUK MEMBUAT
INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI MENUJU LAYANAN E-
GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN
DIAGRAM RACI**

(Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)



Disusun oleh:

Nama : Turah Suhono
NIM : 19.52.1202
Konsentrasi : Informatics Technopreneurship

**PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2021

TESIS

**PENYUSUNAN DATA PRIMER UNTUK MEMBUAT
INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI MENUJU LAYANAN E-
GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN
DIAGRAM RACI**

(Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)

**PREPARATION OF PRIMARY DATA TO MAKE INTEROPERABILITY
OF INFORMATION SYSTEMS TOWARDS E-GOVERNMENT
SERVICES IN THE REGIONAL GOVERNMENT USING THE RACI
DIAGRAMS**

(Case Study: Purworejo Regency Government)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Magister



Disusun oleh:

Nama : Turah Suhono
NIM : 19.52.1202
Konsentrasi : Informatics Technopreneurship

**PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYUSUNAN DATA PRIMER UNTUK MEMBUAT INTEROPERABILITAS
SISTEM INFORMASI MENUJU LAYANAN E-GOVERNMENT PADA
PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI
(Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)**

**PREPARATION OF PRIMARY DATA TO MAKE INTEROPERABILITY OF
INFORMATION SYSTEMS TOWARDS E-GOVERNMENT SERVICES IN THE
REGIONAL GOVERNMENT USING THE RACI DIAGRAMS
(Case Study: Purworejo Regency Government)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh

Turah Suhono

19.52.1202

Telah Diujikan dan Dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis
Program Studi S2 Teknik Informatika
Program Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta
pada hari Kamis, 04 Februari 2021

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Komputer

Yogyakarta, 04 Februari 2021

Rektor

Prof. Dr. M. Suvanto, M.M.
NIK. 190302001

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYUSUNAN DATA PRIMER UNTUK MEMBUAT INTEROPERABILITAS
SISTEM INFORMASI MENUJU LAYANAN E-GOVERNMENT PADA
PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI
(Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)**

**PREPARATION OF PRIMARY DATA TO MAKE INTEROPERABILITY OF
INFORMATION SYSTEMS TOWARDS E-GOVERNMENT SERVICES IN THE
REGIONAL GOVERNMENT USING THE RACI DIAGRAMS
(Case Study: Purworejo Regency Government)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh

Turah Suhono

19.52.1202

Telah Diujikan dan Dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis
Program Studi S2 Teknik Informatika
Program Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta
pada hari Kamis, 04 Februari 2021

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji

Prof. Ema Utami, S.Si., M.Kom.
NIK. 190302037

Dr. Suwanto Raharjo, S.Si, M.Kom
NIK. 999106

Pembimbing Pendamping

Alva Hendi M., ST., M.Eng, P.hd.
NIK. 190302493

Hanif Al Fatta, M.Kom.
NIK. 190302096

Prof. Ema Utami, S.Si., M.Kom.
NIK. 190302037

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Komputer

Yogyakarta, 04 Februari 2021
Direktur Program Pascasarjana

Dr. Kusriani, M.Kom.
NIK. 190302106

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama mahasiswa : Turah Suhono
NIM : 19.52.1202
Konsentrasi : Informatics Technopreneurship

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul berikut:

Penyusunan Data Primer Untuk Membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Menuju Layanan E-Government Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Ema Utami, S.Si., M.Kom.

Dosen Pembimbing Pendamping : Hanif Al Fatta, M.Kom.

1. Karya tulis ini adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas AMIKOM Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian SAYA sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Dosen Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan disebutkan dalam Daftar Pustaka pada karya tulis ini
4. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA, bukan tanggung jawab Universitas AMIKOM Yogyakarta
5. Pernyataan ini SAYA buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka SAYA bersedia menerima SANKSI AKADEMIK dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Yogyakarta, 04 Februari 2021

Yang Menyatakan,



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan yang utama, saya niatkan untuk beribadah kepada Alloh SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan lancar.

Kedua, kepada keluarga saya, Ibu dan almarhum Bapak saya yang telah membimbing dan mengasuh saya sejak kecil sehingga saat ini, istri dan anak-anak saya yang tercinta, almarhum Bapak dan Ibu mertua saya, adik-adik dan keponakan saya.

Ketiga, jajaran pimpinan dan karyawan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, dimana saya meniti karir, diberi banyak pengalaman, dan telah memberi saya kesempatan menuntut ilmu diharapkan dapat menunjang karir di bidang pengadaan barang jasa dan juga bidang TI.

Keempat, jajaran pimpinan dan karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, dimana saya melakukan penelitian, telah memberi banyak pengetahuan dan dukungan dalam pengumpulan data.

HALAMAN MOTTO

Dengan setiap kerja usaha dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan langkah kita dalam menuntut ilmu kita niatkan untuk beribadah kepada Alloh SWT, Inshaa Alloh akan menjadi amal jariyah kita, sebagai bekal kita besok di kehidupan yang kekal. Dengan selalu menjalankan perintah agama, berbakti pada orang tua, mencintai dan menyayangi keluarga, dan menjalin hubungan baik dengan sesama, semoga kita akan menjalanin kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, aamiin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : Penyusunan Data Primer Untuk Membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Menuju Layanan E-Government Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram RACI dengan lancar. Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan dan doa kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Suyanto, MM., selaku Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta, yang telah banyak membagikan pengalaman kewirausahaan melalui mata kuliah Technopreneurship.
2. Ibu Prof. Dr. Ema Utami, S.Si, M.Kom, selaku pembimbing utama dalam penulisan tesis saya, yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan semangat.
3. Bapak Hanif Al Fatta, M.Kom, selaku pembimbing pedamping dalam penulisan tesis saya, yang telah banyak memberikan arahan.
4. Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan yang membangun dan menguji penelitian tesis saya.
5. Teman-teman di Admisi MTI, yang telah banyak membantu administrasi selama saya menuntutillmu di Universitas Amikom Yogyakarta.
6. Segenap jajaran pimpinan dan karyawan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, yang telah banyak memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis saya.

7. Segenap jajaran pimpinan dan karyawan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo yang telah banyak memberikan dukungan dalam proses pengumpulan data dan validasi penelitian saya.
8. Seluruh keluarga saya, ibu saya (Ibu Sulimah), istri tercinta (Hilmy Farida, SH.), anak-anak tercinta (Zahira Ramdhani Ar-raaida dan Khairunnisa Azizah Al-husna), adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan dan doa.
9. Teman-teman MTI angkatan tahun 2019 yang luar biasa, yang saling memberikan dukungan dan semangat

Purworejo, 04 Februari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
INTISARI.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Pustaka.....	9
2.2. Keaslian Penelitian.....	16
2.3. Landasan Teori.....	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3. Metode Analisis Data.....	31
3.4. Alur Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Obyek Penelitian.....	35
4.2. Pengelompokan Data Primer.....	38
4.3. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	39
4.4. Hasil Analisa Data.....	42
4.5. Pemetaan Kewenangan Data Antar OPD.....	50
4.6. Analisis Interoperabilitas.....	51
4.7. Analisis Perbandingan Data Primer.....	53
4.8. Pengujian Interoperabilitas.....	56
4.9. Kamus Data.....	69
4.10. Analisis Sistem Informasi.....	71
4.11. Rekomendasi Kebijakan yang diharapkan.....	75
4.12. Matriks Rekapitulasi Tahapan Penelitian.....	76
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83

Lampiran A. Form Survei.....	83
Lampiran B. Pemetaan Kewenangan Data Antar OPD Pada Tabel RACI.....	103
Lampiran C. Analisis Interoperabilitas.....	106
Lampiran D. Perbandingan Data Primer.....	112
Lampiran E. Kamus Data.....	117
Lampiran F. Matriks Rekapitulasi Tahapan Penelitian.....	152
Lampiran G. Dokumentasi dan Agenda.....	156



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks literatur review dan posisi penelitian.....	16
Tabel 2. 2 Contoh Tabel Pengolahan Data (RACI <i>Chart</i>).....	24
Tabel 2. 3 Pemetaan Sistem Informasi pada Mc. Farlan Grid.....	25
Tabel 4. 1 Luas Kecamatan.....	35
Tabel 4. 2 Daftar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.....	36
Tabel 4. 3 Kelompok Basis Data.....	38
Tabel 4.4 Daftar Data Primer.....	44
Tabel 4.5 Daftar Data Summary.....	50
Tabel 4.6 Pemetaan Kewenangan Data Antar OPD.....	50
Tabel 4.7 Analisis Vertikal.....	51
Tabel 4.8 Analisis Horizontal.....	52
Tabel 4.9 Analisis Interoperabilitas Data dan Sistem Informasi.....	53
Tabel 4.10 Perbandingan Nama dan Urusan OPD Kabupaten Purworejo dan OPD Kota Magelang.....	54
Tabel 4.11 Perbandingan Data Primer Pada Kabupaten Purworejo dan OPD Kota Magelang.....	55
Tabel 4.12 Spesifikasi Aplikasi Uji Interoperabilitas.....	63
Tabel 4.13 Analisis PEST.....	72
Tabel 4.14 Pemetaan Sistem Informasi pada Mc. Farlan Grid.....	73
Tabel 4.15 Matriks Rekapitulasi Tahapan Penelitian.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	32
Gambar 4. 1 Rekap Data Primer per Kelompok	43
Gambar 4.2 Aplikasi dan Data yang dibutuhkan semua OPD	52
Gambar 4.3 Setting konfigurasi pada Aplikasi Apache Jmeter	58
Gambar 4.4 Setting beban uji.....	59
Gambar 4.5 Hasil tampilan <i>view in table</i>	59
Gambar 4.6 Tampilan <i>response time graph</i>	60
Gambar 4.7 Tampilan <i>Transactions per Seconds</i>	60
Gambar 4.8 Tampilan <i>Transaction Troughput vs Threads</i>	61
Gambar 4.9 Tampilan <i>Summary Report</i>	61
Gambar 4.10 Skema Uji Interoperabilitas.....	62
Gambar 4.11 Setting <i>Client Web Service</i>	64
Gambar 4.12 Sampel Kartu Tanda Penduduk yang Berbasis e-KTP.....	64
Gambar 4.13 Pengecekan Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK	65
Gambar 4.14 Seting Konfigurasi Koneksi pada aplikasi SIMPUS.....	66
Gambar 4.15 Pengecekan Data Kependudukan dari Aplikasi SIMPUS.....	67
Gambar 4.16 Mencari Data Kependudukan dari Aplikasi AKI	68
Gambar 4.17 Uji Data Kependudukan Tidak Ditemukan.....	69

DAFTAR ISTILAH

OPD : Organisasi Perangkat Daerah, sebuah lembaga pada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

RACI : *Responsible Accounted Consulted Informed*, sebuah matriks partisipasi dari berbagai peran dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.

PEST : *Politic Economy Social Technology*, sebuah analisis dari *framework* Ward and Prepard untuk analisis dengan mengacu faktor dari luar organisasi yang berkaitan dengan politik ekonomi sosial dan teknologi.



INTISARI

Sistem informasi merupakan faktor utama dalam pelaksanaan e-government oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem informasi yang dikembangkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih bersifat parsial, belum ada rancangan strategis pengembangan sistem informasi yang dijadikan acuan dalam pengembangan sistem informasi. Data merupakan unsur utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem informasi. Penyusunan data primer diperlukan untuk inventaris data yang ada di OPD dengan mengacu pada sistem informasi yang berjalan dan kebutuhan data pada OPD. Berdasarkan data primer dilakukan penyusunan kamus data, pada tahap perancangan sistem kamus data diperlukan untuk perancangan input, laporan dan data base. Perancangan strategis sistem informasi diperlukan untuk memetakan sistem informasi berdasarkan kontribusinya pada OPD dan kebutuhan data primer untuk sistem informasi.

Penelitian ini diawali dengan inventaris sistem informasi dan data primer di tiap OPD. Pengumpulan data dengan pengisian form survei oleh penanggungjawab sistem OPD. Sistem informasi dan data primer hasil survei dipetakan dengan diagram RACI (Responsible Accounted Consulted Informed). Kemudian dilakukan perancangan strategis sistem informasi menggunakan analisis PEST (Politik Economy Social Technology). Tahap akhir dilakukan pemetaan sistem informasi dalam bentuk portofolio Mc. Farlan. Penelitian ini menghasilkan kamus data dan rancangan strategis sistem informasi untuk rekomendasi pengambil kebijakan dalam pengembangan sistem informasi.

Kata kunci: sistem informasi, data primer, OPD, diagram RACI

ABSTRACT

Information system is a main factor on e-government implementation by Local Government to realizing good governance. Information system developed by OPD (Organisasi Perangkat Daerah) is still partial, there is no strategic plan for information system development that is used as a reference in information system development. Preparation of primary data is required for inventory of data contained in OPD with reference to running information system and data needs of OPD. Based on primary data, data dictionary compilation is done to design inputs, reports and databases at the system design stage. Strategic design of information systems is required to map information system and primary data needs for information systems.

This research phase begins with inventory of information system and primary data in each OPD. Data collection by filling out a survey form by system administrator of each OPD. Information system and primary data of the survey results are mapped with RACI (Responsible Accounted Consulted Informed) diagrams. Then the strategic design of information system is done using PEST (Politic Economy Social Technology) analysis. The final stage is mapping information system in Mc.Farlan portofolio form. This research produces data dictionaries and information system strategic design for policy makers recommendations in information system development.

Keyword: information system, primary data, OPD, RACI Chart

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Data primer merupakan persyaratan utama dalam integrasi sistem informasi pemerintah daerah untuk merealisasikan *e-government* di sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan kota pintar (*Smart City*). Purworejo *Smart City* sudah mulai diupayakan pencapaiannya sejak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) No.12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 dan ditindaklanjuti dengan disusunnya Roadmap *Smart City* Kabupaten Purworejo. Dengan pendekatan *Smart City* diharapkan pengelolaan Kabupaten Purworejo dapat semakin efisien, efektif, akuntabel, transparan, minim konflik antar pelaku pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih cepat. Pengambilan kebijakan dalam konteks pendekatan *Smart City* membutuhkan kecepatan ketersediaan *supply data*. Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber baik dari basis data lingkungan pemerintah sendiri maupun dari pihak di luar pemerintah. Salah satu tantangan dalam pengembangan *Smart City* adalah terkait *supply data* dan informasi yang cepat dan akurat (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, 2019). Belum adanya data primer yang merupakan rujukan bagi pengembangan sistem informasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam rangka implementasi *e-Government* menuju Kabupaten Purworejo *Smart City*. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini

tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Sarwono, 2006). Perlu dilakukan inventaris data apa saja yang ada di tiap OPD dengan mengacu pada sistem informasi atau aplikasi yang berjalan selama ini dan juga kebutuhan data yang belum ada di OPD saat ini. Setelah data terkumpul kemudian dipetakan kebutuhan data lintas OPD yang kemudian akan dijadikan data primer. Dengan adanya penyusunan data primer ini maka diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem yang terintegrasi.

Selain data primer diperlukan juga penyusunan kamus data yang digunakan untuk merancang input, laporan dan database pada tahap perancangan sistem. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur Pusat Data dan pusat pemulihan data dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini sedang mengembangkan pelaksanaan *e-Government* dalam mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai *Smart City*. Dinas Komunikasi dan Informatika sejak berdirinya

pada Tahun 2017 telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Infrastruktur jaringan sudah dibangun di seluruh OPD.

Beberapa aplikasi telah dipergunakan oleh beberapa OPD baik yang bersifat layanan kepada masyarakat maupun untuk layanan pada internal OPD sendiri, seperti aplikasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) untuk perencanaan dan keuangan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk layanan kependudukan, aplikasi intranet untuk surat-menyerurat antar OPD. Saat ini, semakin banyak aplikasi khusus yang dikembangkan untuk mendukung proses bisnis pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah. Diantaranya, dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo meluncurkan inovasi layanan *Call Center* Sistem Pelayanan Gawat Darurat (SPGDT 119). Namun aplikasi-aplikasi tersebut belum terintegrasi atau masih bersifat parsial. Data-data masih berada pada masing-masing OPD, belum ada kumpulan dari data primer dari tiap OPD, yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah di seluruh OPD.

Interoperabilitas didefinisikan sebagai kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi (Perpres Nomor 39, 2019). Pengembangan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo selama ini belum dikoordinasikan secara terpusat, masih dikembangkan oleh masing-masing OPD, belum ada rekomendasi terhadap OPD, tentang bagaimana kontribusi dan urgensi sistem informasi terhadap OPD dan

pemerintah kabupaten. Belum adanya pemetaan sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap OPD, apakah sistem informasi termasuk strategis, pendukung, potensi tinggi ataukah termasuk kunci operasional. Sehingga diperlukan adanya perencanaan strategis sistem informasi yang digunakan untuk pemetaan sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap OPD dan berdasarkan data primer yang dibutuhkan untuk sistem informasi tersebut. Sehingga diharapkan dapat diketahui data apa saja yang dimungkinkan dipakai bersama oleh beberapa OPD dan sistem informasi apa saja yang dimungkinkan menggunakan data tersebut. Sehingga pada tahap pengembangan sistem informasi dilakukan dengan skala prioritas berdasarkan kontribusinya terhadap OPD itu sendiri dan OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dengan adanya pemetaan akan dapat dibuat perancangan interoperabilitas sistem informasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pemetaan sistem informasi atau aplikasi akan digunakan sebagai bahan penyusunan *roadmap* pengembangan sistem informasi dalam rangka transformasi digital pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain survei yang memanfaatkan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai proses validasi data primer dan kamus data yang dihasilkan. Kegiatan penelitian, dilakukan mulai dari studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, konfirmasi, analisa keterpaduan dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi. Penelitian ini menghasilkan data primer dari 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi yang akan diimplementasikan sebagai standar integrasi data. Penelitian juga diharapkan dapat

menghasilkan rekomendasi untuk mengimplementasikan integrasi sistem informasi.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dilakukan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer apa saja yang diambil dari OPD yang akan menjadi dasar interoperabilitas sistem informasi menuju layanan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Bagaimana pemetaan data primer berdasarkan wewenang dan tanggung jawab dan kebutuhan data antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bagaimana skema interoperabilitas data dan sistem informasi berdasarkan hasil pemetaan data primer.
4. Bagaimana pengujian interoperabilitas data dan sistem informasi untuk menguji antar sistem informasi yang berbeda *platform* terkait uji beban (*load testing*) dan uji fungsi.
5. Bagaimana perancangan kamus data yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan sistem informasi yang akan datang.
6. Rekomendasi apa saja yang diberikan untuk menjaga keberlangsungan data dan interoperabilitas yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini memberikan batasan masalah pada :

1. Penelitian dengan melibatkan 35 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terdiri semua dinas, badan, instansi non dinas dan badan (25 OPD), semua bagian di Sekretariat Daerah (ada 9 bagian) dan kecamatan (diwakili 1 kecamatan) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo sebagai OPD *leading sector* Pengelola TI.
2. Ketentuan tentang data dan pelaksanaan interoperabilitas data merujuk pada Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Rancangan Peraturan Menteri Tahun 2020 tentang Interoperabilitas Data.
3. Interoperabilitas data dibatasi pada ruang lingkup: penyusunan dan pemetaan data primer OPD berdasarkan wewenang dan tanggung jawab, analisis interoperabilitas data berdasarkan pemetaan data primer, penyusunan kamus data berdasarkan struktur database dari sistem informasi kelompok pelayanan umum, pengujian interoperabilitas dengan uji beban (*load testing*) dan uji fungsi.
4. Pengujian interoperabilitas berupa uji beban (*load test*) menggunakan tools aplikasi Apache Jmeter dan uji fungsi menggunakan sampel aplikasi *provider*, aplikasi *web service*, dan aplikasi *client*.
5. Partisipan OPD diwakili oleh unsur Pimpinan OPD atau pejabat yang berwenang dan pengelola data atau IT OPD).
6. Data primer berdasarkan data keluaran dari sistem informasi yang ada di OPD yang menjadi kebutuhan data lintas OPD, jika OPD belum mempunyai sistem

informasi, maka data primer berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purworejo.

7. RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016.
8. Penelitian tidak sampai pembahasan proses otomatisasi validasi hasil survei dengan menggunakan *machine learning*.
9. Penyusunan rekomendasi pengembangan sistem informasi berdasarkan analisis PEST dan Mc. Farlan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penyusunan Data Primer yang diinventarisir dari OPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab nya yang akan menjadi dasar interoperabilitas sistem informasi menuju layanan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Pemetaan Data Primer berdasarkan wewenang, tanggung jawab data dan kebutuhan data antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Penyusunan skema pemetaan interoperabilitas sistem informasi berdasarkan hasil pemetaan data primer.
4. Perancangan kamus data sebagai acuan pengembangan sistem informasi yang akan datang.
5. Pengujian interoperabilitas untuk uji beban (*load testing*) dan uji fungsi.
6. Memberikan rekomendasi untuk implementasi sistem informasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menyusun data primer dalam bidang pemerintahan di tingkat kabupaten dan juga perancangan kamus data yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan interoperabilitas antar sistem informasi atau aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Membantu pengelola IT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo dalam pemetaan atau mapping interoperabilitas data antar OPD sesuai kewenangan pada masing-masing tupoksinya.
3. Menghasilkan rekomendasi untuk implementasi Sistem Informasi dengan pemetaan sistem informasi sesuai kontribusinya terhadap organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
4. Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan di lingkungan akademik dan berguna menambah literatur akademik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nanang Ruswianto, Ema Utami, M. Rudyanto Arief (2018) yang berjudul Perancangan Data Primer Untuk Layanan E-Government Berbasis Ketugasan Dengan Pendekatan Model Diagram RACI (Study Kasus : Pemerintah Kota Magelang), mengungkapkan Analisis Data Primer untuk membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Berkelanjutan pada Pemerintah Kota Magelang. COBIT 4.1 merekomendasikan acuan matrix penugasan tanggung jawab /*Responsibility Assignment Matrix* (RAM) dalam bentuk RACI Chart (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*). RACI Chart dimanfaatkan untuk penentuan penanggungjawab data primer dalam tatanan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dengan melibatkan 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merancang data primer dan kamus data. Penulis disini akan melakukan penelitian penyusunan data primer untuk transformasi digital pelaksanaan *e-Government* dengan mengambil studi kasus pada lingkup yang lebih luas yaitu kabupaten, dimana dari segi wilayah dan geografis kabupaten lebih luas dari kota dan jumlah OPD lebih banyak dari kota, pada kesempatan ini penulis mengambil studi kasus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang melibatkan 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data. Pada penelitian ini penulis menambahkan analisis perencanaan strategis sistem informasi

menggunakan analisis PEST dan Mc. Farlan Grid dari kerangka kerja Ward and Prepard yang digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alif, Hardi Warsono (2019) yang berjudul *Analysis Development Of E-Government On Provision Of Information Access In Central Java's Province Library*, mengungkapkan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berorientasi kepada pelayanan publik, dimana mereka menyediakan sebuah kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan perpustakaan melalui *e-Government*. Program *e-Government* yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah antara lain *website*, *iJateng*, RFID, *InlisLite*, RBM, dan fasilitas elektronik lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah yang berwenang dan terlibat langsung dalam kegiatan *e-Government* serta observasi lapangan. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan melalui informasi yang tersedia pada *website* Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan data-data yang diperoleh dari tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-Government* sudah baik, namun pada pengembangan *e-Government* masih terdapat beberapa permasalahan dalam SDM dan fasilitas yang ada.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Awan Setiawan dan Erwin Yulianto (2018) yang berjudul *E-Government Interoperability and Integration Architecture Modeling Using TOGAF Framework Based On Service Oriented Architecture*, mengungkapkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan membuat konsep Interoperabilitas *e-Government* dan solusi integrasi dari semua aplikasi

yang ada dan menyediakan beberapa model dokumen seperti *e-Government Architecture Vision*, *Integrated Business Model References Architecture*, and *Integrated Data Model References Architecture*. Metodologi yang digunakan adalah *The Open Group Architecture Framework - Architecture Development Method* (TOGAF ADM). TOGAF merupakan *framework* yang menyediakan pendekatan komprehensif untuk desain, rencana, mengimplementasikan dan mengelola Perusahaan Arsitektur secara keseluruhan dan terintegrasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu, diusulkan *Business Reference Model* (BRM) dan *Data Reference Model* (DRM) berdasarkan *Service Oriented Arsitektur* (SOA) untuk Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai kerangka kerja standar dalam persiapan arsitektur *e-Government* pada Pemerintah Provinsi berdasarkan *Interoperability & Integration Architecture Modeling*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Hairul Othman and Rozilawati Razali (2017) yang berjudul *Electronic Government Systems Interopability Model*, melakukan penelitian mengenai faktor yang berkontribusi terhadap interoperabilitas sistem *e-Government*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan sistem *e-Government* pada organisasi mereka, studi ini memperluas temuan lebih lanjut dari penelitian sebelumnya dengan mengkonfirmasi faktor-faktor tersebut melalui pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur digunakan dengan melibatkan lima informan yang sangat berpengalaman dari berbagai Lembaga Pemerintah. Data empiris kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten. Dari analisis, tujuh faktor

disempurnakan menjadi masing-masing elemen, yang menggambarkan karakteristik masing-masing faktor. Faktor dan elemen-elemen kemudian bersama-sama membentuk model interoperabilitas sistem *e-Government*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah makalah ini telah membahas faktor-faktor penting untuk mencapai keberhasilan implementasi interoperabilitas di Pemerintah. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan penyediaan layanan Pemerintah melalui sistem yang terintegrasi. Sebagian besar pemerintah ingin mengembangkan layanan terintegrasi yang dibuat khusus untuk warga negara dan kebutuhan bisnis untuk meningkatkan efisiensi proses dan koordinasi data di seluruh sistem yang heterogen. Ini mengarah pada transformasi bisnis dan saling menguntungkan yang ditransfer dari para pemangku kepentingan kepada warga negara.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Dzikrullah dan Muhammad Angga Rinjani (2017) yang berjudul *A Framework Design To Develop Integrated Data System For Smart E-Government Based On Big Data Technology*. Dalam makalah ini melakukan penelitian tentang interoperabilitas dalam infrastruktur *e-Government*, Pemerintah menghasilkan dan mengumpulkan data dalam jumlah yang besar (*volume*), pertumbuhan data yang pesat (*velocity*) dan data dari berbagai jenis (variasi) melalui layanan-layanan mereka. Sementara itu, lembaga-lembaga Pemerintah terus membangun berbagai basis data, sistem informasi atau aplikasi dengan sumber data dan platform yang berbeda. Oleh karena itu, interoperabilitas telah menjadi persyaratan penting dalam infrastruktur *e-Government*. Dalam makalah ini mengusulkan desain kerangka kerja (*framework*) untuk pengembangan *Integrated Data System Smart e-Government*. *Framework* yang dirancang untuk

mencapai interoperabilitas dan fleksibilitas yang memungkinkan mengintegrasikan beragam jenis aplikasi, platform, sistem operasi, basis data dan jaringan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Djalal Er Riyanto, Panji Wisnu Wirawan, and Kabul Kurniawan (2018) yang berjudul *E-Government Interoperability: Architecture Model for Public Information Services of Sub-District Governments*, melakukan penelitian tentang Interoperabilitas *e-Government* untuk layanan-layanan informasi masyarakat di tingkat Kecamatan. Model arsitektur yang dihasilkan dari penelitian ini menggambarkan struktur Interoperabilitas *e-Government*, komponen-komponen sistem dari organisasi dasar, hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya dan *environment*. Validasi model menggunakan pendekatan hasil / analisis teori untuk standarisasi data, platform yang solid, akses yang lebih mudah ke informasi, dan layanan-layanan administrasi yang efisien. Eksplorasi dan studi adalah studi pendahuluan untuk mendapatkan bahan dari literatur dan observasi, terkait dengan lembaga publik, serta aplikator-aplikator dan pengguna informasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan dan perundang-undangan mengamankan perlunya sistem layanan informasi publik yang lebih luas dan lebih mudah diakses. Model Arsitektur Interoperabilitas *e-Government* tingkat Kabupaten dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya mewujudkan perintah, melalui penggunaan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan menggunakan validasi model dengan pendekatan analisis hasil/teori, disimpulkan bahwa model tersebut mampu mewujudkan pengembangan integrasi database vertikal kecamatan dan portal single-sign-on. Implementasi model arsitektur *e-*

Government Interoperability dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sistem informasi yang ada, serta mendukung kesediaan semua pihak berdasarkan semangat untuk mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dedeng Hirawan (2015) yang berjudul Rencana Strategis Sistem Dan Teknologi Informasi Dalam Usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Di Bappeda Kabupaten Subang, melakukan penelitian tentang rencana strategis sistem dan teknologi informasi, yang diharapkan dapat digunakan sebagai pendekatan ilmiah (teknokratik) dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) oleh Bappeda selaku badan yang mempunyai tugas dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Subang. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisa penerapan sistem yang telah berjalan saat ini (*existing*) dengan menggunakan tools domain *plan and organize* (PO) COBIT versi 4.1. Kemudian dilakukan perumusan rencana strategis dengan mempertimbangkan faktor eksternal dengan menggunakan analisa PEST (*Political, Economic, Social-Culture, and Technology*). Tahapan yang terakhir yaitu berupa rekomendasi dengan memetakan sistem informasi yang dibutuhkan dalam bentuk aplikasi *portfolio* Mc.Farlan, serta arahan arsitektur aplikasi dan implementasi rencana strategis untuk jangka waktu lima tahun.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rizki Romdoni (2013) yang berjudul Perancangan Portal Interoperabilitas E-Government Sebagai Platform Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini melakukan penelitian tentang pengembangan arsitektur berbasis SOA

(Service Oriented Architecture) yang diberi nama PIE (Portal Interoperabilitas E-Government) yang akan digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam berintegrasi dan berbagi sumber daya antar SKPD dengan mudah dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna. Hasil penelitian ini mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan melalui PIE dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam SOA.



2.2. Keaslian Penelitian

Tabel 2. 1 Matriks literatur review dan posisi penelitian
Penyusunan Data Primer Untuk Membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Menuju Layanan *E-Government* Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram RACI (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Purworejo)

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
1	Perancangan Data Primer Untuk Layanan E-Government Berbasis Ketugasan Dengan Pendekatan Model Diagram Raci (Studi Kasus : Pemerintah Kota Magelang)	Nanang Ruiswanto, Ema Utami, M. Rudyanto Arief, SEMNASTEKNOMEDIA 2018 Vol 6, No 1 (2018) ISSN : 2302-3805. Universitas AMIKOM Yogyakarta, 2018	Melakukan analisa pada data primer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagai bahan penyusunan roadmap pengembangan interoperabilitas sistem informasi yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari 96 data primer yang ada, hanya terdapat 5 data primer yang memiliki derajat keprimeran (kebutuhan untuk berbagi) paling tinggi. 2. Dari 36 OPD penyelenggara layanan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, hanya 3 OPD yang sangat mempengaruhi kualitas dan eksistensi data primer. 3. Berdasarkan skala prioritas untuk mendukung RPJMD 2016-2022, pelayanan publik memiliki porsi terbesar yang harus segera dikembangkan terlebih dahulu agar bisa segera memberikan manfaat pada masyarakat. 4. Dalam penelitian ini hanya 2 dari 23% persen porsi layanan public yang didukung data primer yang sudah dirancang, maka masih ada peluang untuk mengembangkan lebih banyak lagi data dan informasi yang dipertukarkan antar OPD maupun antar OPD dengan masyarakat 	Perlu ditambahkan pengujian interoperabilitas untuk menguji beban dan juga menguji fungsi interoperabilitas	Mengungkapkan Analisis Data Primer untuk membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Berkelanjutan pada Pemerintah Kota Magelang. Penulis di sini mencoba untuk melakukan penelitian penyusunan data primer untuk transformasi digital pelaksanaan e-government dengan mengambil studi kasus Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pada penelitian ini penulis menambahkan pengujian interoperabilitas sistem informasi terkait uji beban (load testing) dan uji fungsi, penyusunan rekomendasi berdasarkan analisis PEST dan Mc. Farlan, dan juga perbandingan data primer pada Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang.

Tabel 2.1. Matriks literatur review dan posisi penelitian
 Penyusunan Data Primer Untuk Membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Menuju Layanan *E-Government* Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram RACI (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Purworejo) (Lanjutan)

2	<p><i>Analysis Development Of E-Government On Provision Of Information Access In Central Java's Province Library</i></p>	<p>Muhammad Alif, Hardi Warsono, <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>, Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019, DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.25097, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2019</p>	<p>Melakukan analisis pengembangan e-Government dalam penyediaan akses informasi di Perpustakaan provinsi Jawa Tengah dan faktor yang mempengaruhinya</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government sudah baik, namun pada pengembangan e-government masih terdapat beberapa permasalahan dalam SDM dan fasilitas yang ada</p>	<p>Meskipun ada pengumpulan data primer dan data sekunder, namun penelitian masih menitikberatkan pada pengembangan e-Government secara umum seperti pembahasan masalah website, penggunaan teknologi chip RFID pada koleksi buku, pada penelitian ke depan sebaiknya dilakukan analisis data primer yang terkait dengan perpustakaan</p>	<p>Pada penelitian ini tidak membahas detail tentang data primer lebih menitikberatkan pada pelaksanaan e-government secara umum, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada analisis data primer</p>
3	<p><i>E-Government Interoperability and Integration Architecture Modeling Using TOGAF Framework Based On Service Oriented Architecture</i></p>	<p>Awan Setiawan dan Erwin Yulianto, <i>The Asian Journal of Technology Management</i> Vol. 11 No. 1 (2018): 26-45, Informatics Engineering Langlanghuana University, 2018</p>	<p>Mempelajari dan membuat konsep Interoperabilitas e-Government dan solusi integrasi dari semua aplikasi yang ada dan menyediakan beberapa model dokumen seperti <i>e-Government Architecture Vision, Integrated Business Model References Architecture, and Integrated Data Model References Architecture</i></p>	<p>Diadopsi <i>Business Reference Model (BRM)</i> dan <i>Data Reference Model (DRM)</i> berdasarkan <i>Service Oriented Arsitektur (SOA)</i> untuk Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai kerangka kerja standar dalam persiapan arsitektur <i>E-Government</i> pada Pemerintah Provinsi berdasarkan <i>Interoperability & Integration Architecture Modeling</i>.</p>	<p>Tidak membahas detail tentang analisis data primer, lebih ke analisis framework (kerangka kerja) untuk pemodelan yang cocok digunakan</p>	<p>diadopsi <i>Business Reference Model (BRM)</i> dan <i>Data Reference Model (DRM)</i> yang berbasis <i>Service Oriented Arsitektur</i> untuk Pemerintah Provinsi yang dapat digunakan sebagai framework standar dalam persiapan arsitektur <i>E-Government</i> di Pemerintah Provinsi berdasarkan Arsitektur <i>Interoperabilitas & Integrasi Pemodelan</i>, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk keterpaduan data antar OPD dari hasil analisis data primer.</p>

Tabel 2.1. Matriks literatur review dan posisi penelitian
 Penyusunan Data Primer Untuk Membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Menuju Layanan *E-Government* Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram RACI (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Purworejo) (Lanjutan)

4	<i>Electronic Government Systems Interopability Model</i>	Mohamed Hairul Ohman and Rozilawati Razali, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, e-ISSN: 2289-8131 Vol. 9 No. 3-4, Center for Software Technology and Management Faculty of Information Science and Technology Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017	Untuk mengumpulkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan sistem e-Government pada organisasi mereka, studi ini memperluas temuan lebih lanjut dari penelitian sebelumnya dengan mengkonfirmasi faktor-faktor tersebut melalui pendekatan kualitatif	Dalam makalah ini telah membahas faktor-faktor penting untuk mencapai keberhasilan implementasi interoperabilitas di Pemerintah. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan penyediaan layanan Pemerintah melalui sistem yang terintegrasi. Sebagian besar pemerintah ingin mengembangkan layanan terintegrasi yang dibuat khusus untuk warga negara dan kebutuhan bisnis untuk meningkatkan efisiensi proses dan koordinasi data di seluruh sistem yang heterogen. Ini mengarah pada transformasi bisnis dan saling menguntungkan yang ditransfer dari para pemangku kepentingan kepada warga negara.	Hanya pembahasan pada faktor-faktor penting untuk mencapai keberhasilan interoperabilitas di Pemerintah, tidak ada analisis data.	Hanya pembahasan pada faktor-faktor penting untuk mencapai keberhasilan implementasi interoperabilitas di Pemerintah, tidak ada analisis data, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tentang analisis data primer bagi interoperabilitas sistem informasi
5	<i>A Framework Design To Develop Integrated Data System For Smart E-Government Based On Big Data Technology</i>	Fahmi Dzakrullah dan Muhammad Angga Rinjani, Bulletin of Social Informatics Theory and Application, ISSN 2614-0047 Vol. 1, No. 2, December 2017, pp. 41-51, https://doi.org/10.31763/bu-sinta.v1i2.26 , 2017	Melakukan penelitian tentang interoperabilitas dalam infrastruktur e-Government, Pemerintah menghasilkan dan mengumpulkan data dalam jumlah yang besar (<i>volume</i>), pertumbuhan data yang pesat (<i>velocity</i>) dan data dari berbagai jenis (<i>variation</i>) melalui layanan-layanan mereka. Sementara itu, lembaga-lembaga Pemerintah terus membangun berbagai basis data, sistem informasi atau aplikasi dengan sumber data dan platform yang berbeda	Mengusulkan desain kerangka kerja (<i>framework</i>) untuk pengembangan <i>Integrated Data System Smart e-Government Framework</i> yang dirancang untuk mencapai interoperabilitas dan fleksibilitas yang memungkinkan mengintegrasikan beragam jenis aplikasi, platform, sistem operasi, basis data dan jaringan	Sebaiknya tidak hanya analisis tentang framework untuk membangun integrasi data saja, tetapi juga termasuk analisis data secara detail	Mengusulkan desain kerangka kerja (<i>framework</i>) untuk pengembangan <i>Integrated Data System Smart e-Government</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilakukan untuk keterpaduan data antar OPD dari hasil analisis data primer

Tabel 2.1. Matriks literatur review dan posisi penelitian
 Penyusunan Data Primer Untuk Membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Menuju Layanan *E-Government* Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram RACI (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Purworejo) (Lanjutan)

6	<p><i>E-Government Interoperability: Architecture Model for Public Information Services of Sub-District Governments</i></p>	<p>Djalal Er Riyanto, Pung Wisnu Wirawan, and Kabul Kurniawan, MATEC Web of Conferences 218, 03008 (2018), ICIEE 2018, https://doi.org/10.1051/matec-conf/201821803008, Departemen of Computer Science, FSM, Diponegoro University, Semarang, Indonesia, (2018)</p>	<p>Melakukan penelitian tentang Interoperabilitas <i>e-Government</i> untuk layanan-layanan informasi masyarakat di tingkat Kecamatan.</p>	<p>Dengan menggunakan validasi model dengan pendekatan analisis hasil-teori, disimpulkan bahwa model tersebut mampu mewujudkan pengombangan integrasi database vertikal kecamatan dan portal single-sign-on. Implementasi model aritektur <i>e-Government Interoperability</i> dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sistem informasi yang ada, serta mendukung kesediaan semua pihak berdasarkan semangat untuk mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan</p>	<p>Pada penelitian ini melakukan penelitian tentang interoperabilitas <i>e-Government</i> untuk layanan informasi di tingkat kecamatan, kami sarankan untuk melakukan penelitian ke cakupan yang lebih luas yaitu tingkat kota/kabupaten yang tentunya permasalahan akan lebih kompleks</p>	<p>penelitian ini melakukan penelitian tentang interoperabilitas <i>e-Government</i> untuk layanan informasi di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis data primer seluruh OPD di seluruh Kabupaten untuk interoperabilitas Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo</p>
7	<p>Rencana Strategis Sistem Dan Teknologi Informasi Dalam Usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Di Bappeda Kabupaten Subang</p>	<p>Dedeng Hirawan, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), Vol. 4, No. 1, Maret 2015, ISSN : 2089-9033, 2015</p>	<p>Melakukan penelitian tentang rencana strategis sistem dan teknologi informasi, yang diharapkan dapat digunakan sebagai pendekatan ilmiah (teknokratik) dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJ MD) oleh Bappeda selaku badan yang mempunyai tugas dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Subang.</p>	<p>- Hasil analisis yang dilakukan pada sistem yang sudah berjalan (eksisting) menunjukkan bahwa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Subang dalam penerapannya belum maksimal serta belum mempunyai arah dalam penerapan sistem informasi yang ideal. Untuk itu diperlukan adanya sebuah rencana sistem informasi yang dapat membantu dan meningkatkan kinerja semua elemen pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. - Rancangan rencana strategis sistem informasi dilihat berdasarkan arahan dari visi dan misi Kabupaten Subang dengan mengedepankan dan berfokus pada tiga bidang yakni, agribisnis, pariwisata serta industri. Sehingga peran sistem informasi ini selaras dengan rencana pembangunan pada masa yang akan datang.</p>	<p>Pada penelitian ini melakukan perencanaan strategi sistem informasi, penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk disarankan untuk menggali juga data yang merupakan unsur pokok dari sistem informasi</p>	<p>Pada penelitian ini membahas tentang rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi dengan tools pada Cobit 4.1 dan beberapa analisis yaitu PEST, Mc Farlan Grid, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menyusun data primer dan menggunakan analisis PEST dan Mc farlan Grid untuk memetakan sistem informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi</p>

Tabel 2.1. Matriks literatur review dan posisi penelitian
 Penyusunan Data Primer Untuk Membuat Interoperabilitas Sistem Informasi Menuju Layanan *E-Government* Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram RACI (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Purworejo) (Lanjutan)

8	Perancangan Portal Interoperabilitas <i>E-Government</i> Sebagai Platform Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Kota Denpasar	Mochammad Rizki Romdoni, Lontar Komputer Vol. 4 No. 2, Desember 2013, ISSN 2088-1541	melakukan penelitian tentang pengembangan arsitektur berbasis SOA (<i>Service Oriented Architecture</i>) yang diberi nama PIE (Portal Interoperabilitas <i>E-Government</i>) yang akan digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam berintegrasi dan berbagi sumber daya antar SKPD dengan mudah dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna	Hasil penelitian ini mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan melalui PIE dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam SOA	Pengujian dilakukan hanya menggunakan dua aplikasi untuk melakukan uji interoperabilitas yaitu Sistem Informasi Apotik pada Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pada penelitian ini dalam pengujian interoperabilitas sistem informasi menggunakan 2 aplikasi untuk uji coba, sedangkan penulis menggunakan metode yang sama tetapi menggunakan 5 aplikasi untuk uji interoperabilitas dengan <i>provider</i> data yang sama yaitu data kependudukan dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
---	---	--	--	--	---	--

2.3. Landasan Teori

Landasan teori yang menjadi rujukan pada penelitian ini berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dan juga teori-teori maupun *tools* yang digunakan sebagai alat bantu sebagaimana dicantumkan dalam batasan masalah dan daftar pustaka.

2.3.1. Peraturan-peraturan tentang Data dan Interoperabilitas

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data (pasal 9 ayat 1). Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika (pasal 9 ayat 3). Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Tahun 2020 tentang Interoperabilitas Data yang menjadi dasar pelaksanaan interoperabilitas bagi Pemerintah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan kedua peraturan atau regulasi tersebut di atas, memberikan panduan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan interoperabilitas data dengan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, mengingat Pemerintah Kabupaten Purworejo belum membuat aturan turunan yang mengatur tentang data dan pelaksanaan interoperabilitas data di Pemerintah Kabupaten Purworejo. Selaras dengan pelaksanaan interoperabilitas

data pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, pada penelitian ini merujuk pada Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Rancangan Peraturan Menteri Tahun 2020 tentang Interoperabilitas Data.

2.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo.

RPJMD Kabupaten Purworejo, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Arah dan kebijakan Kabupaten Purworejo dibagi dalam 7 misi. Adapun misi yang diamanatkan kepada Dinkominfo Kabupaten Purworejo sebagai berikut : “Misi : Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik”.

2.3.3. Diagram RACI

Diagram RACI atau *RACI Chart* merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan. Pembagian tugas yang jelas beserta peran dan tanggung jawabnya merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab akan menyebabkan kebingungan yang akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya produktivitas kerja karyawannya. RACI merupakan singkatan dari *Responsible*, *Accountable*, *Consulted* dan *Informed*. Sehingga sering disebut juga dengan *RACI Chart* atau *RACI Chart Matrix*. RACI Chart terdiri empat parameter, yaitu : *Responsible*,

merupakan orang yang melakukan tugas atau pekerjaan. *Responsible* pada dasarnya adalah pelaksana tugas. *Accountable*, yaitu orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan atau perkara. *Accountable* yang dimaksud disini pada dasarnya adalah Penanggung Jawab dan Pengambil keputusan. *Consulted*, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat atau Kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. *Consulted* pada dasarnya adalah Konsultan ataupun penasehat. *Informed*, yaitu orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil.

Kegunaan *RACI Matrix* ini untuk organisasi yang dikelola (Smith, 2015), adalah :

- Menggambarkan peran dan tanggung jawab serta tugas masing-masing department/orang dalam melakukan suatu pekerjaan.
- Menghilangkan tugas-tugas yang masuk dalam *grey area*, tugas yang tidak jelas siapa yang menjalankannya karena tidak ada yang mengerjakan maupun tugas yang tumpang tindih antar department.
- Mengidentifikasi beban kerja yang telah ditugaskan kepada karyawan tertentu atau departemen
- Memastikan bahwa proses tertentu tidak terlalu dominan
- Memastikan bahwa anggota baru dijelaskan tentang peran dan tanggung jawab
- Menemukan keseimbangan yang tepat antara garis dan tanggung jawab pekerjaan

- Mendistribusikan kerja antara kelompok untuk mendapatkan efisiensi kerja yang lebih baik
- Terbuka untuk menyelesaikan konflik dan diskusi
- Mendokumentasikan peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi

Tabel 2. 2 Contoh Tabel Pengolahan Data (RACI Chart)

No.	OPD DATA PRIMER	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Permukiman dan Pertanahan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
1.	Data Jalan Lingkungan	A/R	I	I
2.	Data Tata Ruang	A/R		I
3.	Data Perumahan	C	A/R	I

2.3.4. Analisis PEST dan Mc. Farlan Grid

Analisis PEST terkait dengan pengaruh lingkungan pada suatu organisasi. Menurut Ward dan Peppard (2002), analisis PEST adalah analisis terhadap faktor lingkungan eksternal bisnis atau organisasi yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Faktor PEST berperan penting dalam menciptakan nilai keuntungan suatu strategi yang biasanya terjadi di luar kontrol sebuah organisasi.

Mc Farlan Strategic Grid digunakan untuk memetakan aplikasi atau Sistem Informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada empat kuadran (*strategic, high potential, key operation, and support*) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3. Dari hasil pemetaan tersebut diperoleh gambaran kontribusi sebuah sistem informasi terhadap organisasi dan pengembangan di masa mendatang (Ward and Griffith).

Tabel 2. 3 Pemetaan Sistem Informasi pada Mc. Farlan Grid

Strategic	High Potential
Aplikasi ini bersifat <i>strategic</i> karena dianggap sebagai faktor hulu dari sebuah sistem informasi	Sistem informasi yang termasuk <i>high potential</i> merupakan sistem informasi yang dapat dibangun atau dikembangkan pada masa yang akan datang
Key Operation	Support
Sistem informasi yang termasuk <i>key operational</i> merupakan aplikasi yang seharusnya ada dan terintegrasi di setiap SKPD	Sistem informasi ini hanya digunakan sebagai pendukung dari sistem informasi yang mempunyai potensial tinggi

2.3.5. Triangulasi

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal. (Budi Wanan Salaka, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metode penelitian yang tepat dan benar semakin dirasakan urgensinya bagi keberhasilan suatu penelitian. Metode yang digunakan antara lain metode sejarah, metode deskriptif, metode survei (menyelidiki gejala, fakta secara faktual), metode percobaan (eksperimen), metode studi kasus (suatu objek spesifik), metode kooperatif yang menjawab keadaan sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab utama serta studi kepustakaan. Metode penelitian yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat (*tools*) yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang digunakan (Hasibuan, Z.A, 2007).

3.1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Adapun tahapan pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan tahapan penelitian sesuai Alur Penelitian pada Gambar 3.1. Berikut ini merupakan tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini :

- a. Tahap Persiapan Penelitian atau Pra Penelitian

Pada tahap persiapan penelitian dimulai dengan menentukan tujuan dari penelitian ini, mengidentifikasi atau inventarisasi permasalahan yang, melakukan tinjauan pustaka atau studi literatur.

b. Tahap Pengumpulan Data

Sebelum pelaksanaan survei, dilakukan inventaris atau mendefinisikan OPD yang akan dilakukan survei. Mempersiapkan usulan form survei dan dilakukan verifikasi atas usulan isian untuk memastikan konten yang disajikan dalam form survei sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data :

- melakukan inventaris sistem informasi atau aplikasi yang berjalan di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan menggunakan blangko atau form survei berbasis *online*.
- Inventarisasi aplikasi meliputi kondisi dari apakah masih berfungsi atau tidak, teknologi atau platform yang digunakan untuk membangun aplikasi tersebut, output atau keluaran data, serta identitas pembuat atau pengembang dari aplikasi yang bersangkutan.
- Menginventaris struktur data dari sistem informasi atau aplikasi yang berjalan saat ini.
- Menginventaris kebutuhan data antar OPD.

Alamat atau *link* form survei berbasis *online* dibagikan ke OPD, proses pengisian form secara *online* diberi waktu 10 hari kalender, kemudian proses selanjutnya adalah konfirmasi ke OPD tentang konten pengisian oleh pengelola

data tiap OPD sekaligus berkonsultasi dengan pengambil kebijakan tiap OPD, pada proses ini dapat dilakukan secara *online*.

c. Tahap Pengolahan Data

Proses Pengolahan data dilakukan dengan merekapitulasi data yang dihasilkan dari survei dengan mengelompokkan ke dalam tabel RACI. Informasi kolom pada tabel RACI berupa OPD pengelola atau penanggungjawab data yang akan mengolah data primer, dan baris merupakan informasi data primer hasil inventarisasi dan pendataan pada tiap OPD. Perencanaan strategis Sistem Informasi menggunakan model perencanaan Ward and Prepard dengan analisis PEST untuk menganalisis terkait pengaruh lingkungan pada suatu organisasi dan analisis Mc Farlan Grid untuk pemetaan sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi.

d. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

Setelah mendapatkan informasi data yang dikelola oleh tiap OPD, langkah selanjutnya adalah konfirmasi dan memastikan peran dan tanggungjawab terhadap hasil inventarisasi data primer yang telah direkap dengan melakukan FGD yang dilakukan dengan tiga unsur yaitu pimpinan atau pejabat OPD yang merupakan pengambil kebijakan pada OPD, pengelola data atau TI tiap OPD yang merupakan unsur pelaksana teknis pada OPD, dan pimpinan atau pejabat beserta tim teknis leading sector pengelola IT yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo. Pada FGD sekaligus untuk melengkapi proses kebutuhan data antar OPD yang dikumpulkan pada saat inventarisasi, kemudian mengkonfirmasi pada OPD lain yang bersangkutan. Dengan melakukan FGD bersama tiga unsur

diharapkan mendapatkan hasil yang akurat dengan menyangdingkan hasil FGD dari tiga unsur untuk didapatkan satu hasil, sehingga dengan proses triangulasi ini diharapkan mendapatkan data yang lebih valid karena dengan mempertimbangkan masukan lebih dari satu pihak. Selain melalui proses FGD, akan dilakukan wawancara untuk memperdalam penggalian informasi dan dokumen yang berupa produk hukum juga dapat menjadi sumber data yang dapat dijadikan bahan konfirmasi dalam proses triangulasi.

e. *In Depth Interview*

Kegiatan *In Depth Interview* merupakan tahapan untuk menindaklanjuti data hasil FGD pertama dan data hasil form survei. Dilakukan klarifikasi ke tiap OPD dengan melakukan wawancara secara langsung bersama pimpinan atau pejabat OPD dan personil teknis yang mengurus data atau pengelolaan sistem informasi. Dengan berdasarkan hasil FGD pertama, data hasil form survei dan tugas pokok fungsi tiap OPD, dilakukan klarifikasi terkait dengan : sistem informasi eksiting apa saja yang ada pada OPD, data-data apa saja yang menjadi kewenangan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan kebutuhan lintas OPD yaitu : data kewenangan OPD yang sering dibutuhkan atau diminta oleh OPD lain dan data yang dibutuhkan dari OPD lain. Data hasil dari kegiatan *In Depth Interview* akan dijadikan input pada Tabel RACI untuk kemudian menjadi bahan analisis.

f. Tahap Analisa Dan Pemetaan Interoperabilitas Data

Tahap selanjutnya merupakan aktivitas pemetaan keterpaduan kebutuhan data, yang menjadi landasan untuk menyusun keterpaduan proses dan integrasi aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pada tahap ini kebutuhan

data dari tiap OPD akan dipetakan secara rinci, memetakan hak akses dan kontribusi tiap OPD terhadap data-data tersebut, dan juga memetakan sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi.

g. Pengujian Interoperabilitas

Selaras dengan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2020 tentang Interoperabilitas Data, uji interoperabilitas dilakukan dengan uji beban (*load test*) terhadap sampel sistem informasi yang menjadi *provider* data, sistem informasi dan sistem informasi yang menjadi *client*. dan berdasarkan wawancara bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo selain uji beban perlu dilakukan pengujian fungsi interoperabilitas untuk membuktikan bahwan tujuan dari interoperabilitas dapat tercapai.

3.2. Metode Pengumpulan Data

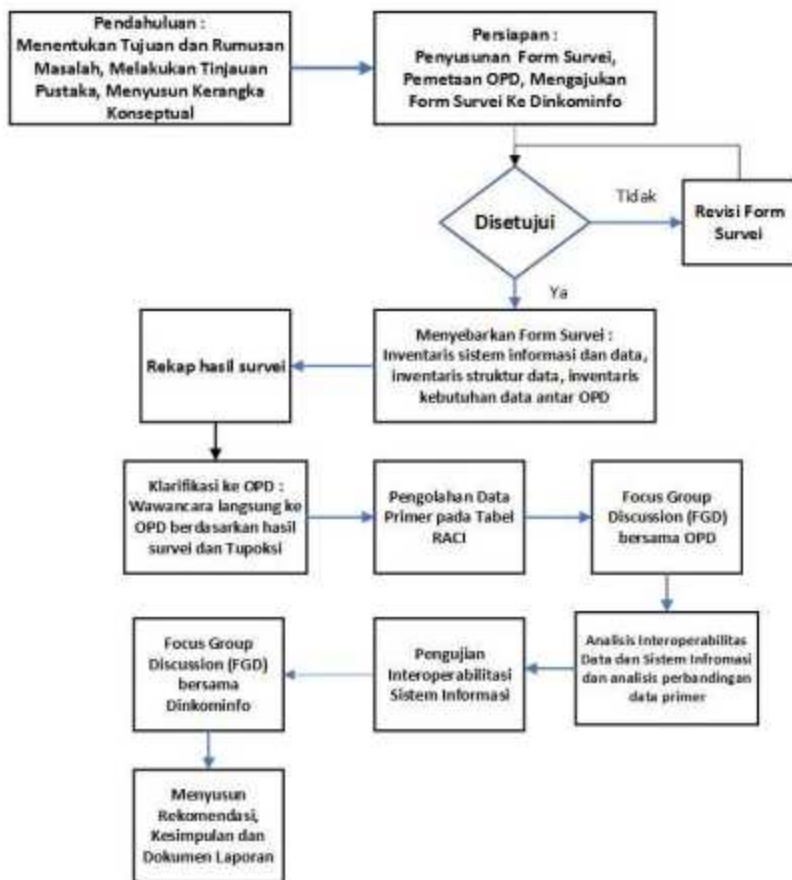
Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan pengisian form survei secara online oleh 35 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan melibatkan penanggungjawab sistem di masing-masing OPD, unsur pimpinan sebagai pengambil kebijakan, unsur Dinas Komunikasi dan Informatika yang kemudian dijadikan sumber data primer. Untuk mendukung dan menguatkan penelitian juga melakukan kajian literatur serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait dengan tugas pokok fungsi tiap OPD yang disebut sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan melalui proses survei merupakan data primer yang terkait tugas aktual yang selama

ini berjalan di tiap OPD, sedangkan data sekunder yang dijadikan bahan konfirmasi atas kewenangan deskripsi tugas yang ada di peraturan Bupati terkait dengan tugas pokok fungsi yang diberikan ke tiap OPD.

3.3. Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan tergantung pada tujuan penelitian serta ketersediaan pengelolaan data. Rencana analisis data yang dilakukan dengan berdasarkan pemetaan data primer pada OPD yang diperoleh melalui proses survei dan telah dikonfirmasi pada tahap Focus Group Discussion (FGD). Tabel RACI menggambarkan informasi kolom merupakan OPD yang mempunyai kepentingan terhadap data primer, dan informasi baris merupakan data primer yang dikumpulkan dari tiap OPD sesuai yang diamanahkan. Dari analisis data menghasilkan suatu rekomendasi, yang akan diberikan saran atau masukan terkait dengan langkah-langkah implementasi data primer sesuai dengan sasaran dan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo dan juga Road Map Smart City Kabupaten Purworejo, dan saran-saran tambahan lain untuk pengembangan sistem informasi atau aplikasi yang sudah ada agar menyesuaikan dengan data primer yang dikelola tiap OPD dalam rangka pemenuhan pada kamus data primer yang sudah disusun. Selain analisa data primer juga dilakukan analisa perencanaan strategis sistem informasi menggunakan model perencanaan Ward and Prepard dengan analisis PEST untuk menganalisis terkait pengaruh lingkungan pada suatu organisasi dan analisis Mc Farlan Grid untuk pemetaan sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi.

3.4. Alur Penelitian



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Merujuk pada Gambar 3.1., menentukan tujuan dan rumusan masalah yang akan diselesaikan dan tinjauan pustaka adalah yang pertama dilakukan pada tahap pra penelitian untuk memastikan apakah sudah cukup untuk membuat konsep penelitian. Pada tahap berikutnya yaitu tahap pendahuluan dilakukan penyusunan form survei, pemetaan OPD pada tabel RACI dan pengajuan persetujuan form

survei kepada pejabat penanggungjawab di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo. Setelah mendapatkan persetujuan, form survei dikirimkan kepada seluruh responden dengan pokok isian terkait inventaris sistem informasi dan data, inventaris struktur data dan kebutuhan data antar OPD. Selanjutnya dilakukan wawancara langsung ke masing-masing OPD untuk klarifikasi hasil form survei dan melihat kondisi eksisting sistem informasi maupun data yang ada dan klarifikasi terkait kebutuhan data antar OPD dengan berdasarkan pada tugas pokok fungsi masing-masing OPD. Data hasil dari form survei direkap dalam tabel RACI untuk memetakan kewenangan dan tanggung jawab data maupun sistem informasi masing-masing OPD dan juga kebutuhan data lintas OPD. Pada tahapan selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama OPD untuk konfirmasi terhadap hasil pengumpulan data dan rekapitulasi data pada Tabel RACI dan juga dilakukan pembahasan bersama terkait kebutuhan data lintas OPD dan rencana pengembangan sistem informasi. Dengan berdasarkan rekapitulasi data pada tabel RACI dan hasil FGD bersama OPD, kemudian dilakukan analisis pada tabel RACI terkait pemetaan wewenang dan tanggung jawab data tiap OPD dan analisis kebutuhan data antar OPD yang akan menjadi dasar pemetaan interoperabilitas data dan sistem informasi. Setelah tahapan analisis interoperabilitas data dan sistem informasi dilakukan pengujian interoperabilitas sistem informasi, pengujian dilakukan terkait uji beban (*load test*) dan uji fungsi terhadap sampel sistem informasi yang menjadi *provider* data interoperabilitas. Pada tahapan selanjutnya dilakukan FGD yang kedua bersama pejabat dan tim teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo untuk memaparkan hasil penelitian mulai

dari pengumpulan data sampai analisis interoperabilitas data dan sistem informasi, dan juga pembahasan terkait rencana pengembangan sistem informasi, dimana hasil dari FGD ini akan dijadikan bahan dalam penyusunan rekomendasi. Pada tahap terakhir penelitian ini yaitu penyusunan rekomendasi, pembuatan kesimpulan dan penyusunan laporan. Sebagai bahan penyusunan rekomendasi terlebih dahulu dilakukan analisis sistem informasi menggunakan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) dan analisis Mc. Farlan, juga dilakukan kajian beberapa kebijakan dan implementasi teknologi yang sudah diterapkan diantaranya RPJMD Kabupaten Purworejo dan juga Road Map Smart City Kabupaten Purworejo. Pada tahapan terakhir adalah penyusunan kesimpulan dan laporan dari keseluruhan hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Obyek Penelitian

Kabupaten purworejo terletak pada posisi 109° 47' 28" - 110° 08' 20" Bujur Timur, 7° 32' Lintang Selatan. Secara topografis merupakan wilayah beriklim tropis basah dengan suhu antara 19C-28C. sedangkan kelembaban udara antara 70% - 90% dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember 311 mm dan bulan Maret 289 mm. Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034,81752 km² dengan batas wilayah sebelah barat Kabupaten Kebumen, sebelah utara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo, sebelah timur Kabupaten Kulonprogo (DIY) dan sebelah selatan Samdra Indonesia.

Tabel 4. 1 Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ²)	Presentase terhadap Luas Kabupaten
1	Grabag	Patutreja	64.92	6.27
2	Ngombol	Ngombol	55.27	5.34
3	Purwodadi	Jenaf Wetan	53.96	5.21
4	Bagelen	Bagelen	63.76	6.16
5	Kaligesing	Kaligono	74.73	7.22
6	Purworejo	Cangkreplor	52.72	5.10
7	Banyuurip	Banyuurip	45.08	4.36
8	Bayan	Besole	43.21	4.18
9	Kutoarjo	Kutoarjo	37.29	3.63
10	Butuh	Dlangu	46.08	4.45
11	Pituruh	Pituruh	77.42	7.48
12	Kemiri	Kemiri Kidul	92.05	8.90
13	Bruno	Brunorejo	108.43	10.48
14	Gebang	Bendosari	71.86	6.94
15	Loano	Banyuasin Kembaran	53.65	5.19
16	Bener	Kaliurip	94.08	9.09
			1034.82	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo 2020

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 42 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Daftar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

No.	Perangkat Daerah	Tipe	Singkatan
1.	Sekretariat Daerah	A	SETDA
2.	Sekretariat DPRD	A	SEKRETARIAT DPRD
3.	Inspektorat	A	INSPEKTORAT
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	A	DINDIKPORA
5.	Dinas Kesehatan	B	DINKES
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	DINUPUR
7.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	C	DINPERKIMTAN
8.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	DINSOSDUKKBPPPA
9.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	A	DINPPKP
10.	Dinas Lingkungan Hidup	B	DINLH
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	DISDUKCAPIL
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	DINPERMADES
13.	Dinas Perhubungan	B	DINHUB
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	DINKOMINFO
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	DINPARBUD
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	B	DINARPUS
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	B	DINKUKMP
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	C	DINPMPTSP
19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	C	DINPERINAKEK
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	B	SATPOL PP DAMKAR
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	BAPPEDA
22.	Badan Kepegawaian Daerah	B	BKD
23.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	BPPKAD
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BPBD
25.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		KANTOR KESBANGPOL
26.	Rumah Sakit Umum Daerah		RSUD
27.	Kecamatan Grabag	A	Kec. Grabag
28.	Kecamatan Ngombol	A	Kec. Ngombol

Tabel 4.2 Daftar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Lanjutan)

29.	Kecamatan Purwodadi	A	Kec. Purwodadi
30.	Kecamatan Bagelen	A	Kec. Bagelen
31.	Kecamatan Kaligesing	A	Kec. Kaligesing
32.	Kecamatan Purworejo	A	Kec. Purworejo
33.	Kecamatan Banyuurip	A	Kec. Banyuurip
34.	Kecamatan Bayan	A	Kec. Bayan
35.	Kecamatan Kutoarjo	A	Kec. Kutoarjo
36.	Kecamatan Butuh	A	Kec. Butuh
37.	Kecamatan Pituruh	A	Kec. Pituruh
38.	Kecamatan Kemiri	A	Kec. Kemiri
39.	Kecamatan Bruno	A	Kec. Bruno
40.	Kecamatan Gebang	A	Kec. Gebang
41.	Kecamatan Loano	A	Kec. Loano

Pada penelitian ini melibatkan semua OPD yang terdiri dari semua bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo (ada 9 bagian) sehubungan dengan tugas pokok fungsi Sekretariat Daerah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo nomor 64 tahun 2016 yaitu sebagai pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, penelitian juga melibatkan semua dinas, badan, rumah sakit umum daerah, instansi non dinas dan badan (25 OPD), dan kecamatan (diwakili 1 kecamatan) sesuai tugas pokok fungsi kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purworejo nomor 87 tahun 2016 yang berlaku untuk semua kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Adapun penelitian ini dilakukan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan *leading sector* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo yang merupakan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi komunikasi dan persandian serta statistik dan teknologi informatika, sesuai yang

tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purworejo. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Komunikasi Informasi dan Persandian, Bidang Statistik Data dan Teknologi Informatika, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2. Pengelompokan Data Primer

Sumber basis data yang akan dikembangkan dalam penelitian, kemudian disebut sebagai data primer sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. yang dikelompokkan menjadi 8 basis data sesuai dengan kepentingannya, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Kelompok Basis Data

No.	Kelompok	Deskripsi Kelompok
1.	Basis Data Pelayanan	Meliputi aplikasi kependudukan, perijinan, investasi, retribusi dan perpajakan, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, aplikasi kesehatan, pendidikan, jaringan pengaman sosial, perdagangan, ketenagakerjaan, industri, angkutan.
2.	Basis Data Administrasi dan Manajemen	Meliputi aplikasi surat elektronik, sistem arsip dokumen elektronik, manajemen pelaporan pemerintahan, koordinasi, pengelolaan terminal dan parkir
3.	Basis Data Legislasi	Meliputi aplikasi sistem dokumentasi dan informasi hukum, peraturan perundang-undangan

Tabel 4.3 Kelompok Basis Data (Lanjutan)

4.	Basis Data Pembangunan Daerah	Meliputi aplikasi perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan pengendalian pembangunan daerah
5.	Basis Data Keuangan	Meliputi aplikasi keuangan, kas, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi daerah
6.	Basis Data Kepegawaian	Meliputi aplikasi kepegawaian, penggajian pegawai, penilaian kinerja pegawai, pendidikan dan pelatihan
7.	Basis Data Pemerintahan	Meliputi aplikasi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah
8.	Basis Data Kewilayahan	Meliputi aplikasi tata ruang dan lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan perkebunan, potensi daerah, pariwisata, usaha kecil menengah, industri kecil menengah, pertambangan dan energi, jalan dan jembatan, tata ruang, sumber daya air, permukiman, pertanian

Semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pemilik data akan dilibatkan dalam penyusunan struktur sumber data untuk pemetaan data primer yang dimiliki dan dibutuhkan oleh OPD lain, serta normalisasi, potensi pertukaran atau kebersamaan pakai data untuk menciptakan interoperabilitas data. Pada tahapan ini akan fokus pada penyusunan struktur data sumber yang kemudian akan dikembangkan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kebutuhan, mengingat kompleksitas data yang dimiliki dan juga kompleksitas informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok fungsi tiap OPD.

4.3. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Agenda kegiatan penelitian disesuaikan dengan alur penelitian Merujuk pada Gambar 3.4. Penelitian diawali dengan menentukan tujuan, masalah yang akan diselesaikan dan *literature review* terhadap obyek penelitian yang merupakan tahap

pra penelitian untuk memastikan apakah sudah cukup untuk membuat konsep penelitian. Pada tahap berikutnya dilakukan pemetaan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, untuk diinventarisir pada tabel RACI.

Penyusunan rancangan form survei yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan persetujuan rancangan form survei kepada pejabat penanggungjawab di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo. Setelah mendapatkan persetujuan, form survei dikirimkan kepada seluruh partisipan sebanyak 42 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh penanggung jawab data dan atau pimpinan tiap OPD. OPD diberi kesempatan sekitar sepuluh hari untuk melakukan pengisian dan pengiriman form survei. *In depth interview* dilakukan untuk klarifikasi dan pendalaman dari informasi yang dihasilkan dari form survei, dengan mendatangi OPD untuk wawancara langsung dengan pimpinan dan atau penanggung jawab data tiap OPD.

Untuk hasil survei yang berupa data primer direkap dalam tabel RACI, sedangkan hasil survei yang berupa sistem informasi dipetakan berdasarkan kontribusi terhadap organisasi dengan menggunakan Mc. Farlan Grid, dengan terlebih dahulu dilakukan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo dan juga Road Map Smart City Kabupaten Purworejo.

Pengujian terhadap data primer yang dihasilkan dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan FGD
2. Pelaksanaan *in depth interview* untuk klarifikasi
3. Pemenuhan realisasi interoperabilitas data dan sistem informasi

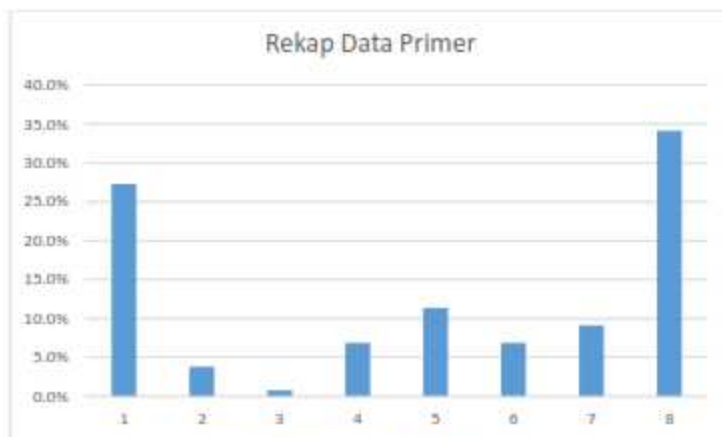
Dalam penyusunan rekomendasi, pemetaan data hasil pengolahan pada tabel RACI dan pemetaan sistem informasi pada Mc. Farlan Grid dipadukan untuk menghasilkan pemetaan data dan sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi, dan dalam penyusunan rekomendasi akan dilakukan kajian beberapa kebijakan dan implementasi teknologi yang sudah diterapkan. Pada tahapan terakhir adalah penyusunan laporan berupa kesimpulan dan rekomendasi, untuk kemudian hasil rekomendasi akan dilakukan uji akurasi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Roadmap Smartcity dengan teknik *in-depth interview* dengan *stakeholder* terkait dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo

Diagram RACI dari framework COBIT 4.1 untuk memetakan data primer, sedangkan analisis PEST dan Mc Farlan dari framework Ward and Peppard untuk memetakan sistem informasi dan keterkaitan dengan data primer. FGD dilakukan dengan tiga unsur yaitu pimpinan atau penanggung jawab OPD yang merupakan pengambil kebijakan pada OPD, pengelola data atau TI tiap OPD yang merupakan unsur pelaksana teknis pada OPD, dan leading sector pengelola IT yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo. Dari hasil FGD terhadap tiga unsur tersebut, dilakukan triangulasi dengan menyandingkan hasil FGD dari tiga

unsur untuk didapatkan satu hasil, sehingga dengan triangulasi diharapkan mendapatkan data yang lebih valid karena dengan mempertimbangkan masukan lebih dari satu pihak. Selain melalui proses FGD, akan dilakukan wawancara untuk memperdalam penggalian informasi. Dokumen yang berupa produk hukum juga menjadi sumber data yang dapat dijadikan bahan konfirmasi dalam proses triangulasi.

4.4. Hasil Anallsa Data

Berdasarkan hasil rekapitulasi data primer dan OPD penanggungjawab data melalui tabel RACI, yang terdiri dari data-data yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD dan saling dipertukarkan antar OPD, didapatkan 134 data yang menjadi kewenangan 35 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. yang terdiri dari 126 data primer atau basis data dan 8 data *summary*. Pengelompokan data berdasarkan pada 8 kelompok pada sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Purworejo nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dengan hasil seperti pada Gambar 4.1.



Keterangan :

1. Pelayanan, 2. Administrasi dan Manajemen, 3. Legislasi, 4. Pembangunan Daerah, 5. Keuangan, 6. Kepegawaian, 7. Pemerintahan, 8. Kewilayahan

Gambar 4. 1 Rekap Data Primer per Kelompok

Dari pengelompokan data primer pada table RACI, terdapat 8 kelompok data yang harus menjadi prioritas utama dan harus menjadi perhatian dalam pengembangan integrasi data disesuaikan dengan urutan prosentase dari yang paling tinggi. Pada urutan pertama sebesar 35,1 % atau 45 data primer masuk dalam kelompok kewilayahan, 27,3% atau 36 data primer masuk dalam kelompok pelayanan, 11,4% atau 15 data primer masuk dalam kelompok keuangan, 9,1% atau 12 data primer masuk dalam kelompok keuangan, 6,8% atau 9 data primer masuk dalam kelompok pembangunan daerah dan kepegawaian, 3,8% atau 5 data primer masuk dalam kelompok administrasi dan manajemen dan yang terakhir 0,8% atau 1 data primer masuk dalam kelompok legislasi. Data primer dalam tabel RACI dihasilkan melalui proses penggalian dan identifikasi database pada aplikasi

(struktur tabel master pada database aplikasi) yang ada pada OPD, sedangkan OPD yang belum mempunyai aplikasi, atribut data diperoleh melalui proses wawancara atau *in dept interview*, menyesuaikan pada tugas pokok fungsi OPD berdasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja masing-masing OPD.

Berikut merupakan data primer dan data *summary* yang dihasilkan. Data tersebut dikelola dan menjadi *output* dari OPD yang kemudian dibagi dan digunakan oleh OPD lain untuk mendukung ketugasannya.

4.4.1 Data Primer

Data primer dan pengelompokannya merupakan hasil inventarisasi dari seluruh OPD dan diharapkan menjadi sumber rujukan data yang beredar di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. OPD pemilik merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap akurasi, validitas, dan kebenaran data yang beredar di seluruh OPD tersebut. Kelompok merupakan rumpun data primer yang dihasilkan masuk dalam kelompok apa saja yang tercantum pada Peraturan Bupati Purworejo nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.4 Daftar Data Primer

No	Data Primer	OPD Pemilik	Kelompok
1	Data Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Basis Data Pemerintahan
2	Data Kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	Basis Data Pemerintahan
3	Data Pemeriksaan	Inspektorat Daerah Kab. Purworejo	Basis Data Pemerintahan
4	Data Sekolah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Basis Data Kewilayahan

Tabel 4.4 Daftar Data Primer (Lanjutan)

5	Data Guru Non PNS	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Basis Data Kepegawaian
6	Data Peserta Didik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Basis Data Kewilayahan
7	Data Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Basis Data Pelayanan
8	Data Penyakit	Dinas Kesehatan	Basis Data Pelayanan
9	Data Perijinan Medis	Dinas Kesehatan	Basis Data Pelayanan
10	Data Jamkesda	Dinas Kesehatan	Basis Data Pelayanan
11	Data Layanan Prskesmas	Dinas Kesehatan	Basis Data Pelayanan
12	Data Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Basis Data Kewilayahan
13	Data Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Basis Data Kewilayahan
14	Data Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Basis Data Kewilayahan
15	Data Bendungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Basis Data Kewilayahan
16	Data Bangunan Gedung Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Basis Data Kewilayahan
17	Data Drainase Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Basis Data Kewilayahan
18	Data Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Basis Data Kewilayahan
19	Data Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Basis Data Kewilayahan
20	Data Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Basis Data Kewilayahan
21	Data Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Basis Data Kewilayahan
22	Data Air Minum, Air Bersih, Air Limbah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Basis Data Kewilayahan
23	Data Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Basis Data Kewilayahan
24	Data Penduduk Penerima Bantuan Sosial	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Basis Data Kewilayahan
25	Data Kesejahteraan Penduduk	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Basis Data Kewilayahan
26	Data Peserta KB	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Basis Data Kewilayahan
27	Data Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Basis Data Kewilayahan

Tabel 4.4 Daftar Data Primer (Lanjutan)

28	Data Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Basis Data Kewilayahan
29	Data Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Basis Data Kewilayahan
30	Data Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Basis Data Kewilayahan
31	Data Perikanan dan Kelautan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Basis Data Kewilayahan
32	Data Kelompok Pertanian, Peternakan, Perikanan, Nelayan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Basis Data Kewilayahan
33	Data Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Basis Data Kewilayahan
34	Data Pengelolaan Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup	Basis Data Kewilayahan
35	Data Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman	Dinas Lingkungan Hidup	Basis Data Kewilayahan
36	Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Basis Data Pelayanan
37	Data Mutasi Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Basis Data Pelayanan
38	Data Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Basis Data Pelayanan
39	Data Profil Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Basis Data Kewilayahan
40	Data Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Basis Data Keuangan
41	Data Pencairan Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Basis Data Keuangan
42	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dinas Perhubungan	Basis Data Pelayanan
43	Data Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Basis Data Pelayanan
44	Data Pemantauan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Basis Data Kewilayahan
45	Data Perijinan Trayek	Dinas Perhubungan	Basis Data Pelayanan
46	Data Sarana Prasarana Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Basis Data Kewilayahan
47	Data Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan	Basis Data Kewilayahan
48	Data Pengelolaan Terminal	Dinas Perhubungan	Basis Data Administrasi dan Manajemen
49	Data Pengelolaan Parkir	Dinas Perhubungan	Basis Data Administrasi dan Manajemen
50	Data Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Basis Data Pemerintahan
51	Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Basis Data Pemerintahan
52	Data Surat Masuk dan Surat Keluar	Dinas Komunikasi dan Informatika	Basis Data Administrasi dan Manajemen
53	Data Aduan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Basis Data Pelayanan

Tabel 4.4 Daftar Data Primer (Lanjutan)

54	Data Pengelolaan Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Basis Data Pelayanan
55	Data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Basis Data Kewilayahan
56	Data Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Basis Data Pelayanan
57	Data Kelompok Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Basis Data Kewilayahan
58	Data Pengelolaan Perijinan Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Basis Data Pelayanan
59	Data Kelompok Sadar Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Basis Data Pelayanan
60	Data Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Basis Data Administrasi dan Manajemen
61	Data Pengelolaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Basis Data Pelayanan
62	Data Usaha Kecil Menengah (UKM)	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	Basis Data Kewilayahan
63	Data Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	Basis Data Pembangunan Daerah
64	Data Pengelolaan Pasar	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	Basis Data Pembangunan Daerah
65	Data Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	Basis Data Pembangunan Daerah
66	Data Kemitrologian	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	Basis Data Pelayanan
67	Data Perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Basis Data Pelayanan
68	Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Basis Data Pelayanan
69	Data Tarif Perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Basis Data Pelayanan
70	Data Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Basis Data Pelayanan
71	Data Pelatihan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Basis Data Pelayanan
72	Data Industri Kecil Menengah (IKM)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Basis Data Kewilayahan
73	Data Pengelolaan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Basis Data Administrasi dan Manajemen
74	Data Pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Basis Data Kewilayahan
75	Data Pelanggaran Perijinan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Basis Data Kewilayahan
76	Data Satuan Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Basis Data Kewilayahan
77	Data Pemetaan dan Titik Rawan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Basis Data Kewilayahan
78	Data Rencana Kerja Tahunan RKPD dan Renja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Basis Data Pemerintahan

Tabel 4.4 Daftar Data Primer (Lanjutan)

79	Data Rencana Kerja Lima Tahunan RPJMD dan Renstra	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Basis Data Pembangunan Daerah
80	Data Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	Basis Data Kepegawaian
81	Data Keluarga Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	Basis Data Kepegawaian
82	Data Sasaran Kinerja Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	Basis Data Kepegawaian
83	Data Pensiunan	Badan Kepegawaian Daerah	Basis Data Kepegawaian
84	Data Pengelolaan Diklat Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	Basis Data Kepegawaian
85	Data Guru	Badan Kepegawaian Daerah	Basis Data Kepegawaian
86	Data Aset Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
87	Data Pengendalian Dan Pencampatan BMD	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
88	Data Keuangan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
89	Data Anggaran Perencanaan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
90	Data Anggaran Realisasi	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
91	Data Anggaran Pembiayaan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
92	Data Pelaksanaan Anggaran	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
93	Data Realisasi Fisik Kegiatan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
94	Data Gaji Pegawai	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
95	Data Pengelolaan Retribusi	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Pelayanan
96	Data Potensi Retribusi	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
97	Data PBB	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Pelayanan
98	Data Pembayaran PBB	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
99	Data Peta Blok PBB	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Kewilayahan
100	Data Wajib Pajak	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Pelayanan
101	Data BPHTB	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Pelayanan
102	Data SSH dan ASB	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
103	Data PAD	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Basis Data Keuangan
104	Data Lokasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Basis Data Kewilayahan
105	Data Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Basis Data Kewilayahan

Tabel 4.4 Daftar Data Primer (Lanjutan)

106	Data Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Basis Data Pemerintahan
107	Data Ormas	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Basis Data Kewilayahan
108	Data Partai Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Basis Data Kewilayahan
109	Data Layanan Rumah Sakit	RSUD Tjitrowardojo	Basis Data Pelayanan
110	Data Farmasi	RSUD Tjitrowardojo	Basis Data Pelayanan
111	Data SAKIP (Kinerja Istanis Pemerintah)	Bagian Organisasi dan Aparatur	Basis Data Pemerintahan
112	Data Organisasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi dan Aparatur	Basis Data Pemerintahan
113	Data Anjab	Bagian Organisasi dan Aparatur	Basis Data Pemerintahan
114	Data Produk Hukum	Bagian Hukum	Basis Data Legislasi
115	Data Kegiatan Kepala Daerah	Bagian Humas dan Protokol	Basis Data Pemerintahan
116	Data Pers	Bagian Humas dan Protokol	Basis Data Pelayanan
117	Data RUP (Rencana Umum Pengadaan)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Basis Data Pembangunan Daerah
118	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Basis Data Pembangunan Daerah
119	Data BUMD	Bagian Perekonomian	Basis Data Pembangunan Daerah
120	Data Kredit Program	Bagian Perekonomian	Basis Data Pembangunan Daerah
121	Data Monitoring Pembangunan Daerah	Bagian Pembangunan	Basis Data Pembangunan Daerah
122	Data Tempat Ibadah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Basis Data Kewilayahan
123	Data Kegiatan Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Basis Data Kewilayahan
124	Data Monografi Wilayah	Bagian Pemerintahan	Basis Data Pemerintahan

4.4.2 Data Summary

Data summary merupakan bentuk olahan data yang disajikan secara berseri dari data utama seperti yang disajikan pada Tabel 4.5. Data summary biasanya dibutuhkan oleh instansi yang membutuhkan informasi tentang pertumbuhan data, jumlah, rata-rata, maupun informasi lainnya yang secara langsung tidak berhubungan detail masing-masing data.

Tabel 4.5 Daftar Data Summary

No	Data Summary	OPD Pemilik	Kelompok
1	Data Summary Kependudukan Per Kategori Umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Basis Data Pelayanan
2	Data Summary Kependudukan Per Tingkat Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Basis Data Pelayanan
3	Data Summary Kependudukan Per Jenis Kelamin	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Basis Data Pelayanan
4	Data Summary Kependudukan Per Agama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Basis Data Pelayanan
5	Data Summary Tenaga Kerja Per Tingkat Pendidikan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Basis Data Pelayanan
6	Data Summary Tenaga Kerja Per Jenis Kelamin	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Basis Data Pelayanan
7	Data Summary Kepegawaian Per Jabatan	Badan Kepegawaian Daerah	Basis Data Kepegawaian
8	Data Summary Kepegawaian Per Organisasi Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Basis Data Kepegawaian

4.5. Pemetaan Kewenangan Data Antar OPD

Pada pembahasan pada sub bab ini akan disajikan sebuah tabel RACI mengenai pemetaan kewenangan data hasil inventaris melalui survei, FGD dan *in depth interview* atau wawancara di seluruh OPD, yang meliputi pemetaan data primer dan data summary yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Pemetaan mengacu pada daftar data primer, data summary beserta OPD yang menghasilkan data primer dan data summary dengan berdasarkan pada : informasi data diperlukan oleh OPD mana saja (*Informed*) dengan diberi tanda huruf "I", OPD mana yang bertanggung jawab atas akuntabilitas data (*Accountable*) dengan diberi tanda huruf "A", OPD mana yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan data (*Responsible*) dengan diberi tanda huruf "R", OPD mana yang perlu diminta pertimbangan terhadap data tersebut (*Consulted*) dengan diberi tanda huruf "C". Adapun detail pemetaan ketugasan maupun wewenang data primer seperti disajikan pada Tabel 4.6 (Lampiran B).

4.6. Analisis Interoperabilitas

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Berbeda pengertian dengan sharing data atau file yang lebih pada pertukaran atau penggunaan data secara bersama sama baik secara langsung maupun menggunakan sistem informasi, dalam satu komputer atau melalui jaringan komputer. Untuk membuat pemetaan interoperabilitas sistem informasi atau data, terlebih dahulu dilakukan analisis interoperabilitas berdasarkan data primer. Setelah dilakukan rekapitulasi data, dilakukan analisis data primer secara vertikal dan horisontal, dengan hasil sebagai berikut :

4.6.1 Analisis Vertikal

Berdasarkan analisis data primer (analisis vertikal) dalam penelitian ini, dihasilkan 14 data primer yang informasinya (I) paling dibutuhkan oleh OPD lain (memiliki prosentase di atas 50%,) yaitu : Data Pemeriksaan (97,1%), Data Sasaran Kinerja Pegawai (97,1%), Data Pengelolaan Diklat Pegawai (97,1 %), Data Organisasi Perangkat Daerah (97,1 %), Data Aduan Masyarakat (97,1%), Data Produk Hukum (97,1 %), Data Kegiatan DPRD (97,1 %), Data Rencana Kerja Tahunan RKPD (97,1 %), Data RPJMD (97,1 %), Data SSH dan ASB (97,1%), Data Summary Kepegawaian Per OPD (97,1%), Data Arsip (94,3%), Data Pegawai (94,3%), Data Kependudukan (62,9%). Adapun analisis selengkapnya seperti disajikan pada Tabel 4.7 (Lampiran C). Pada analisis ini juga menyandingkan daftar aplikasi asal dari data primer, adapun gambaran aplikasi-aplikasi maupun data yang

dibutuhkan oleh semua OPD seperti pada Gambar 4.2, dimana ada 2 OPD yang belum mempunyai aplikasi tetapi datanya dibutuhkan oleh semua OPD yaitu Inspektorat dan Sekretariat DPRD.



Gambar 4.2 Aplikasi dan Data yang dibutuhkan semua OPD

4.6.2 Analisis Horizontal

Berdasarkan Analisis OPD (analisis horizontal) dengan berdasarkan *Responsible* pada fungsi RACI pada penelitian ini menghasilkan OPD yang paling berpengaruh terhadap ketersediaan data primer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Adapun OPD tersebut antara lain : Kecamatan (terhadap 92 data primer), Dinas PUPR (terhadap 38 data primer), Dinas Kesehatan (terhadap 36 data primer), Dinas KUKMP (terhadap 36 data primer), (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (terhadap 36 data primer). Untuk informasi lebih lengkap disajikan pada Tabel 4.8 (Lampiran C).

4.6.3 Analisis Interoperabilitas Data dan Sistem Informasi

Dengan berdasarkan analisis Tabel RACI yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, dilakukan analisis interoperabilitas data dan sistem informasi untuk mengetahui kebutuhan data lintas OPD, yang akan berimplikasi pada data tersebut untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Pada analisis ini selain daftar primer, juga dengan menyandingkan

daftar sistem informasi asal dari data primer. Dengan berdasarkan hasil dari analisis pada Tabel RACI, untuk OPD yang merupakan penanggung jawab data dan sistem informasi diberi tanda warna kuning (hasil analisis bagian dengan tanda "A"), untuk bagian bertanda "I" data primer yang berasal dari sistem informasi diberi tanda warna hijau yang diartikan interoperabilitas terkait sistem informasi, sedangkan data primer yang bukan berasal dari sistem informasi diberi tanda warna merah yang diartikan bahwa interoperabilitas terkait data, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.9 (Lampiran C).

4.7. Analisis Perbandingan Data Primer

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis perbandingan data primer hasil penelitian ini dengan data primer pada Kota Magelang hasil penelitian Nanang Ruswianto tahun 2018 yang menjadi salah satu referensi penulis, untuk melihat apakah data primer bisa diperbandingkan dengan data primer pada daerah lain dari segi kuantitas dan kualitas. Analisis dilakukan dengan membuat tabulasi perbandingan data primer di Kabupaten Purworejo dan data primer di Kota Magelang berdasarkan nama OPD dan penyelenggaraan urusan bidang tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan nama OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang seperti ditunjukkan pada Tabel 4.10 (Lampiran D).

Analisis menggunakan tabulasi dengan menyandingkan daftar nama dan penyelenggaraan urusan tiap OPD pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan OPD pada Pemerintah Kota Magelang, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.10 (Lampiran D), dengan mengacu pada OPD pada Kabupaten Purworejo dihasilkan bahwa antara OPD pada Pemerintah Kabupaten dan OPD pada Pemerintah Kota Magelang terdapat perbedaan penyelenggaraan urusan dari rumpun OPD sama sebanyak 8 OPD, yaitu : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ada 2 OPD pada Kabupaten Purworejo yang tidak ada pada Kota Magelang karena penyelenggaraan urusannya melekat pada OPD lain, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang penyelenggaraan urusannya melekat pada Satpol PP dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang penyelenggaraan urusannya melekat pada Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang.

Berdasarkan penyelenggaraan urusan oleh masing-masing OPD ada beberapa kelompok urusan dalam satu OPD yang berbeda antara OPD pada Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang, sebagai contoh urusan bidang Pendidikan, bidang kepemudaan, bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Pada Kabupaten Purworejo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan

olahraga, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Sedangkan pada Kota Magelang urusan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan urusan bidang Kepemudaan dan Olah raga dan bidang Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan tentunya akan berpengaruh pada data primer yang menjadi kewenangan tiap OPD. Sehingga hasil dari analisis perbandingan berdasarkan nama OPD dan penyelenggaraan urusan tiap OPD akan berpengaruh pada analisis selanjutnya yaitu terkait dengan wewenang atau tanggung jawab data primer tiap OPD.

Setelah analisis berdasarkan penyelenggaraan urusan, dilakukan analisis perbandingan data primer terhadap OPD yang ada baik pada Pemerintah Kabupaten Purworejo maupun di Pemerintah Kota Magelang. Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.11 (Lampiran D), menggunakan tabulasi dengan menyandingkan daftar nama OPD dan data primer tiap OPD pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kota Magelang dengan mengacu pada OPD Pemerintah Kabupaten Purworejo didapatkan hasil, dari 35 OPD pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan 36 OPD pada Pemerintah Kota Magelang, ada 23 OPD yang sama-sama ada data primer pada dua daerah obyek perbandingan. Dari 23 OPD tersebut ada sebanyak 109 data primer pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan 89 data primer pada Pemerintah Kota Magelang, ada 3 OPD yang mempunyai kesamaan data primer baik dari jumlah maupun jenis data primer yang ada, yaitu : Dinas Kesehatan (data layanan kesehatan, data penyakit, data perijinan medis, data jamkesda, data layanan puskesmas), Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah (data

arsip, data pengelolaan perpustakaan), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (data renja, data RPJMD, data renstra).

Dari hasil analisis data primer dengan tabulasi berdasarkan nama OPD dan penyelenggaraan urusan tiap OPD dapat disimpulkan bahwa data primer dapat diperbandingkan terkait dengan kuantitas yaitu lebih banyak data primer pada Pemerintah Kabupaten Purworejo (109 data primer) dibandingkan data primer pada Kota Magelang (89 data primer), ada 3 OPD yang mempunyai kesamaan data primer baik jumlah maupun jenis data primer yaitu : Dinas Kesehatan (5 data primer), Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah (2 data primer), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (3 data primer). Dari hasil analisis perbandingan ini dapat disimpulkan juga bahwa nama, jumlah dan jenis data primer tergantung pada OPD dan penyelenggaraan urusan masing-masing OPD, dimana jumlah OPD dan penyelenggaraan urusan tiap OPD pada pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama.

4.8. Pengujian Interoperabilitas

Dengan berdasarkan pada Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2020, pengujian interoperabilitas dalam bentuk : uji beban (*load testing*) beserta uji kesesuaian rekomendasi standar untuk pengiriman data, direktori jaringan, transfer berkas, surat elektronik dan penyamaan waktu. Pada penelitian ini pengujian interoperabilitas dibatasi pada uji beban (*load testing*) untuk menguji *performance* sistem informasi yang berfungsi sebagai *provider* data dalam proses interoperabilitas, dan berdasarkan wawancara bersama Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Purworejo perlu dilakukan pengujian fungsi interoperabilitas untuk membuktikan bahwa tujuan dari interoperabilitas dapat tercapai.

4.8.1. Pengujian Beban (*Load Testing*)

Pada penelitian ini dilakukan uji beban (*load testing*) terhadap sampel sistem informasi yang berfungsi sebagai *provider* data dan aplikasi *web service* dalam proses interoperabilitas, yaitu Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sebagai *provider* data kependudukan dan Aplikasi Dashboard Web Service sebagai layanan *web service* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengujian request POST beserta Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagai provider data pegawai dan Aplikasi Government Service Bus sebagai layanan *web service* pada Badan Kepegawaian Daerah.

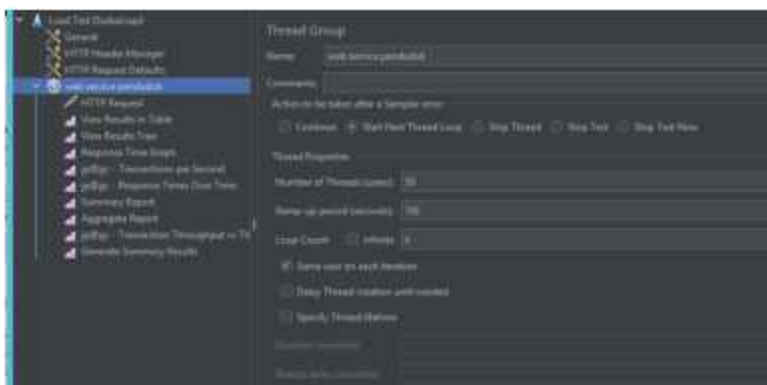
Pengujian dilakukan pada Aplikasi SIK dan Aplikasi Dashboard Web Service dengan terlebih dahulu meminta kepada admin Aplikasi SIK berupa konfigurasi untuk koneksi integrasi ke aplikasi Dashboard Web Service. Adapun konfigurasi yang diperlukan untuk koneksi yaitu: *ip address server*, *port*, alamat *path* untuk *request* data, dan parameter apa saja yang menjadi *request* terhadap *database* pada *provider* data kependudukan. Selaras dengan referensi pada daftar pustaka pada penelitian ini menggunakan tools Aplikasi Apache Jmeter untuk mengukur performance sistem informasi melalui uji beban (*load test*). Adapun langkah-langkah dalam uji beban dilakukan dengan tahapan sebagaimana penjelasan berikut. Terlebih dahulu dilakukan setting konfigurasi koneksi pada

aplikasi Apache Jmeter yang diberikan oleh admin Aplikasi SIAK yaitu : *ip address server, port*, alamat *path* untuk *request* data, dan parameter apa saja yang menjadi *request* terhadap *database*, salah satu contoh setting konfigurasi seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Setting konfigurasi pada Aplikasi Apache Jmeter

Setelah setting konfigurasi koneksi pada Aplikasi Apache Jmeter, dilakukan pengujian performance dengan memanfaatkan tools yang ada pada Aplikasi Apache JMeter, dimana hasil pengujian yang akan ditampilkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, pada pengujian ini hasil yang ditampilkan yaitu : *view results in table, response time graph, transactios per second, summary report, transaction throughput vs thread* dengan hasil sebagai berikut :



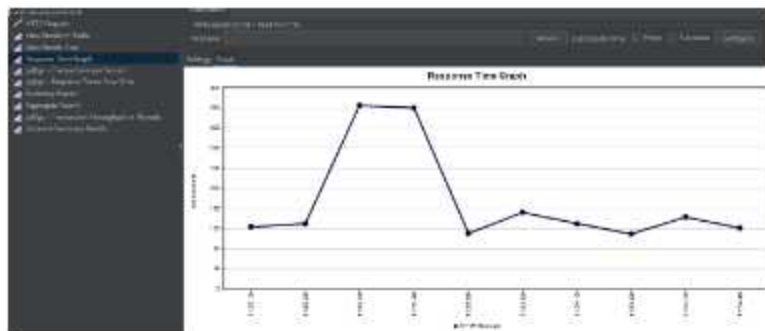
Gambar 4.4 Setting beban uji

Dengan terlebih dahulu melakukan setting beban uji pada form *thread group*, untuk *number of thread (users)* : 50, *ramp-up period (seconds)* : 100, *loop count* : 6 seperti pada Gambar 4.4

Sample No.	Sample Time	Thread Name	User	Status	Error Message	Error Code	Error	Sample Size	Latency	Comment
1	1.1424.27	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
2	1.1424.32	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
3	1.1424.37	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
4	1.1424.42	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
5	1.1424.47	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
6	1.1424.52	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
7	1.1424.57	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
8	1.1425.02	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
9	1.1425.07	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
10	1.1425.12	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
11	1.1425.17	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
12	1.1425.22	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
13	1.1425.27	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
14	1.1425.32	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
15	1.1425.37	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
16	1.1425.42	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
17	1.1425.47	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
18	1.1425.52	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
19	1.1425.57	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
20	1.1426.02	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
21	1.1426.07	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
22	1.1426.12	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
23	1.1426.17	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
24	1.1426.22	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
25	1.1426.27	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
26	1.1426.32	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
27	1.1426.37	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
28	1.1426.42	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
29	1.1426.47	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	
30	1.1426.52	web-service-pendukung	1111 Thread	Success				50	17	

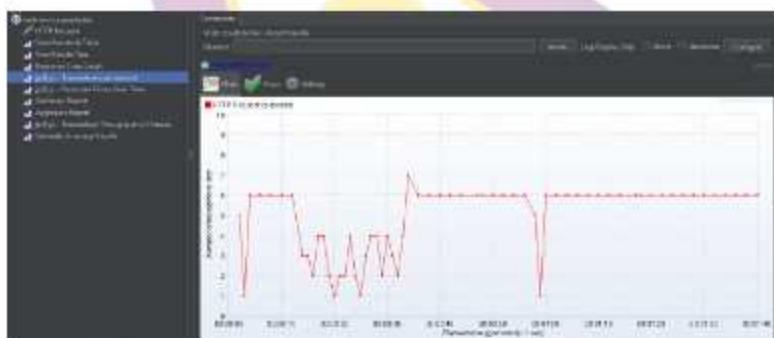
Gambar 4.5 Hasil tampilan *view in table*

Dengan berdasar pada setting jumlah *users*: 50 dan *loop count*: 6, setelah dilakukan pengujian maka akan ditampilkan sampel pengujian berulang sebanyak 300 pengujian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.5



Gambar 4.6 Tampilan *response time graph*

Sedangkan tampilan secara grafik untuk pengujian sebanyak 300 sampel uji ditunjukkan pada gambar 4.6



Gambar 4.7 Tampilan *Transactions per Seconds*

Informasi grafik untuk transaksi per detik ditunjukkan pada Gambar 4.7, dimana informasi vertikal menunjukkan jumlah transaksi per detik, dan informasi horisontal menunjukkan informasi waktu saat pengujian.



Gambar 4.8 Tampilan *Transaction Throughput vs Threads*

Pada Gambar 4.8 ditampilkan grafik terkait jumlah perkiraan transaksi per detik (vertikal) dan jumlah beban yang aktif (horizontal). Untuk rekapitulasi hasil uji untuk pengujian sebanyak 300 sampel uji beban seperti ditunjukkan pada Gambar 4.9 dimana didapatkan hasil *average* : 175, Min : 78, Max : 1302, Standard deviaton : 172.2, error : 0 %, throughput : 3.0/sec, received kb/sec : 2.43, sent kb/sec : 0.85, Average bytes : 818.2

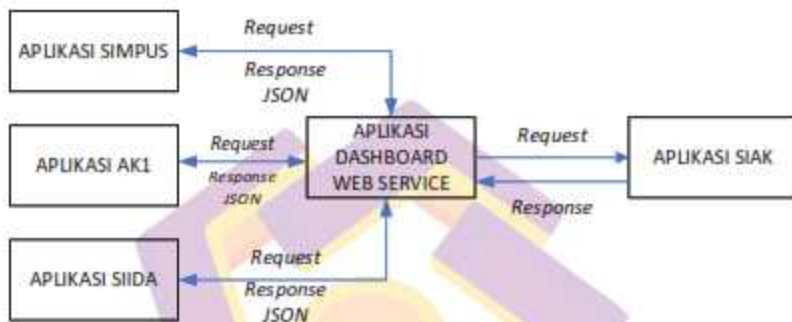
Name	Throughput	Min	Max	Avg	Std Dev	Error	Connected	Received Bytes	Sent Bytes	Avg Bytes
HTTP Request	3.0	1	3	1.9	172.2	0.0%	11	243	85	818.2
HTTP Response	3.0	1	3	1.9	172.2	0.0%	11	243	85	818.2

Gambar 4.9 Tampilan *Summary Report*

4.8.2. Pengujian Fungsi

Pengujian fungsi interoperabilitas dalam penelitian ini menggunakan 5 sistem informasi yaitu Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sebagai *provider* data kependudukan dan Aplikasi Dashboard Web Service sebagai layanan *web service* yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, dan 3 aplikasi *client* yaitu aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) pada Dinas Kesehatan, Aplikasi AK1 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Aplikasi SIIDA pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan skema uji interoperabilitas seperti pada Gambar 4.10



Gambar 4.10 Skema Uji Interoperabilitas

Ujicoba integrasi Aplikasi SIMPUS, Aplikasi AK1 dan Aplikasi SIIDA dengan Aplikasi SIAK terkait dengan data kependudukan yang ada pada Aplikasi SIAK. Aplikasi SIMPUS mengambil data kependudukan untuk input data pasien, aplikasi AK1 mengambil data kependudukan untuk data pencari kerja untuk warga dengan kartu tanda penduduk asal Kabupaten Purworejo dan Aplikasi SIIDA mengambil data kependudukan untuk data pemohon perijinan. Untuk membuktikan tujuan interoperabilitas sistem informasi dapat tercapai, pengujian dilakukan dari aplikasi yang mempunyai perbedaan *platform database* dengan Aplikasi SIAK sebagai *web service*. Adapun gambaran spesifikasi dari masing-masing aplikasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Spesifikasi Aplikasi Uji Interoperabilitas

OPD	Aplikasi	Spesifikasi	Layanan Data	Keterangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	- Pemrograman : PHP - Database : Oracle	Data Kependudukan	<i>Provider</i>
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi Dashboard Web Service	- Pemrograman : PHP - Database : Oracle	Layanan Web Service	<i>Web Service</i>
Dinas Kesehatan	Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	- Pemrograman : ASP - Database : MySQL	Data Pasien pada Puskesmas	<i>Client</i>
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Aplikasi AKI	- Pemrograman : PHP - Database : MySQL	Data Pencari Kerja	<i>Client</i>
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi SIIDA	- Pemrograman : PHP - Database : MySQL	Data Layanan Perijinan	<i>Client</i>

Pengujian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan setting *client* yang akan dilakukan integrasi pada Aplikasi Dashboard Web Service pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aplikasi Dashboard Web Service merupakan aplikasi yang difungsikan untuk manajemen *client* yang melakukan integrasi sistem informasi dengan mengambil data kependudukan pada Aplikasi SIAK. Pada Aplikasi Dashboard Web Service dilakukan setting data akun *user* yang meliputi : *username* dan *password*, setting metode yang meliputi : IP *Web Service Client*, jenis *key* yang digunakan untuk pemanggilan dari *client*, jenis data apa saja yang dilayani, juga dilakukan setting data instansi yang meliputi : ip address *client*, deskripsi instansi *client*, personal kontak *client*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Setting *Client Web Service*

Sebelum dilakukan pengujian data dari *client*, terlebih dahulu dilakukan pengecekan sampel data kependudukan yang ada pada Aplikasi SIAK untuk memastikan sampel uji data benar ada pada *database* Aplikasi SIAK. Pengecekan sampel data dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah berbasis e-KTP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Sampel Kartu Tanda Penduduk yang Berbasis e-KTP

Pengujian dilakukan dengan memasukkan NIK maka aplikasi SIAK akan menampilkan data kependudukan yang meliputi : nomor KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, foto, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.13 Dengan hasil pengecekan data, tampil data kependudukan sesuai yang ada pada KTP

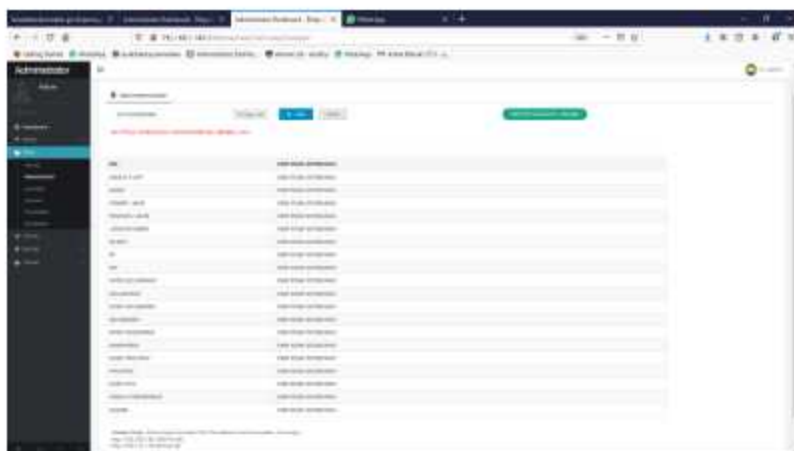
elektronik yang dimiliki oleh pemilik NIK yang digunakan pengecekan sampel data.

The screenshot shows a web application interface titled "DATA/CEK DATA WNI". It contains several input fields and dropdown menus for personal information. Below the form is a table with columns for ID, Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Photo, and Operasi. The table contains one row of data with some fields redacted with blue bars.

ID	NOMOR KK	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PHOTO	OPERASI
1	[Redacted]	[Redacted]	TUBAN SURABAYA	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Gambar 4.13 Pengecekan Data Kependudukan pada Aplikasi SIAP

Setelah dilakukan setting *client* pada Aplikasi Dashboard Web Service, admin aplikasi SIAP memberikan data koneksi ke admin aplikasi *client* yang meliputi : alamat url server aplikasi SIAP, *username* dan *password*, yang kemudian admin memasukkan data konfigurasi koneksi pada script aplikasi *client*, dalam uji ini bersama admin aplikasi SIMPUS seting koneksi dengan alamat url : `HTTP://103.xxx.xxx.xx:90/DUKCAPIL/GET_JSON/DKK/CALL`, *username* : AGUS, *password* : xxxxx (disembunyikan), seperti ditunjukkan pada Gambar 4.14 Setting konfigurasi koneksi dilakukan oleh masing-masing admin *client* mengingat yang karakteristik masing-masing aplikasi adalah admin *client*.



Gambar 4.17 Uji Data Kependudukan Tidak Ditemukan

4.9. Kamus Data

Persyaratan Teknis Interoperabilitas Data yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara LID (Layanan Interoperabilitas Data) salah satunya yaitu : memiliki arsitektur dan dokumentasi Interoperabilitas Data yang sekurang-kurangnya berisi kode sumber, Meta data, kamus data, format data, kode akses, alamat akses dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses dan terjaga keterkiniannya sebagaimana yang tertuang pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Atribut. Dalam rangka mencukupi salah satu syarat tersebut pada penelitian ini dibuat sebuah rancangan kamus data yang dihasilkan dari data primer adalah hasil inventarisir struktur tabel master di setiap database aplikasi yang digunakan oleh OPD penanggungjawab. Berdasarkan wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, dalam penelitian ini akan disajikan kamus data dari database aplikasi yang

berfungsi sebagai pelayanan public dengan mengacu pada hasil inventarisasi sistem informasi OPD yang melaksanakan pelayanan publik, di antaranya : atribut data layanan puskesmas yang dihasilkan dari database aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS), atribut data layanan rumah sakit dihasilkan dari database aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS), atribut data layanan pencari kerja dihasilkan dari database aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kartu AKI (SIM AKI), atribut data kependudukan yang dihasilkan dari database aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), atribut data pelayanan retribusi yang dihasilkan dari database aplikasi e-Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo (SIREDO), atribut data pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dihasilkan dari database aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB), PPDB Online, seperti yang disajikan dalam Lampiran E.

Kamus data yang merupakan penjabaran metadata dari data primer dan data *summary* yang menjadi substansi pokok sebuah data primer perlu disajikan untuk lebih lanjut menjelaskan attribute dan tipe attribute yang akan diimplementasikan. Kamus data ini dapat dijadikan referensi dan panduan masing-masing OPD maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo dalam pengembangan sistem dan database pada waktu yang akan datang, menyesuaikan ketersediaan anggaran dan skala prioritas. Dari 132 data yang terdiri dari 124 data primer dan 8 data *summary*, pada sub bab ini akan disajikan 7 kamus data yang bersumber dari database aplikasi yang berfungsi pelayanan sebagaimana disajikan pada Lampiran E.

4.10. Analisis Sistem Informasi

Analisis sistem informasi terkait pelayanan publik yang ada di Kabupaten Purworejo, secara nyata didapati bahwa pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik belum berjalan optimal. Berdasarkan misi yang diamanatkan kepada Dinkominfo Kabupaten Purworejo tentang berorientasi untuk optimalisasi pelayanan publik, senada hasil wawancara dengan partisipan yaitu Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, maka perlu memperdalam analisis sistem informasi untuk pelayanan publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo menggunakan analisis PEST dan Mc. Farlan.

4.10.1 Analisis PEST (Politik, Economy, Social, Technology)

Analisis PEST merupakan salah satu bagian analisis perencanaan strategis sistem informasi pada model perencanaan Ward and Prepard. Selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Statistik Data dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo mengenai faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi yang berkaitan dengan penggunaan dan rencana pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik, dengan memperhatikan aspek ancaman atau peluang, inisiatif dan kebutuhan akan sistem informasi atau teknologi informasi, dalam penyusunan rekomendasi secara sederhana bisa dijawab dengan analisis PEST, pada analisis PEST dilakukan pemetaan sistem informasi layanan publik dengan hasil sebagaimana pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Analisis PEST

Faktor	Ancaman/Peluang	Inisiatif	Kebutuhan SI/TI
Politik	Kebijakan anggaran pelaksanaan pengembangan smart city	Mempertimbangkan perubahan kebijakan dan perubahan anggaran yang disesuaikan dengan PAD Kabupaten Purworejo	Aplikasi dashboard website terintegrasi pada command center (dalam pengembangan)
Ekonomi	Penurunan biaya pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian biaya perijinan, retribusi, pajak tertentu • Peningkatan publikasi manfaat menggunakan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi retribusi dan perijinan berbasis mobile (pengembangan dari aplikasi SIREDJIO untuk retribusi dan SIIDA untuk perijinan)
Sosial	Banyaknya masyarakat yang mampu menggunakan TI	Sosialisai kepada masyarakat tentang pemanfaatan TI	Optimalisasi Website Pemerintah Kabupaten Purworejo (www.purworejokab.go.id)
Teknologi	Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pemanfaatan tik kepada masyarakat melalui pelatihan kepada pemerintahan terkecil kelurahan atau desa • Optimalisasi penggunaan tik untuk administrasi pemerintahan terkecil kelurahan atau desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi website profil desa sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat desa • Aplikasi SISKEUDES untuk dukungan administrasi keuangan pemerintah desa

4.10.2. Analisis Mc Farlan

Analisis Mc Farlan merupakan salah satu bagian analisis perencanaan strategis sistem informasi pada model perencanaan Ward and Prepard. Berdasarkan hasil inventarisir sistem informasi didapatkan 8 aplikasi pelayanan publik utama yaitu aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS), aplikasi Sistem Informasi

Rumah Sakit (SIMRS), aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kartu AK1 (SIM AK1), aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), aplikasi e-Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo (SIREDO), aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB), aplikasi Sistem Informasi Perijinan (SIIDA) dan Aplikasi PPDB Online. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Statistik Data dan teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 dan kondisi sistem informasi, perlu dilakukan analisis untuk memetakan atau mengelompokkan aplikasi atau sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Selain aplikasi yang bersifat pelayanan publik, perlu juga disertakan pemetaan aplikasi lainnya yang bersifat mendukung aplikasi pelayanan publik dan dalam penyusunan rekomendasi secara sederhana bisa dijawab dengan analisis Mc Farlan Strategic Grid.

Untuk memetakan aplikasi atau sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi pada Mc Farlan Strategic Grid dilakukan pemetaan pada empat kuadran (*strategic, high potential, key operation, and support*). Dari hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran kontribusi sebuah aplikasi atau sistem informasi terhadap organisasi dan pengembangan di masa mendatang. Adapun pemetaan sistem informasi seperti disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Pemetaan Sistem Informasi pada Mc. Farlan Grid

STRATEGIC	HIGH POTENTIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) • Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) • Website www.purworejokab.go.id 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi dashboard terintegrasi pada Command Center untuk pengambil kebijakan (masih dalam pengembangan)

Tabel 4.14 Pemetaan Sistem Informasi pada Mc. Farlan Grid
(Lanjutan)

KEY OPERATIONAL	SUPPORT
<ul style="list-style-type: none"> • e-Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo (SIREDJ0) • aplikasi pelayanan perijinan Kabupaten Purworejo (SIIDA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Pelayanan Kartu AK1 (SIM AK1) • Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB) • Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) • PPDB Online

Dari hasil pemetaan sistem informasi dengan Mc. Farlan Grid dapat dijelaskan bahwa Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS), Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS), merupakan sistem informasi *strategic* karena merupakan aplikasi pelayanan umum di bidang urusan utama yaitu kesehatan, sedangkan website Pemkab Purworejo www.purworejokab.go.id merupakan portal publik utama Pemerintah Kabupaten Purworejo. Aplikasi *dashboard* terintegrasi pada Command Center yang saat ini masih dalam pengembangan merupakan *high potential* karena merupakan aplikasi terintegrasi yang dipasang pada dashboard command center yang difungsikan untuk pemantauan pelayanan dan administrasi oleh pengambil kebijakan. Aplikasi e-Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo (SIREDJ0) dan Aplikasi Pelayanan Perijinan (SIIDA) merupakan aplikasi *key operational* karena termasuk pelayanan publik utama penghasil PAD Kabupaten Purworejo. Sistem Informasi Pelayanan Kartu AK1 (SIM AK1), Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) termasuk dalam *support* karena selain sebagai pelayanan umum juga berfungsi sebagai pendukung data bagi aplikasi lain.

4.11. Rekomendasi Kebijakan yang diharapkan

Berdasarkan analisis data menggunakan tabel RACI, analisis lingkungan eksternal organisasi dengan analisis PEST terkait *politic, economy, social* dan *technology* dan analisis Mc. Farlan Grid terkait pemetaan sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap OPD, diberikan rekomendasi untuk diselaraskan dengan rencana startegis Dinkominfo Kabupaten Purworejo agar tercapai pelayanan publik yang optimal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat merumuskan aturan yang memuat tentang interoperabilitas data terkait wewenang dan kebutuhan data antar OPD sesuai hasil dari pemetaan data pada tabel RACI, sehingga diharapkan OPD penanggung jawab data harus menyediakan data untuk OPD yang membutuhkannya.
2. Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk dapat membuat regulasi terkait penetapan jenis data primer, wewenang atau tanggung jawab data primer tiap OPD dan kebutuhan data primer lintas OPD pada Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan pemetaan data primer dan interoperabilitas data.
3. Sebagai panduan tentang data, organisasi pengelolaan data dan juga pelaksanaan interoperabilitas di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk segera dapat membuat regulasi turunan atau tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 tentang Interoperabilitas Data.

4. Hasil dari analisis eksternal organisasi dengan analisis PEST dan analisis pemetaan sistem informasi pelayanan publik dengan analisis Mc. Farlan dapat dijadikan referensi dalam pemanfaatan sistem informasi dan dalam pengembangan aplikasi yang akan datang dengan skala prioritas pada aplikasi pelayanan publik.

4.12. Matriks Rekapitulasi Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini disusun sebuah matriks rekapitulasi penelitian yang dapat memberikan gambaran dari keseluruhan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir berupa tahapan penelitian, tujuan penelitian, kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, subyek pada tiap tahapan, instrumen atau alat yang digunakan, dan hasil atau *output* dari tiap tahapan penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.15 (Lampiran F). Diharapkan dengan adanya matriks rekapitulasi tahapan penelitian ini dapat memberi gambaran penelitian secara menyeluruh dan memudahkan jika pada aktu yang akan datang ada penelitian ini menjadi referensi untuk dapat dikembangkan oleh peneliti lain.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini :

1. Dihasilkan 132 data primer yang dikelola oleh 35 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, berdasarkan identifikasi atribut yang ada dari data primer, untuk dapat dikomunikasikan antar OPD untuk kepentingan interoperabilitas sistem informasi.
2. Berdasarkan siapa dan apa perannya pada tabel RACI, data primer yang dihasilkan sudah dipetakan secara ketugasan dan tanggung jawabnya terhadap 35 OPD.
3. Telah dibuat penyusunan skema pemetaan interoperabilitas sistem informasi berdasarkan hasil pemetaan data primer.
4. Telah dibuat perancangan kamus data sebagai acuan pengembangan sistem informasi yang akan datang
5. Telah dilakukan perbandingan data primer berdasarkan nama OPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kota Magelang dan penyelenggaraan urusan masing-masing OPD pada.
6. Telah dilakukan pengujian interoperabilitas sistem informasi pada 5 aplikasi yaitu : Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai *provider* data kependudukan, Aplikasi Dashboard Web Service sebagai

penyedia layanan *web service* data kependudukan, Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS), Aplikasi AKI dan Aplikasi SIIDA sebagai *client*

7. Dihasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis tabel RACI, analisis eksternal organisasi dengan PEST dan analisis sistem informasi dengan McFarlan Grid.

5.2. Saran

Berikut saran untuk implementasi yang berkelanjutan pada pengembangan penelitian yang sejenis :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo sebagai OPD yang tupoksi utamanya pemangku kepentingan TIK di Pemerintah Kabupaten Purworejo, diharapkan dapat mengelola dan menindaklanjuti portofolio yang ada dalam tabel RACI, agar pengembangan interoperabilitas sistem yang akan datang akan lebih konsisten dan berkelanjutan
2. Dalam pemanfaatan data primer untuk kebutuhan interoperabilitas, diperlukan komitmen dari pengambil kebijakan dalam merealisasikan data primer dengan skala prioritas, disesuaikan dengan rencana strategis daerah.
3. Perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan agar lebih mendekati ideal untuk sebuah data primer di lingkungan pemerintah kabupaten, mengingat portofolio data primer yang dihasilkan bukan merupakan sebuah daftar data primer yang statis.
4. Pemetaan data primer di lingkungan pemerintahan selain kabupaten (misal pemerintah provinsi atau pemerintah kota) masih sangat berpeluang untuk dilakukan, termasuk juga pada instansi atau perusahaan swasta.

5. Menindaklanjuti rekomendasi pada Sub bab. Rekomendasi kebijakan yang diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

PUSTAKA BUKU

- Sarwono, J., 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hasibuan, Z.A., 2007, *Metodologi Penelitian Dalam Bidang ilmu Komputer dan Teknologi Informasi : Konsep, Teknik Dan Aplikasi*, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

PUSTAKA MAJALAH, JURNAL ILMIAH ATAU PROSIDING

- Ruswianto, N., Utami, E., Arief, M. R., 2018, *Perancangan Data Primer Untuk Layanan E-Government Berbasis Ketugasan Dengan Pendekatan Model Diagram RACI (Studi Kasus : Pemerintah Kota Magelang)*, SEMNASTEKNOMEDIA 2018 Vol 6, No 1 (2018) ISSN : 2302-3805. Universitas AMIKOM Yogyakarta.
- Alif, M., Warsono, H., 2019, *Analysis Development Of E-Government On Provision Of Information Access In Central Java's Province Library*, Journal of Public Policy and Management Review, Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019, DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.25097, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Setiawan, A., Yulianto, E., (2018), *E-Government Interoperability and Integration Architecture Modeling Using TOGAF Framework Based On Service Oriented Architecture*, The Asian Journal of Technology Management Vol. 11 No. 1 (2018): 26-45, Informatics Engineering Langlangbuana University.
- Othman, M.H., Razali, R. (2017), *Electronic Government Systems Interopability Model*, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, e-ISSN: 2289-8131 Vol. 9 No. 3-4, Center for Software Technology and Management Faculty of Information Science and Technology Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Dzikrullah, F., Rinjani, M. A (2017), *A Framework Design To Develop Integrated Data System For Smart E-Government Based On Big Data Technology*, Bulletin of Social Informatics Theory and Application, ISSN 2614-0047 Vol. 1, No. 2, December 2017, pp. 41-51, <https://doi.org/10.31763/businta.v1i2.26>
- Riyanto, D.E., Wirawan, P.W., Kurniawan, K. (2018), *E-Government Interoperability: Architecture Model for Public Information Services of Sub-District Governments*, MATEC Web of Conferences 218, 03008 (2018), ICIEE 2018, <https://doi.org/10.1051/mateconf/201821803008>, Departemen of Computer Science, FSM, Diponegoro University, Semarang, Indonesia

- Wimer, M.A., Boneva, R., Giacomo, D.D., 2018, *Interoperability Governance: A Definition and Insights from Case Studies in Europe*, <https://doi.org/10.1145/3209281.3209306>, Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research,
- Kusdianto, E., 2018, *Menggunakan Matrix RACI Dalam Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan*, Cognoscenti Consulting Group, ccg.co.id
- Ma'arif, M. R., 2016, *Pengembangan Model Interoperabilitas Aplikasi E-Government Untuk Proses Perencanaan, Penganggaran, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Indonesia*; Teknomatika Vol. 8 No. 2- Januari 2016; STMIK A Yani Yogyakarta.
- Wahyuni, F., Angraini, 2015, *Evaluasi Penerapan E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Menggunakan Pendekatan Metode Pegi*; Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, pp.39-43 ISSN 2460-8181; UIN SUSKA, Pekanbaru Riau.
- Rizki Romdoni, M., 2013, *Perancangan Portal Interoperabilitas E-Government Sebagai Platform Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Kota Denpasar*; Portal Komputer, Vol. 4, No. 2, Desember 2015, ISSN 2088-1541;
- Dedeng Hirawan, 2015, *Rencana Strategis Sistem Dan Teknologi Informasi Dalam Usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Di Bappeda Kabupaten Subang*; Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), Vol. 4, No. 1, Maret 2015, ISSN : 2089-9033; Universitas Komputer Indonesia;

PUSTAKA LAPORAN PENELITIAN, PERATURAN

- Ruswianto, N., 2018, *Perancangan Data Primer Untuk Layanan E-Government Berbasis Ketugasan Dengan Pendekatan Model Diagram RACI (Studi Kasus : Pemerintah Kota Magelang)*, Tesis, Universitas Teknologi Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

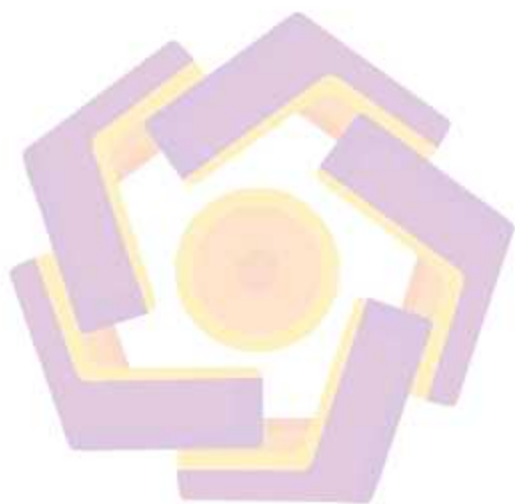
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purworejo;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

Rancangan Peraturan Menteri Tahun 2020 tentang Interoperabilitas Data;



Lampiran A. Form Survei



Form Survei Penyusunan Data Primer

Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini. Bukan zanisa.sukses@gmail.com? [Ganti akun](#)

OPD

Pilih

Berikutnya

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Layanan Penyediaan - Perawatan Lanjutan - Sekolah Dasar](#)

Google Formulir



Form Survei Penyusunan Data Primer

Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini. Bukan zanisa.sukses@gmail.com? [Ganti akun](#)

* Wajib

A. Kebutuhan Data pada Aplikasi

Petunjuk : Isikan kebutuhan akses data dari aplikasi OPD lain terhadap aplikasi yang dikelola pada OPD. Anda, pisahkan dengan koma

A.1 Aplikasi ke-1 yang dikelola OPD Anda

Nama Aplikasi (aplikasi ke-1) *

Jawaban Anda _____

Deskripsi Aplikasi (aplikasi ke-1) *

Jawaban Anda _____

Fungsi Aplikasi (aplikasi ke-1) *

- Layanan Publik
- Administrasi

Output Data (aplikasi ke-1) *

Jawaban Anda

Vendor/Developer (aplikasi ke-1) *

Jawaban Anda

Bahasa Pemrograman yang digunakan (aplikasi ke-1) *

Jika lebih dari satu pisahkan dengan koma

Jawaban Anda

Jenis Database yang digunakan (aplikasi ke-1) *

MySQL

SQL Server

Oracle

PostgreSQL

Ms. Access

SQLite

Yang lain:

Mohon dapat menyertakan dokumentasi database/struktur database Aplikasi (1)

 [Tambahkan file](#)

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)

Form Survei Penyusunan Data Primer

Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini. Bukan zanisa.sukses@gmail.com? [Ganti akun](#)

* Wajib

A.1.1 Kebutuhan Data (aplikasi ke-1) dari OPD lain

Petunjuk : isikan kebutuhan akses data yang diperlukan aplikasi ke-1 OPD Anda dari OPD lain

Kebutuhan Data dari Sekretariat Daerah (1)

contoh: data kependudukan atau data kepegawaian (aplikasi simpeg)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Sekretariat DPRD (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Inspektorat (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Kesehatan (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Lingkungan Hidup (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Perhubungan (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Badan Kepegawaian Daerah (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari RSUD Tjotrowardojo(1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Grabag (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Ngombol (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Purwodadi (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Bagelen (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Kaligesing (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Purworejo (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Banyuurip (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Bayan (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Kutoarjo (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Butuh (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Pituruh (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Kemiri (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Bruno (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Gebang (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Loeno (1)

Jawaban Anda

Kebutuhan Data dari Kecamatan Bener (1)

Jawaban Anda

Apakah ada aplikasi lain di OPD anda? *

- Ya
- Tidak

Kembali

Berikutnya

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporan Penyalahgunaan](#) - [Pencarian Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir



Form Survei Penyusunan Data Primer

Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini. Bukan zanisa.sukses@gmail.com? [Ganti akun](#)

* Wajib

B. Daftar aplikasi yang digunakan oleh OPD

Petunjuk: Isikan daftar aplikasi yang belum ada pada point A, isi hanya dengan aplikasi dimana OPD Anda melakukan entri data pada aplikasi tersebut.

Nama Aplikasi (aplikasi ke-1) *

Jawaban Anda

Deskripsi Aplikasi (aplikasi ke-1) *

Jawaban Anda

Output Data (aplikasi ke-1) *

Jawaban Anda

Pemilik /Pengelola Aplikasi (aplikasi ke-1) *

Jawaban Anda

Jenis Platform Aplikasi (aplikasi ke-1) *

- Mobile (Android/iOS)
- Website
- Desktop

Nama Aplikasi (aplikasi ke-2)

Jawaban Anda

Deskripsi Aplikasi (aplikasi ke-2)

Jawaban Anda

Output Data (aplikasi ke-2)

Jawaban Anda

Pemilik /Pengelola Aplikasi (aplikasi ke-2)

Jawaban Anda

Jenis Platform Aplikasi (aplikasi ke-2)

Mobile (Android/iOS)

Website

Desktop

Nama Aplikasi (aplikasi ke-3)

Jawaban Anda

Deskripsi Aplikasi (aplikasi ke-3)

Jawaban Anda

Output Data (aplikasi ke-3)

Jawaban Anda

Pemilik /Pengelola Aplikasi (aplikasi ke-3)

Jawaban Anda

Jenis Platform Aplikasi (aplikasi ke-3)

Mobile (Android/iOS)

Website

Desktop

Nama Aplikasi (aplikasi ke-4)

Jawaban Anda _____

Deskripsi Aplikasi (aplikasi ke-4)

Jawaban Anda _____

Output Data (aplikasi ke-4)

Jawaban Anda _____

Pemilik /Pengelola Aplikasi (aplikasi ke-4)

Jawaban Anda _____

Jenis Platform Aplikasi (aplikasi ke-4)

Mobile (Android/iOS)

Website

Desktop

Nama Aplikasi (aplikasi ke-5)

Jawaban Anda _____

Deskripsi Aplikasi (aplikasi ke-5)

Jawaban Anda _____

Output Data (aplikasi ke-5)

Jawaban Anda _____

Pemilik /Pengelota Aplikasi (aplikasi ke-5)

Jawaban Anda

Jenis Platform Aplikasi (aplikasi ke-5)

- Mobile (Android/iOS)
- Website
- Desktop

Kembali

Kirim

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporan Pemalahgunaan](#) - [Percayatan Layanan](#) - [Keblakan Privasi](#)

Google Formulir



BERITA ACARA PERSETUJUAN FORM SURVEI

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dengan mengambil tempat di ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo telah diadakan rapat pembahasan materi form survei untuk keperluan penelitian tesis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.

Hadir dalam rapat :

1. Sri Palupi, SE., M.Si (Pimpinan Rapat/Kabid ST/ADATI Dinkominfo Kab. Purworejo)
2. Rahayu Slamet, ST., M.Eng (Kasi Teknologi Informatika Dinkominfo Kab. Purworejo)
3. Lilitana Yuni Kristiani, S.Kom (Kasi Statistik dan Pengolahan Data Dinkominfo Kabupaten Purworejo)
4. Turah Suhono (yang melakukan penelitian tesis/Mahasiswa MTI Universitas AMIKOM Yogyakarta)

Hasil rapat :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian tesis yang dilakukan oleh Turah Suhono di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah dilakukan persetujuan format, konten, dan struktur form survei yang akan dikirimkan ke OPD dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk Pekerjaan Penyusunan Data Primer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan format dan susunan form survei sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 21 September 2020

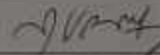
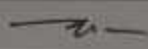
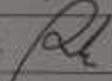


Menyetujui,
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purworejo
Kabid Statistik Data dan
Teknologi Informatika

SRI PALUPI, SE., M.Si
NIP. 19730303 199803 2 007

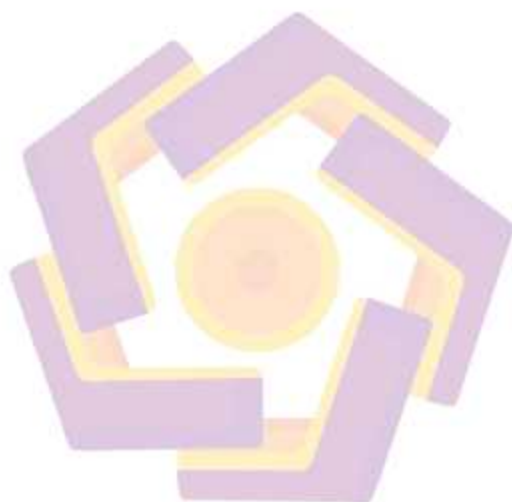
yang melakukan penelitian

TURAH SUHONO

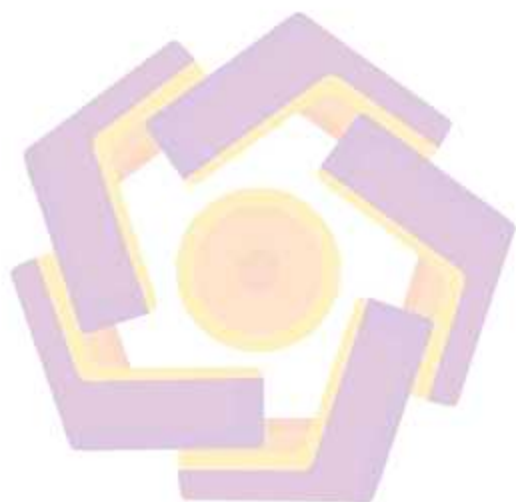
DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Sri Puspita	Dinkominfo	1. 
2.	Pulveru Koes		2. 
3.	Alima Yuni K.	Dinkominfo	3. 
4.	Purrah Sihana		4. 
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Lampiran B. Pemetaan Kewenangan Data Antar OPD Pada Tabel RACI



Lampiran C. Analisis Interoperabilitas



100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

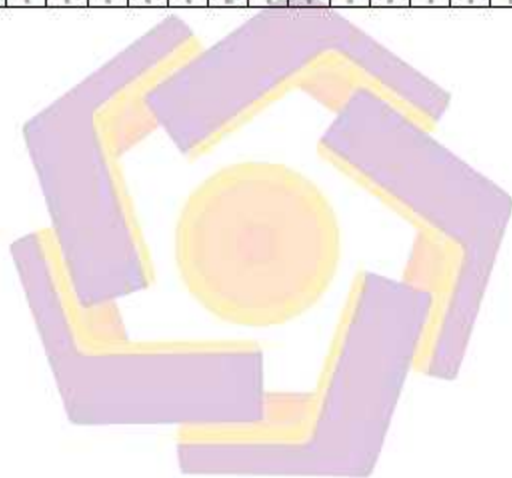
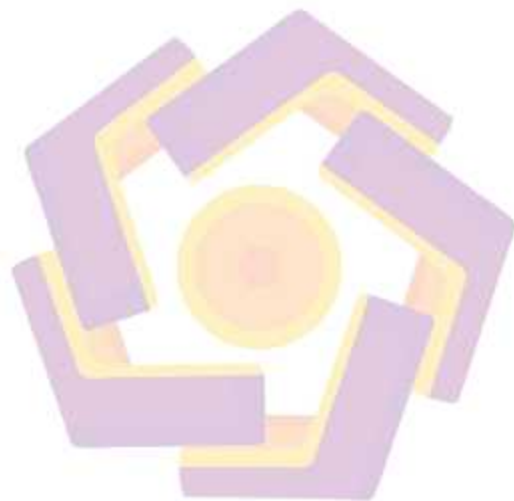
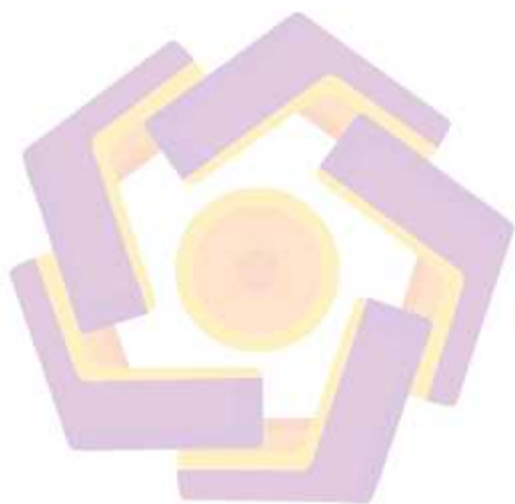


Table 2.8. Location Performance

	Account	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled	Open Positions	Open Positions Underway	Open Positions Fully Filled			
A (a)	21	20	24	26	26	29	24	24	22	22	22	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
B (b)	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
C (c)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
D (d)	22	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Total (e)	51	47	74	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61



Lampiran D. Perbandingan Data Primer



Tabel 4.10 Perubahan Nama dan Urutan OPD Kabupaten Purworejo dan OPD Kota Magelang

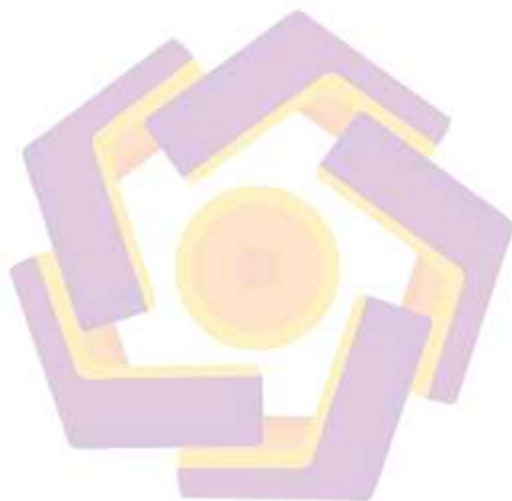
NO	KABUPATEN PURWOREJO		KOTA MAGELANG	
	Berdasarkan PERDA Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2016		Berdasarkan PERDA Kota Magelang No. 3 Tahun 2016	
	Nama OPD	Perangkat/urutan Urusan / Tugas	Nama OPD	Perangkat/urutan Urusan
1	Sekretariat DPRD	unit pelayanan administrasi dan pelayanan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	unit pelayanan administrasi dan pelayanan dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD
2	Inspektur	unit pegawai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspektur	Inspektur	menyusuni tugas membantu Walikota dalam menerima dan mengorganisir pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
3	Dinas Pendidikan, Keperawatan dan Olahraga	bidang pendidikan dan bidang keperawatan dan olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
4	Dinas Kesehatan	bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	bidang Kesehatan
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang	bidang pekerjaan umum dan perumahan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang	bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang
6	Dinas Perikanan, Kelautan, Kawasan Perikanan dan Perikanan	bidang perikanan rakyat dan kawasan perikanan serta bidang perikanan	Dinas Perikanan dan Kawasan Perikanan	bidang Perikanan dan Kawasan Perikanan dan bidang Perikanan
7	Dinas Sosial Pengendalian Penyakit, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial	bidang Sosial
8	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan	Dinas Pertanian, Pangan	bidang Pertanian, Bidang Pangan, Bidang Perikanan, dan Bidang Perikanan
9	Dinas Lingkungan Hidup	bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	bidang Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Dinas Perhubungan	bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	bidang Perhubungan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	bidang pariwisata dan bidang kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	bidang Kebudayaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata
15	Dinas Energi dan Perhubungan Daerah	bidang energi dan bidang perhubungan	Dinas Perhubungan dan Energi	bidang Perhubungan dan bidang Energi
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	bidang Penanaman Modal
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	bidang ketertaman dan ketertiban umum serta pelaksanaan masyarakat dan urusan ketertaman dan ketertiban umum, sub urusan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran	Satpol PP	menyenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketertaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan keamanan, dan sub urusan kebakaran
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	membantu tugas penanggung perencanaan dan tugas penanggung penelitian dan pengabdian masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	membantu tugas penanggung Perencanaan
21	Badan Kependidikan Daerah	membantu tugas penanggung kependidikan dan tugas penanggung penelitian dan pengabdian masyarakat	Badan Kependidikan, Penelitian dan Pelatihan	membantu tugas penanggung Kependidikan, Penelitian dan Pelatihan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	membantu urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah	Badan Penanggulangan Bencana dan Aspek Daerah	membantu tugas Penanggung Bencana
23	Badan Penyelenggaraan Binaan Daerah	membantu urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan binaan daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan	membantu tugas penanggung Penelitian dan Pengembangan
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	membantu urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	bidang Kesatuan Bangsa, Politik
25	KRUD Transparansi	membantu urusan pemerintahan di bidang pelayanan kepatuhan	KRUD Talor	unit pelayanan beryakut transparansi dan unit layanan yang dilaksanakan profesional
26	Sekretariat Daerah	membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	Sekretariat Daerah	membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
	Bagian Organisasi dan Aparatur		Bagian Organisasi dan Aparatur	
	Bagian Hukum		Bagian Hukum	
	Bagian Urusan		Bagian Urusan	
	Bagian Humas dan Protokol		Bagian Humas	
	Bagian Perencanaan Binaan dan Aspek		Bagian Perencanaan	
	Bagian Perencanaan		Bagian Keselamatan Rakyat	
	Bagian Pengembangan		Bagian Perencanaan	
	Bagian Keselamatan Rakyat		Bagian Perencanaan	
	Bagian Pemerintahan			
27	Kecamatan	bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkewajiban di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah	Kecamatan	bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat

Tabel 4.11 Perbandingan Data Primer Pada Kabupaten Purworejo dan OPD Kota Magelang

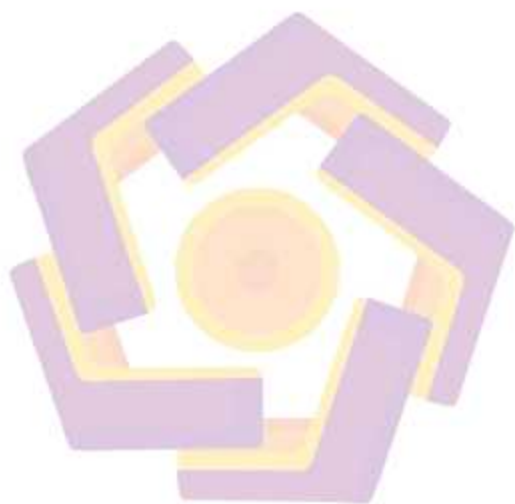
NO	KABUPATEN PURWOREJO		KOTA MAGELANG	
	DATA PRIMER	OPD	DATA PRIMER	OPD
1	Data Anggota DPRD	Bekretariat DPRD	Data Anggota Dewan	Bekretariat DPRD
2	Data Kegiatan DPRD			
4	Data Sekolah	Dimas Pendidikan, Keperguruan dan Olahraga	Data Sekolah	Dimas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Data Guru Hon PPS			
6	Data Peserta Didik			
7	Data Layanan Kesehatan	Dimas Kesehatan	Data Layanan Kesehatan dan Fasilitas RS	Dimas Kesehatan
8	Data Penyakit		Data Penyakit	
9	Data Penerimaan Medis		Data Surat Ijin Praktek Medis	
10	Data Jemberada		Data Jemberada	
11	Data Layanan Puskesmas		Data Layanan Puskesmas	
12	Data Jalan Kabupaten	Dimas Pekerjaan Umum dan Perata Ruang	Data Jalan Lingkungan	Dimas Pekerjaan Umum dan Perata Ruang
13	Data Jembatan		Data Jembatan	
14	Data Jaringan Irigasi		Data Kondisi Jembatan	
15	Data Bendungan		Data Tata Ruang	
16	Data Anggaran Usaha Negara		Data Kawasan Perumahan	
17	Data Drainase Kota		Data Perumahan	
18	Data Tata Ruang		Data Jalan Kota	
24	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Dimas Sosial Pengendalian Keluarga, Keluarga	Data Pambahk Penerima Bantuan Sosial	Dimas Sosial
27	Data Kesejahteraan Pambahk		Data Pambahk Penerima Bantuan Laysk Hani	
28	Data Peserta KB			
27	Data Kelahiran Sosial			
28	Data Pertanian dan Perikanan	Dimas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Data Pertanian	Dimas Pertanian, Pangan
29	Data Pangan		Data Perikanan	
30	Data Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura		Data Perikanan	
31	Data Perikanan dan Kelautan		Data Perikanan	
32	Data Kelompok Pertanian, Perikanan, Perikanan, Nelayan			
36	Data Kepedululikan	Dimas Kepedululikan dan Pencatatan Sipel	Data Pambahk	Dimas Kepedululikan dan Pencatatan Sipel
37	Data Mitasi Pambahk		Data Keluarga	
38	Data Pencatatan Sipel		Data Pambahk Kesejahteraan Gmas Terlarang	
39	Data Profil Desa	Dimas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Peserta KB	Dimas Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan, Perlindungan Anak,
40	Data Keuangan Desa			
41	Data Pencapaian Data Desa			
42	Data Kemandirian Berencana Wajih Uji	Dimas Perhubungan	Data Kesehatan	Dimas Perhubungan
43	Data Pengujian Kendaraan Bermotor		Data Info Lalu Lintas	
44	Data Pemanfaatan Lalu Lintas		Data Kesehatan Jalan	
45	Data Perijinan Treysk		Data Sorepas Lalu Lintas	
46	Data Surata Pemanfaatan Lalu Lintas			
47	Data Pemanfaatan Jalan Umum			
48	Data Pengelolaan Terminal			
49	Data Pengelolaan Parkir			
50	Data Surata Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dimas Komunikasi dan Informatika	Data Indikator Ekonomi Makro	Dimas Komunikasi dan Informatika
51	Data Statistik Sektor			
52	Data Surat Masuk dan Surat Keluar			
53	Data Aduan Masyarakat			
54	Data Pengelolaan Mutasi Telekomunikasi			
55	Data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)			
56	Data Destinasi Wisata	Dimas Pariwisata dan Kebudayaan	Data Terpadu Wisata	Dimas Kepedululikan, Olah Raga dan Pariwisata
57	Data Kelompok Budaya		Data Asosiasi Adis	
58	Data Pengelolaan Perijinan Wisata			
59	Data Kelompok Sastra Wisata			
60	Data Arsip	Dimas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Data Arsip	Dimas Perpustakaan dan Keartisan
61	Data Pengelolaan Perpustakaan		Data Buku	
62	Data Usaha Kecil Menengah (UKM)	Dimas Cooperasi, Usaha kecil, Menengah dan	Data UKM	Dimas Perindustrian dan Perdagangan

83	Data Kepemas		Data Kepemas	
84	Data Pengelolaan Pasa		Data Pasa	
85	Data Perdagangan		Data Perdagangan	
86	Data Kemetrologian		Data Pengang Kaki Lima	
			Data Toko Mera	
			Data Harga Kebutuhan Pokok	
87	Data Perijinan	Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Data Ijin	Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta
88	Data Pemasaran Modal		Data Pemasaran Modal	
89	Data Tarif Perijinan		Data Tarif Perijinan	
			Data Ijin Beklaim	
			Data Ijin Usaha	
78	Data RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Kemakmuran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
79	Data Renda		Data Renda dan Mutakhirang	
80	Data RFMD		Data RFMD	
81	Data Renceta		Data Renceta	
82	Data Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	Data Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah
83	Data Keluarga Pegawai		Data Sinsat Kincira Pegawai	
84	Data Sinsat Kincira Pegawai		Data Peltitaman	
85	Data Pinstaman		Data Gama	
86	Data Pengelolaan Diklat Pegawai		Data Pektarian PNB	
87	Data Gama			
88	Data Aasi Barang Milik Daerah	Badan Pengelola, Pengelolaan Keuangan dan Aasi	Data Aasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aasi Daerah
89	Data Pengelolaan Dan Pemungutan BMD		Data Pengelolaan Dan Pemungutan Barang	
90	Data Keuangan		Data Keuangan	
91	Data Anggaran Perencanaan		Data Anggaran Perencanaan	
92	Data Anggaran Realisasi		Data Anggaran Realisasi	
93	Data Anggaran Pembayaan		Data Anggaran Pembayaan	
94	Data Pelaksanaan Anggaran		Data Pelaksanaan Anggaran	
95	Data Realisasi Fisik Kegiatan		Data Realisasi Fisik Kegiatan	
96	Data Gasi Pegawai		Data Riwamat Gasi Pegawai	
97	Data Pengelolaan Keabsahan		Data Aasi Perantaban	
98	Data Pinstasi Raribasi		Data PDB	
99	Data PDB		Data Pembayaran Pajak PDB	
100	Data Pembayaran PDB		Data Pita Bial	
101	Data Pita Blok PDB		Data Waib Pajak	
102	Data Waib Pajak		Data Aasi Perantaban	
103	Data BPHTB		Data Standar Harga	
104	Data SHH dan ASD		Data PAD	
105	Data PAD			
109	Data Ormas	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perimbangan Masyarakat
110	Data Partai Politik			
111	Data Layanan Rumah Sakat	RSUD Tjitrowarakan	Data Layanan RS Talar	RSUD Talar
112	Data Sarana			
113	Data SAKIP (Kincira Istansi Pemerintah)	Bagian Organisasi dan Aparatur	Data Organisasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi dan Aparatur
114	Data Organisasi Perangkat Daerah		Data Anjab	
115	Data Anjab			
116	Data Produk Hukum	Bagian Hukum	Data Produk Hukum	Bagian Hukum
			Data Draft Peraturan Daerah	
117	Data Kegiatan Kepala Daerah	Bagian Humas dan Protokol	Data Laporan Disposisi Surat	Bagian Humas
118	Data Pira			
123	Data Monitoring Pembangunan Daerah	Bagian Pembangunan	Data RUP (Rencana Umum Pembangunan)	Bagian Pembangunan
			Data Pengadain Barang dan Jasa	
124	Data Tingkat Bualah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data Tingkat Bualah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
125	Data Kegiatan Keagamaan		Data Pembahab Penerima Samsan Kematian	
127	Data Summary Kependudukan Per Kategori Um	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Summary Kependudukan Per Kategori Umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
128	Data Summary Kependudukan Per Tingkat Pendidikan		Data Summary Kependudukan Per Tingkat Pendidikan	
129	Data Summary Kependudukan Per Jenis Kelamin		Data Summary Kependudukan Per Jenis Kelamin	

130	Data Summary Kepcinbakaan Per Agama		Data Summary Kepcinbakaan Per Agama	
			Data Summary Kepcinbakaan	
131	Data Summary Tenaga Kerja Per Tingkat Pendid	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Data Summary Tenaga Kerja Per Jenis Kelamin	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
132	Data Summary Tenaga Kerja Per Jenis Kelamin			
133	Data Summary Kependudukan Per Jabatan	Badan Kependudukan Daerah	Data Summary Kependudukan Per Jabatan	Badan Kependudukan Daerah
134	Data Summary Kependudukan Per Organisasi Perangkat Daerah			



Lampiran E. Kamus Data



KAMUS DATA APLIKASI SIMPUS

Unit Kerja / OPD	Dinkes
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Informasi Puskesmas

A. KAMUS DATA PENDAFTARAN PASIEN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Nik	Varchar (20)	Nomor Induk Kependudukan pasien
2.	Nocm	Varchar (6)	Nomor rekam medik
3.	Noreg	Char (12)	Nomor registrasi pendaftaran pasien
4.	Noasuransi	Varchar (20)	Nomor asuransi pasien
5.	Noregibu	Char (12)	Nomor induk registrasi pasien
6.	Tgldaftar	Date	Tanggal Pasien Daftar
7.	Jamdaftar	Time	Waktu Pasien Daftar
8.	Nama	Varchar (30)	Nama pasien
9.	Alamat	Varchar (80)	Alamat pasien
10.	Telp	Varchar (20)	Nomer telepon pasien
11.	Kkecamatan	Char (7)	Kode kecamatan pasien melakukan pendaftar
12.	Kkelurahan	Char (10)	Kode kelurahan pasien melakukan pendaftar
13.	Kpuskesmas	Char (10)	Kode puskesmas pasien melakukan pendaftar
14.	Wilayah	Char (1)	Kode wilayah puskesmas
15.	Jeniskel	Char (1)	Kode Jenis Kelamin Pasien
16.	Tgllahir	Date	Tanggal Lahir pasien
17.	Umurthn	Int (3)	Umur Pasien (berdasarkan tahun)
18.	Umurbln	Int (2)	Umur Pasiin (berdasarkan bulan)
19.	Umurhr	Int(2)	Umur pasien (berdasarkan hari)
20.	Pekerjaan	Varchar (20)	Pekerjaan pasien
21.	Orangtua	Varchar (30)	Nama Orang tua pasien (ibu)
22.	Ktujuan	Char (2)	Kode poli tujuan

B. KAMUS DATA INTEGRASI ANTAR PUSKESMAS DAN BPJS

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Kabupaten	Varchar (50)	Nama kabupaten
2.	Kecamatan	Varchar (50)	Nama kecamatan
3.	Puskesmas	Varchar (100)	Nama puskesmas
4.	kkabupaten	Char (4)	Kode kabupaten
5.	kkecamatan	Char (7)	Kode Kecamatan
6.	kpuskesmas	Char (10)	Kode Puskesmas
7.	Nourut	Char (3)	Nomer Urut puskesmas
8.	Alamat1	Varchar (50)	Alamat puskesmas
9.	Alamat2	Varchar (50)	Alamat puskesmas
10.	Pimpinan	Varchar (25)	Nama Pimpinan Puskesmas

11.	kodedepkes	Char (15)	Kode Puskesmas dari Depkes
12.	kkriteriaunitkerja	Char (2)	Kode kriteria unit kerja puskesmas
13.	Kpegawai	Varchar (25)	Kode pegawai puskesmas
14.	statusaplikasi	Char (1)	Kode status aplikasi SIK
15.	Kodepcare1	Varchar (100)	Kode akses BPJS Pcare (digunakan untuk integrasi)
16.	Kodepcare2	Varchar (100)	Kode akses BPJS Pcare (digunakan untuk integrasi)
17.	Kodebpjs1	Varchar (100)	Kode BPJS (digunakan untuk integrasi)
18.	Kodebpjs2	Varchar (100)	Kode BPJS (digunakan untuk integrasi)
19.	Kodebpjs3	Varchar (100)	Kode BPJS (digunakan untuk integrasi)
20.	ipserverpuskesmas	Varchar (50)	Alamat IP server Puskesmas
21.	folderserverpuskesmas	Varchar (50)	
22.	Kodeaktifasi	Varchar (100)	Token integrase
23.	Alamatserver	Varchar (100)	

C. KAMUS DATA TRANSAKSI RIWAYAT PASIEN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	notrans	Char (19)	Nomor transaksi pendaftaran pasien
2.	Nocm	Varchar (6)	Nomor rekam medik
3.	Noreg	Char (12)	Nomor registrasi pendaftaran pasien
4.	nopas	Varchar (12)	Nomor
5.	nokarcis	Char (6)	Nomorurut pendaftaran poli
6.	Noasuransi	Varchar (20)	Nomor asuransi pasien
7.	tgitrans	Date	Tanggal transaksi pendaftaran pasien
8.	Umurthn	Int (3)	Umur Pasien (berdasarkan tahun)
9.	Umurbln	Int (2)	Umur Pasiin (berdasarkan bulan)
10.	Umurhr	Int(2)	Umur pasien (berdasarkan hari)
11.	Jeniskel	Char (1)	Kode Jenis Kelamin Pasien
12.	kkelompok	Char (1)	Kode kelompok
13.	ktujuan	Char (2)	Kode tujuan poli pasien
14.	Kkategoritujuan	Char (2)	Kode kategori tujuan poli
15.	kasus	Char (1)	Kode diagnosa awal
16.	wilayah	Char (1)	Kode wilayah puskesmas
17.	tinggibadan	Decimal (5)	Tinggi badan pasien
18.	beratbadan	Decimal (5)	Berat badan pasien
19.	Dirujuk1	Char (1)	Kode rujukan pertama
20.	Dirujuk2	Varchar (30)	Alamat nama rujukan
21.	gejala	text	Deskripsi gejala penyakit pasien
22.	Pemeriksaanfisik	text	Deskripsi hasil pemeriksaan fisik pasien
23.	Kpenyakit1	Char (4)	Kode penyakit pasien

D. KAMUS DATA PENYAKIT

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	kpenyakit	Char (4)	Kode penyakit

2.	penyakit	Varchar (100)	Deskripsi penyakit
3.	kodelCD	Varchar (15)	Kode klasifikasi penyakit
4.	I0besar	Char (1)	Kode penyakit I0 besar terpopuler
5.	W2	Char (1)	Kode wabah mingguan
6.	PTM	Char (1)	Kode klasifikasi penyakit tidak menular
7.	Survey	Char (3)	Jumlah survey penyakit
8.	kpegawai	Varchar (25)	Kode pegawai input data
9.	tampil	Char (1)	Kode data penyakit ditampilkan atau tidak

E. KAMUS DATA TRANSAKSI OBAT

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	notrans	Char (19)	Nomor transaksi pendaftaran pasien
2.	Notrans1	Char (21)	Nomor transaksi obat pasien
3.	tgltrans	date	Tanggal transaksi obat pasien
4.	nourut	Int (2)	Nomor urut antri obat
5.	kobat	Char (7)	Kode obat
6.	kgolobat	Char (2)	Kode golongan obat
7.	jumlah	decimal	Jumlah obat
8.	ket	Varchar (15)	Keterangan obat
9.	tarf	Int (10)	Harga obat
10.	subtotal	Int (10)	Jumlah harga obat
11.	kpuskesmas	Char (10)	Kode puskesmas

F. KAMUS DATA OBAT

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Kobat	Char (7)	Kode obat
2.	obat	Varchar (100)	Deskripsi obat
3.	satuan	Varchar (15)	Jumlah satuan obat
4.	kgolobat	Varchar (50)	Kode golongan obat
5.	ksumber	Char (2)	Kode sumber/asal obat
6.	sumber	Varchar (50)	Deskripsi sumber/asal obat
7.	tahun	Int (4)	Tahun kadaluarsa obat
8.	kpegawai	Varchar (25)	Kode pegawai input data obat
9.	Sawal	Decimal (13)	
10.	Smasuk	Decimal (13)	
11.	skeluar	Decimal (13)	
12.	Sakhir	Decimal (13)	
13.	Sopt	Decimal (13)	
14.	minta	Decimal (13)	
15.	Hbeli	Int (11)	Harga beli obat
16.	Hjual	Int (11)	Harga jual obat
17.	Kpuskesmas	Char (10)	Kode puskesmas
18.	tampil	Char (1)	Kode data obat tampil atau tidak

G. KAMUS DATA PEGAWAI PUSKESMAS

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	statususer	Varchar (50)	Status user aktif / tidak
2.	password	Varchar (50)	Password user login aplikasi
3.	Nip_reg	Varchar (25)	Nomor induk pegawai
4.	Niplama	Varchar (10)	NIP lama pegawai
5.	karpeg	Varchar (11)	Kode kartu pegawai
6.	nama	Varchar (50)	Nama pegawai
7.	Gel_dep	Varchar (5)	Gelar depan pegawai
8.	Gel_bel	Varchar (15)	Gelar belakang pegawai
9.	Kd_lok1	Varchar (4)	Kode lokasi alamat pegawai
10.	Alamat1	Varchar (70)	Alamat pegawai
11.	Tgl_lhr	date	Tanggal lahir pegawai
12.	jeniskel	Char (1)	Kode Jenis kelamin pegawai (opsi 1&0)
13.	kagama	Char (1)	Kode agama pegawai
14.	Kd_pend1	Varchar (4)	Kode pendidikan awal pegawai
15.	St_kawin	Char (1)	Kode status pernikahan
16.	Tgl_mjp	Date	Tanggal
17.	Tgl_masuk	Date	Tanggal pegawai terdaftar
18.	Kd_stp	Char (1)	Kode
19.	Tmt_jab	date	Tanggal jabatan
20.	Kd_gol1	Varchar (5)	Kode golongan awal pegawai
21.	Kd_gol2	Varchar (5)	Kode golongan pegawai
22.	Tmt_gol1	date	Tanggal golongan awal pegawai

H. KAMUS DATA TINDAKAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	ktindakan	Char (3)	Kode tindakan
2.	tindakan	Varchar (100)	Deskripsi tindakan
3.	Tarif	Int (6)	Harga/tarif tindakan
4.	kpegawai	Varchar (25)	Kode pegawai

I. KAMUS DATA TUJUAN POLI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	ktujuan	Char (2)	Kode tujuan poli
2.	tujuan	Varchar (20)	Deskripsi tujuan
3.	karcis	Int (5)	Nomor urut
4.	tampil	Char (1)	Kode data tampil atau tidak
5.	kpegawai	Varchar (25)	Kode pegawai input
6.	filesound	Varchar (20)	Nama file suara panggilan nomor urut poli
7.	kdpoli	Char (3)	Kode poli

KAMUS DATA APLIKASI AK1

Unit Kerja / OPD	Dinperinaker
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Informasi Pelayanan Kartu Kuning

A. KAMUS DATA PENDAFTAR AK1

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	NIK	Number (16)	Nomor Induk Kependudukan (sesuai Data SIAK)
2.	EKTP_CURRENT_STATUS_CODE	Varchar2 (20byte)	Status e-KTP (sesuai Data SIAK)
3.	NAMA_LGKP	Varchar2 (60byte)	Nama lengkap pendaftar (sesuai Data SIAK)
4.	TMPT_LHR	Varchar2 (60byte)	Nama kota pendaftar lahir (sesuai Data SIAK)
5.	TGL_LHR	Date	Tanggal pendaftar lahir (sesuai Data SIAK)
6.	JENIS_KLMIN	Number (1)	Kode jenis kelamin pendaftar (sesuai Data SIAK)
	Alamat	Varchar (100)	Nama jalan alamat pendaftar
7.	Dusun	Varchar (50)	Nama dusun asal pendaftar
8.	NAMA_KET_RT	Varchar2 (60byte)	Nomor RT asal pendaftar (sesuai Data SIAK)
9.	NAMA_KET_RW	Varchar2 (60byte)	Nomor RW asal pendaftar (sesuai Data SIAK)
10.	NO_KEL	Number (4)	Kode kelurahan asal pendaftar (sesuai Data SIAK)
11.	Kelurahan	Varchar (50)	Nama kelurahan asal pendaftar
12.	NO_KEC	Number (2)	Kode kecamatan asal pendaftar (sesuai Data SIAK)
13.	NO_KAB	Number (2)	Kode kabupaten asal pendaftar (sesuai Data SIAK)
14.	NO_PROP	Number (2)	Kode Propinsi asal pendaftar (sesuai Data SIAK)
15.	Kode_pos	Int (5)	Kode pos alamat pendaftar
16.	Nomor_daftar	Int (6)	Kode/nomor pendaftaran
17.	Tgl_daftar	Date	Tanggal daftar
18.	Status_daftar	Char (1)	Kode status terdaftar
19.	EMAIL	Varchar2 (100byte)	Alamat e-mail pendaftar (sesuai Data SIAK)
20.	GELAR	Varchar2 (1byte)	Gelar depan (sesuai Data SIAK)
21.	GELAR_AKADEMIS	Varchar2 (1byte)	Gelar belakang (sesuai Data SIAK)
22.	AGAMA	Varchar2 (20byte)	Agama pendaftar (sesuai Data SIAK)

23.	STAT_KWN	Number (1)	Kode status kawin (sesuai Data SIAK)
24.	KEBANGSAAN	Varchar2 (60byte)	Kewarganegaraan pendaftar (sesuai Data SIAK)
25.	Tinggi_badan	Decimal (2)	Tinggi badan pendaftar
26.	Berat_badan	Decimal (2)	Berat badan pendaftar
27.	No_hp	Number (12)	Nomor HP pendaftar
28.	No_telp	Number (15)	Nomor telepon pendaftar.
29.	Nama_perusahaan	Varchar (100)	Nama perusahaan
30.	Jabatan	Varchar (50)	Nama Jabatan
31.	Dekripsi_pekerjaan	Varchar (100)	Deskripsi jabatan
32.	Lama_kerja	Int (3)	Dalam tahun
33.	Gaji	Number (10)	Dalam rupiah
34.	Pengalaman_kerja	Int (3)	Dalam tahun
35.	Wilayah_penempatan	Varchar (50)	Nama kota penempatan yg diinginkan
36.	Provinsi_penempatan	Number (2)	Kode Propinsi (sesuai Data SIAK)
37.	Kabupaten_penempatan	Number (2)	Kode kabupaten (sesuai Data SIAK)
38.	Golongan_pekerjaan_diminati	Varchar (100)	Nama Golongan pekerjaan
39.	Jenis_gol_diminati	Varchar (25)	Jenis golongan pekerjaan
40.	System_pembayaran	Varchar (25)	jenis system pembayaran
41.	Harapan_gaji_minimal	Number (10)	Dalam bentuk angka(rupiah)
42.	Nama_pelatihan_ketrampilan	Varchar (50)	Nama peatihan
43.	Lembaga_pelatihan	Varchar (50)	Nama instansi
44.	Thn_lulus	Date (y)	Tahun
45.	Nilai_sertifikat	Varchar (5)	Nilai hasil pelatihan
46.	Bahasa_yg_dikuasai	Varchar (25)	Nama Bahasa
47.	Tingkat_kemampuan	Enum	(dasar, menengah, mahir)
48.	kode_pendidikan	Int (2)	Kode jenjang pendidikan
49.	Jurusan	Varchar (50)	Jenis jurusan
50.	Nama_instansi_pendidikan	Varchar (50)	Nama instansi
51.	Tahun_lulus	Date (y)	Tahun
52.	Tahun_masuk	Date (y)	Tahun
53.	Lama Pendidikan	Int (1)	Tahun
54.	Nilai	Varchar (4)	Nilai akhir pendidikan

B. KAMUS DATA PENDIDIKAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Kode_pendidikan	Int (2)	Kode jenjang pendidikan
2.	Nama_jenjang	Varchar (50)	Nama jenjang pendidikan
3.	No_urut	Int (1)	Nomor urut

KAMUS DATA APLIKASI SIAK

Unit Kerja / OPD	Disdukcapil
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Informasi Kependudukan

A. KAMUS DATA PENDUDUK

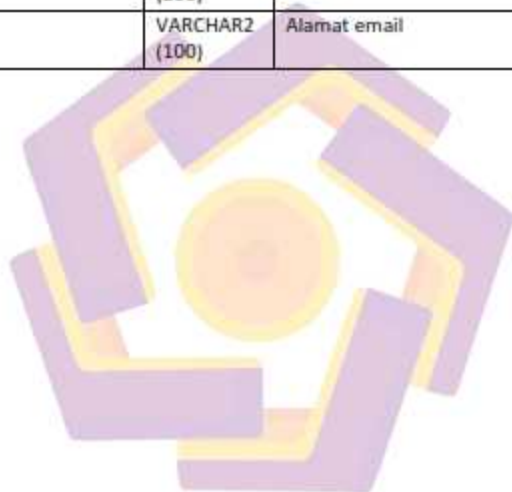
No	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1	NIK	Number (16)	Nomor induk kependudukan
2	NO_KTP	VARCHAR2 (40)	Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas.
3	TMPT_SBL	VARCHAR2 (300)	
4	NO_PASPOR	VARCHAR2 (30)	Nomor paspor
5	TGL_AKH_PASPOR	DATE	Tanggal masa berlaku paspor
6	NAMA_LGKP	VARCHAR2 (60)	Nama asli dari seseorang
7	JENIS_KLMIN	NUMBER (1)	Jenis kelamin individu secara fisik.
8	TMPT_LHR	VARCHAR2 (60)	Kota tempat kelahiran Selain Jakarta berupa kabupaten kota, jika luar Indonesia nama kota saja
9	TGL_LHR	DATE	Tanggal yang menyatakan hari yang keberapa dalam bulan warga negara lahir
10	AKTA_LHR	NUMBER (1)	Ada/tidak akta lahir
11	NO_AKTA_LHR	VARCHAR2 (40)	Nomor akta kelahiran kependudukan
12	GOL_DRH	NUMBER (3)	Jenis golongan darah
13	AGAMA	VARCHAR2 (20)	Ajaran, sistem yg mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kpd Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yg berhubungan dng pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya
14	STAT_KWN	NUMBER (1)	Kode status perkawinan
15	AKTA_KWN	NUMBER (1)	Ada/tidak akta kawin

16	NO_AKTA_KWN	VARCHAR2 (40)	nomor akta kawin
17	TGL_KWN	DATE	Tanggal pernikahan sesuai akta nikah
18	AKTA_CRAI	NUMBER (1)	Ada/tidak akta cerai
19	NO_AKTA_CRAI	VARVCHAR2 (40)	nomor akta cerai
20	TGL_CRAI	DATE	Tanggal perceraian sesuai akta cerai
21	STAT_HBKEL	NUMBER (2)	Kode jenis status hubungan keluarga (kepala keluarga, anak dsb)
22	KLAIN_FSK	NUMBER (1)	Kode jenis kelainan fisik
23	PNYDNG_CCT	NUMBER (1)	Kode jenis penyandangan cacat
24	PDDK_AKH	NUMBER (2)	Kode jenis pendidikan akhir
25	JENIS_PKRJN	NUMBER (3)	Kode jenis pekerjaan
26	NIK_IBU	NUMBER (16)	Nomor induk kependudukan ibu kandung
27	NAMA_LGKP_IBU	VARCHAR2 (60)	Nama ibu kandung
28	NIK_AYAH	NUMBER (16)	Nomor induk kependudukan ayah kandung
29	NAMA_LGKP_AYAH	VARCHAR2 (60)	Nama ayah kandung
30	NAMA_KET_RT	VARCHAR2 (60)	Nama RT
31	NAMA_KET_RW	VARCHAR2 (60)	Nama RW
32	NAMA_PET_REG	VARCHAR2 (60)	Nama petugas pengregistrasi
33	NIP_PET_REG	NUMBER (18)	Nomor induk kepegawaian petugas pengregistrasi
34	NIP_PET_ENTRI	NUMBER (18)	Nomor induk kepegawaian petugas entri data
35	TGL_ENTRI	DATE	Tanggal entri data
36	NO_KK	NUMBER (16)	Nomor kartu keluarga
37	JENIS_BNTU	NUMBER (2)	Kode jenis bantuan yg diterima

38	NO_PROP	NUMBER (2)	Kode propinsi
39	NO_KAB	NUMBER (2)	Kode kabupaten
40	NO_KEC	NUMBER (2)	Kode kecamatan
41	NO_KEL	NUMBER (4)	Kode kelurahan
42	STAT_HIDUP	NUMBER (10)	
43	TGL_UBAH	DATE	Tanggal data diubah
44	TGL_CETAK_KTP	DATE	Tanggal ktp dicetak
45	TGL_GANTI_KTP	DATE	Tanggal ktp diganti
46	TGL_PJG_KTP	DATE	Tanggal ktp diperpanjang
47	STAT_KTP	NUMBER (1)	Kode Status ktp (aktif/tidak)
48	ALS_NUMPANG	NUMBER (1)	Kode alasan numpang
49	PFLAG	VARCHAR2 (1)	
1	CFLAG	VARCHAR2 (1)	
2	SYNC_FLAG	NUMBER (1)	
3	KET_AGAMA	VARCHAR2 (60)	Deskripsi agama
4	KEBANGSAAN	VARCHAR2 (60)	Kewarganegaraan
5	GELAR	VARCHAR2 (5)	Nama gelar
6	KET_PKRJN	VARCHAR2 (60)	Deskripsi pekerjaan
7	GLR_AGAMA	VARCHAR2 (1)	Kode jenis gelar dari sisi agama
8	GLR_AKADEMIS	VARCHAR2 (1)	Kode jenis gelar dari sisi akademisi
9	GLR_BANGSAWAN	VARCHAR2 (1)	Kode jenis gelar dari sisi kebangsawanan
10	IS_PROS_DATANG	VARCHAR2 (1)	

11	DESC_PKERJAAN	VARCHAR2 (30)	Deskripsi pekerjaan
12	DESC_KEPERCAYAAN	VARCHAR2 (30)	Dekripsi kepercayaan yang dianut
13	FLAG_STATUS	VARCHAR2 (1)	Kode status
14	COUNT_KTP	NUMBER (5)	
15	COUNT_BIODATA	NUMBER (5)	
16	FLAGSINK	VARCHAR2 (50)	
17	FLAG_EKTP	NUMBER	
18	KODWIL	NUMBER (6)	Kode wilayah
19	CREATED_BY	VARCHAR2 (20)	
20	MODIFIED_BY	VARCHAR2 (20)	
21	FLAG_PINDAH	VARCHAR2 (1)	Kode pindah
22	EKTP_CURRENT_STATUS_CODE	VARCHAR2 (30)	
23	EKTP_CREATED_DATE	DATE	Tanggal pembuatan ektp
24	EKTP_UPDATED_DATE	DATE	Tanggal update ektp
25	EKTP_UPDATED_BY	VARCHAR2 (256)	
26	EKTP_UPLOAD_LOCATION	NUMBER (10)	Koordinat upload data ektp
27	EKTP_BATCH	NUMBER	
28	SMS_PHONE	VARCHAR2 (30)	
29	SMS_COUNT	NUMBER (4)	
30	IS_CRUD	VARCHAR2 (1)	
31	CURRENT_STATUS_CODE	VARCHAR2 (30)	
32	NAMA_PET_UBAH	VARCHAR2 (60)	Nama petugas yg ubah data

33	IS_UPT	VARCHAR2 (1)	
34	CERT_STATUS_KTP	NUMBER (1)	
35	CERT_CODE_KTP	VARCHAR2 (200)	
36	CERT_STATUS_KIA	NUMBER (1)	
37	CERT_CODE_KIA	VARCHAR2 (200)	
38	CERT_STATUS	NUMBER (1)	
39	CERT_CODE	VARCHAR2 (200)	
40	EMAIL	VARCHAR2 (100)	Alamat email



KAMUS DATA APLIKASI SIREDJO

Unit Kerja / OPD	BPPKAD
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Informasi

A. KAMUS DATA JENIS PKD

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	id_pkd	Int (3)	Kode jenis pkd
2.	Nama_pkd	Varchar (20)	Nama PKD
3.	tarif	number (20)	Angka harga (dalam rupiah)
4.	Satuan_jumlah	Int (1)	Kode jenis satuan (unit)
5.	Satuan_Ukuran	Int (1)	Kode jenis ukuran (buah/m2)
6.	Satuan_waktu	Int (1)	Kode jenis waktu (hari/minggu/bulan/tahun)
7.	Kode_rekening		Kode rekening (sesuai SIMDA)
8.	Dinas	Int (3)	Kode SKPD
9.	Jenis retribusi	Int (3)	Kode jenis retribusi

B. KAMUS DATA JENIS ASSET PKD

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	id_asset_pkd	Int (3)	Kode jenis asset pkd
2.	Nama_asset_pkd	Varchar (50)	Nama asset pkd
3.	id_pkd	Int (3)	Kode jenis pkd
4.	Alamat	Varchar (25)	Nama jalan alamat asset
5.	No_kel	Number (2)	Kode kelurahan
6.	No_kec	Number (2)	Kode kecamatan
7.	kodepos	Number (6)	Kodepos alamat asset
8.	Panjang_m	Number (3)	Satuan meter
9.	Lebar_m	Number (3)	Satuan meter
10.	Luas_m2	Number (3)	Satuan meter2
11.	tarif	number (20)	Angka harga (dalam rupiah)
12.	Satuan_jumlah	Int (1)	Kode jenis satuan (unit)
13.	Satuan_Ukuran	Int (1)	Kode jenis ukuran (buah/m2)
14.	Satuan_waktu	Int (1)	Kode jenis waktu (hari/minggu/bulan/tahun)
15.	retribusi	Number (10)	Jumlah total tarif retribusi (dalam rupiah)

C. KAMUS DATA PENDAFTAR WAJIB RETRIBUSI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Tgl_dftr	Date	Tanggal daftar
2.	NPWRD	Varchar (100)	Kode nomor wajib pajak daerah
3.	Nama	Varchar (50)	Nama pendaftar
4.	Alamat	varchar (50)	Alamat pendaftar

5.	Dinas	Int (3)	Kode SKPD
6.	Jumlah_Objek	Number (3)	Jumlah objek retribusi
7.	Kode_jenis_pendaftaran	Char (1)	Kode jenis pendaftaran (WR/OR)
8.	Bidang_usaha	Number (2)	Jenis bidang usaha
9.	No_pendaftaran	Number (10)	Nomer urut pendaftaran
10.	NIK	Number (16)	Nomor induk kependudukan
11.	RT	Number (2)	Nomor RT
12.	RW	Number (2)	Nomor RW
13.	No_kel	Number (2)	Kode kelurahan
14.	No_kec	Number (2)	Kode kecamatan
15.	No_kab	Number (2)	KODE kabupaten
16.	No_telp	Number (12)	Nomor telepon
17.	email	Varchar (50)	Alamat email
18.	kodepos	Number (6)	kodepos
19.	id_pendaftar_wr	Int (12)	Kode pendaftaran

D. KAMUS DATA OBJEK RETRIBUSI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	id_objek_retribusi	int (12)	Kode nomor objek pajak
2.	id_pendaftar_wr	Int (12)	Kode pendaftaran
3.	id_asset_pkd	Int (3)	Kode jenis asset pkd
4.	Tipe_tarif	Number (2)	Kode tipe tariff (tarif)
5.	Jangka_waktu	Number (3)	Jumlah satuan waktu
6.	Satuan_waktu	Int (1)	Kode jenis waktu (hari/minggu/bulan/tahun)
7.	Perjanjian_awal	Date	Tanggal mulai masa perjanjian
8.	Perjanjian_akhir	Date	Tanggal akhir masa perjanjian
9.	Tipe_pembayaran	Number (2)	Kode tipe pembayaran (isidentil)
10.	Nama_penanggungjwb	Varchar (50)	Nama penanggungjawab pembuatn perjanjian
11.	alamat	varchar (50)	Alamat penanggungjawab pembuatn perjanjian
12.	Tgl_dftr	Date	Tanggal daftar wajib retribusi
13.	kodepos	Number (6)	Kodepos wajib retribusi

E. KAMUS DATA PEMBAYARAN PAJAK

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Kode_bayar	Int(15)	Kode pembayaran
2.	Id_objek_retribusi	int (12)	Kode nomor objek pajak
3.	Id_pendaftar_wr	Int (12)	Kode pendaftaran
4.	Id_objek_retribusi	int (12)	Kode objek retribusi
5.	bunga	Number (10)	Jumlah bunga
6.	Status_pajak	Int (1)	Kode status pembayaran pajak

KAMUS DATA APLIKASI SIIDA

Unit Kerja / OPD	DinPMPTSP
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Informasi Perijinan

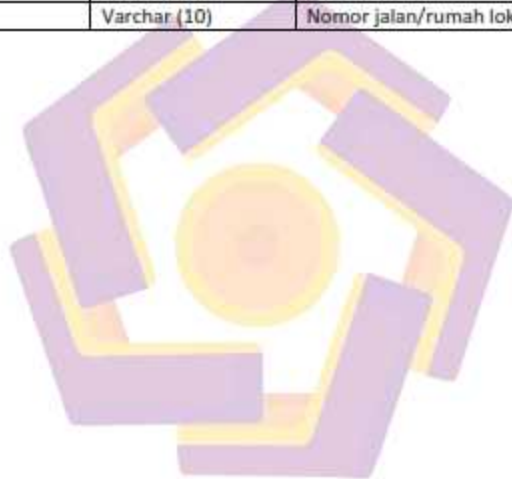
A. KAMUS DATA JENIS IJIN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_jenisijin	Bigint (20)	Kode jenis ijin
2.	Id_bidang	Bigint (20)	Kode bidang
3.	nama	Varchar (200)	Nama jenis ijin
4.	lamaprosesijin	Varchar (20)	Lama proses ijin
5.	Biaya	Varchar (20)	Tarif jenis ijin
6.	Syarat	Text	Deskripsi syarat jenis ijin
7.	Prosedur	Text	Deskripsi prosedur jenis ijin
8.	Informasi	Text	
9.	Status	Varchar (1)	Status jenis ijin
10.	Timestamp	Timestamp	Waktu input jenis ijin
11.	Npwp	Enum (0,1)	Status NPWP (ada/tidak)
12.	Iktr	Enum (0,1)	Status IKTR (ada/tidak)
13.	peta	Enum (0,1)	Status peta (ada/tidak)
14.	maksimal	Int (11)	

B. KAMUS DATA PENDAFTAR

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_pendaftaran	Bigint(20)	Kode pendaftaran
2.	Id_pendaftaran	Bigint(20)	Kode status pendaftaran
3.	Id_jenisijin	Bigint(20)	Kode jenis ijin
4.	nama	Varchar (100)	Nama pendaftar
5.	Nonpwp	Varchar (100)	Nomor npwp pendaftar
6.	Namanpwp	Varchar (100)	Nama pemilik npwp yang didaftarkan
7.	Noktp	Varchar (100)	Nomor ktp pendaftar
8.	Tempatlahir	Varchar (100)	Nama kota tempat lahir pendaftar
9.	Tanggalahir	Date	Tanggal lahir pendaftar
10.	Jeniskelamin	Varchar (20)	Jenis kelamin pendaftar
11.	Alamat	Varchar (100)	Alamat asal pendaftar
12.	Desakelurahan	Varchar (100)	Nama desa/kelurahan asal pendaftar
13.	kecamatan	Varchar (100)	Nama kecamatan asal pendaftar
14.	Kodepos	Varchar (100)	Kode pos asal pendaftar
15.	Kabupaten	Varchar (100)	Nama kabupaten asal pendaftar
16.	Pekerjaan	Varchar (100)	Jenis pekerjaan pendaftar
17.	Notelp	Varchar (20)	Nomor telepon pendaftar
18.	Nohp	Varchar (20)	Nomor hp pendaftar

19.	Email	Varchar (100)	Alamat email pendaftar
20.	Filefoto	Varchar (250)	Nama alamat penyimpanan file foto pendaftar
21.	Filektp	Varchar (250)	Nama alamat penyimpanan file ktp pendaftar
22.	Modal	Varchar (20)	
23.	Modal_lampiran	Varchar (250)	
24.	Keterangan_p	Text	
25.	Password	Varchar (100)	Password login pendaftar
26.	Datetime_pendaftaran	Datetime	Waktu pendaftaran
27.	Tanggalpenyerahan	Date	
28.	id_lokasiizin_kelurahan	Varchar (20)	Kode lokasi kelurahan
29.	id_lokasiizin_desa	Varchar (20)	Kode lokasi desa
30.	Lokasiizin_jalan	Varchar (100)	Kode lokasi jalan
31.	Lokasiizin_rt	Varchar (10)	Kode lokasi rt
32.	Lokasiizin_rw	Varchar (10)	Kode lokasi rw
33.	Lokasiizin_no	Varchar (10)	Nomor jalan/rumah lokasi pengajuan ijin



KAMUS DATA APLIKASI ADUAN

Unit Kerja / OPD	Dinkominfo
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Informasi Pengaduan

A. KAMUS DATA PENGGUNA APLIKASI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	id_user	Int (11)	Kode identitas pengguna
2.	nik	Varchar (16)	Nomor induk kependudukan pendaftar
3.	nama	Varchar (100)	Nama lengkap pendaftar
4.	Jenis_kelamin	Varchar (10)	Jenis kelamin pendaftar
5.	Tempat_lahir	Varchar (255)	Kota tempat lahir pendaftar
6.	Tanggal_lahir	Date	Tanggal lahir pendaftar
7.	alamat	Text	Alamat pendaftar
8.	username	Varchar (255)	Nama pengguna menggunakan alamat email pendaftar
9.	Password	Varchar (100)	Kata sandi login aplikasi pengguna
10.	Email	Varchar (255)	Alamat email pengguna
11.	activated	Int (1)	Akun aktif/tidak
12.	code	Varchar (5)	Kode aktif akun
13.	Password_device	Varchar (25)	Kata sandi perangkat
14.	Created_at	Datetime	Waktu pengguna mendaftar akun
15.	Token_reset_password	Varchar (255)	Kode unik untuk mereset password
16.	Update_at	Datetime	Waktu ubah data akun
17.	Code_create_at	Datetime	Waktu pembuatan kode unik reset password
18.	Req_reset_password	Datetime	Waktu permintaan reset password
19.	domisili	Enum (Dalam Kota/Luar Kota)	Domisili pengguna
20.	Token_daftar	Varchar (255)	Kode unik untuk mendaftar aplikasi
21.	Token_create_at	Datetime	Waktu pembuatan kode unik daftar aplikasi
22.	Req_aktivasi_ulang	Datetime	Waktu permintaan aktivasi ulang
23.	No_rt	Varchar (10)	Nomor RT asal pengguna
24.	No_rw	Varchar (10)	Nomor RW asal pengguna
25.	Kode_pos	Varchar (10)	Kode pos asal pengguna
26.	No_kel	Varchar (10)	Nomor kelurahan asal pengguna
27.	No_kec	Varchar (10)	Nomor kecamatan asal pengguna
28.	No_kab	Varchar (10)	Nomor kabupaten asal pengguna
29.	No_prop	Varchar (10)	Nomor propinsi asal pengguna
30.	No_telp	Varchar (20)	Nomor telepon pengguna
31.	agama	Varchar (10)	Jenis kepercayaan pengguna
32.	Stat_kwn	Varchar (2)	Kode status pernikahan pengguna (ka/Be)
33.	Last_login	Datetime	Waktu terakhir pengguna login
34.	Foto_profil	Int (2)	Ada file foto profil/tidak

B. KAMUS DATA JENIS SOSIAL MEDIA

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_sosmed	Int (11)	Kode identitas social media
2.	Nama_sosmed	Varchar (50)	Nama social media
3.	Logo_sosmed	Varchar (50)	Nama file logo social media

C. KAMUS DATA RATING KEPUASAN MASYARAKAT

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_rate	Int (5)	Kode Identitas rating
2.	Id_pengaduan	Int (10)	Kode pengaduan
3.	keterangan	Varchar (15)	Jenis kepuasan
4.	Jumlah_bintang	Float	Nilai kepuasan
5.	Keterangan_tidak_puas	Text	Deskripsi tidak puas
6.	tanggal	datetime	Waktu rating dibuat

D. KAMUS DATA PENGADUAN DARI SOSIAL MEDIA

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas pengaduan
2.	Id_unor	Int (11)	Kode identitas instansi
3.	Id_sosmed	Int (11)	Kode identitas social media
	User_sosmed	Varchar (100)	Nama pengguna social media
4.	Username_sosmed	Varchar (100)	Nama pengguna social media
5.	Isi_pengaduan	text	Isi pengaduan
6.	Lat	Varchar (225)	Kode garis bujur lokasi pengadu
7.	Lng	Varchar (225)	Kode garis lintang lokasi pengadu
8.	Lokasi	text	Alamat pengadu
9.	Status	Varchar (1)	Kode status aduan
10.	Disposisi	Varchar (1)	Kode aduan didisposisikan/tidak
11.	Tgl_proses	datetime	Waktu aduan mulai ditanggapi
12.	Tgl_selesai	datetime	Waktu aduan selesai ditanggapi
13.	No_tlp	Varchar (15)	Nomor telepon pengadu
14.	Terbaca	Varchar (1)	Kode status aduan sudah terbaca/belum
15.	Tgl_pengaduan	datetime	Waktu pengaduan dibuat
16.	Kode_unor	text	Kode unik OPD
17.	Kodetiket	Varchar (25)	Kode urut
18.	Id_kategori	Int (11)	Kode identitas hastag (tagar aduan)

E. KAMUS DATA SEMUA PENGADUAN DARI APLIKASI DAN SOSIAL MEDIA

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas pengaduan

2.	Id_user	Int (11)	Kode identitas pengadu
3.	Id_unor	Int (11)	Kode identitas instansi
4.	Id_sosmed	Int (11)	Kode identitas social media
5.	Tgl_pengaduan	Datetime	Waktu pengaduan dibuat
6.	Judul_pengaduan	Varchar (50)	Perihal pengaduan
7.	Isi_pengaduan	text	Isi pengaduan
8.	Lat	Varchar (225)	Kode garis bujur lokasi pengadu
9.	Lng	Varchar (225)	Kode garis lintang lokasi pengadu
10.	Lokasi	text	Alamat pengadu
11.	Status	Varchar (1)	Kode status aduan
12.	Disposisi	Varchar (1)	Kode aduan didisposisikan/tidak
13.	Tgl_proses	datetime	Waktu aduan mulai ditanggapi
14.	Tgl_selesai	datetime	Waktu aduan selesai ditanggapi
15.	No_tlp	Varchar (15)	Nomor telepon pengadu
16.	Terbaca	Varchar (1)	Kode status aduan sudah terbaca/belum
17.	Notif_disposisi	Varchar (255)	Keterangan/alasan disposisi
18.	private	Enum (true/false)	Aduan private/bukan
19.	No_kec	Varchar (6)	Kode nomor kecamatan
20.	No_kel	Varchar (6)	Kode nomor kelurahan
21.	Id_kategori	Int (11)	Kode identitas hashtag (tagar aduan)

F. KAMUS DATA NOTIFIKASI PESAN ADUAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_notifikasi	Int (11)	Kode identitas notifikasi
2.	Id_user	Int (11)	Kode identitas pengguna
3.	token	Longtext	Kode unik notifikasi
4.	Versi	Varchar (10)	Versi handphone pengguna
5.	device	Varchar (100)	Nama device handphone pengguna
6.	os	Varchar (100)	System operasi yang digunakan di handphone pengguna
7.	Aktif	Enum (0/1)	Status notifikasi aktif/tidak
8.	Imei	Text	Kode identitas handphone
9.	simserialnumber	text	Kode/nomor seri registrasi kartu sim yang digunakan pengguna

G. KAMUS DATA HASHTAG /TAGAR ADUAN BERDASARKAN TUPOKSI OPD

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_kategori	Int (11)	Kode identitas tagar
2.	Id_unor	Int (11)	Kode identitas opd
3.	kategori	text	Nama tagar

H. KAMUS DATA JAWABAN ADUAN DARI SOSIAL MEDIA

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_jawaban	Int (11)	Kode identitas jawaban aduan dari social media
2.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas aduan
3.	Nama_pejabat	Varchar (255)	Nama pejabat yang menjawab aduan
4.	jabatan	Varchar (255)	Jenis jabatan yang menjawab aduan
5.	Tgl_jawaban	datetime	Waktu aduan dijawab
6.	Isi_jabatan	text	Isi jawaban pengaduan
7.	Status_jawaban	Varchar (1)	Status pengaduan selesai/belum

I. KAMUS DATA JAWABAN ADUAN DARI SOSIAL MEDIA DAN APLIKASI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_jawaban	Int (11)	Kode identitas jawaban aduan
2.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas aduan
3.	Nama_pejabat	Varchar (255)	Nama pejabat yang menjawab aduan
4.	jabatan	Varchar (255)	Jenis jabatan yang menjawab aduan
5.	Tgl_jawaban	datetime	Waktu aduan dijawab
6.	Isi_jabatan	text	Isi jawaban pengaduan
7.	Status_jawaban	Varchar (1)	Status pengaduan selesai/belum
8.	pelapor	Varchar (1)	Kode tanggapan pelapor ada/tidak
9.	terbaca	Varchar (1)	Status jawaban terbaca/tidak

J. KAMUS DATA FOTO PENGADUAN DARI SOSIAL MEDIA

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_foto	Int (11)	Kode identitas foto aduan
2.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas pengaduan
3.	Nama_foto	Varchar (255)	Nama file foto pengaduan

K. KAMUS DATA FOTO JAWABAN PENGADUAN DARI SOSIAL MEDIA

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_foto	Int (11)	Kode identitas foto aduan
2.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas pengaduan
3.	Id_jawaban	Int (11)	Kode identitas jawaban aduan
4.	Nama_foto	Varchar (255)	Nama file foto pengaduan

L. KAMUS DATA FOTO JAWABAN PENGADUAN DARI SOSIAL MEDIA DAN APLIKASI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_foto	Int (11)	Kode identitas foto aduan
2.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas pengaduan
3.	Id_jawaban	Int (11)	Kode identitas jawaban aduan
4.	Nama_foto	Varchar (255)	Nama file foto pengaduan

M. KAMUS DATA FOTO PENGADUAN DARI SOSIAL MEDIA DAN APIKASI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_foto	Int (11)	Kode identitas foto aduan.
2.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas pengaduan
3.	Nama_foto	Varchar (255)	Nama file foto pengaduan

N. KAMUS DATA DISPOSISI PENGADUAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id_disposisi	Int (11)	Kode identitas disposisi aduan
2.	Id_pengaduan	Int (11)	Kode identitas pengaduan
3.	Id_unor	Int (11)	Kode identitas OPD asal
4.	Tgl_disposisi	datetime	Waktu disposisi
5.	Opd_disposisi	Int (11)	Kode identitas OPD terdisposisi
6.	Alasan_disposisi	text	Alasan aduan didisposisi
7.	terbaca	Varchar (1)	Status disposisi terbaca/belum
8.	approve	Varchar (1)	Kode identitas setuju/tidak
9.	Id_kategori	Int (11)	Kode identitas tagar

KAMUS DATA APLIKASI SIMPKB

Unit Kerja / OPD	Dishub
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor

A. KAMUS DATA KENDARAAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	id	Int (10)	Kode identitas data kendaraan
2.	tgl	Date	Tanggal uji
3.	No_smt	Varchar (30)	
4.	No_uji	Varchar (100)	Nomor uji
5.	No_uji2	Int (10)	nomor uji mekanis
6.	No_uji3	Varchar (100)	Nomor uji visual
7.	No_kendaraan	Varchar (20)	Nomor plat kendaran
8.	No_kartu	Varchar (20)	Nomor kartu
9.	Tipe	Varchar (20)	Merk/tipe kendaraan
10.	Thn	Int (4)	Tahun produksi kendaraan
11.	No_rangka	Varchar (100)	Nomor rangka kendaraan
12.	No_mesin	Varchar (100)	Nomor mesin kendaraan
13.	No_bpkb	Varchar (50)	Nomor BPKB
14.	Dk_panjang	Int (10)	
15.	Dk_lebar	Int (10)	
16.	Dk_tinggi	Int (10)	
17.	Bahan	Varchar (100)	Menyimpan data bahan pembuatan bak
18.	Tempat_duduk	Int (5)	Jumlah tempat duduk
19.	Ptd	Int (10)	Panjang tempat duduk
20.	Ltd	Int (11)	Lebar tempat duduk
21.	Tempat_berdiri	Int (5)	
22.	Keterangan	Varchar (20)	
23.	P	Int (11)	
24.	Q	Int (10)	
25.	R	Int (10)	
26.	B	Int (10)	
27.	Jbb	Int (10)	Jumlah berat yang Diperbolehkan (berat total kendaraan bermotor yg diperbolehkan)
28.	Jbkb	Int (10)	Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan (berat total kombinasi kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan)
29.	S1	Int (5)	
30.	S2	Int (5)	
31.	S3	Int (5)	
32.	S4	Int (5)	

33.	S5	Int (10)	
34.	Orang_kg	Int (1)	
35.	Barang	Int (5)	
36.	Jbi	Int (5)	Jumlah Berat Yang Diizinkan (berat maksimum Kendaraan Bermotor)
37.	Mst	Int (5)	Muatan Sumbu Terberat kendaraan
38.	Kj	Varchar (5)	
39.	R1	Varchar (20)	
40.	R2	Varchar (20)	
41.	R3	Varchar (20)	
42.	R4	Varchar (20)	
43.	R5	Varchar (20)	
44.	S12	Int (10)	
45.	S23	Int (10)	
46.	S34	Int (10)	
47.	S45	Int (10)	
48.	Roh	Int (11)	Range Over Hang (panjang bagian kendaraan yang menjulur kebelakang dari sumbu paling belakang kendaraan)
49.	Foh	Int (11)	Front Over Hang (panjang bagian kendaraan yang menjulur kedepan dari sumbu paling depan kendaraan)
50.	Isi_silinder	Int (5)	Kapasitas mesin
51.	Daya	Varchar (50)	Daya angkut
52.	Tempat_pemberian_buku	Varchar (30)	
53.	Tgl_pemberian_buku	date	Tanggal buku induk diberikan
54.	Tgl_terbit	date	Tanggal buku induk diterbitkan
55.	Nama	Varchar (50)	Nama pemilik kendaraan
56.	Alamat	Varchar (50)	Alamat pemilik kendaraan
57.	No_ktp	Varchar (100)	Nomor KTP pemilik kendaraan
58.	Fungsi	Varchar (10)	
59.	Tanda	Varchar (20)	
60.	No_sut	Varchar (50)	Nomor Sertifikat Uji Tipe
61.	Tgl_sut	date	Tanggal Sertifikasi Uji Tipe
62.	No_srut	Char (100)	Nomor Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
63.	Penerbit_srut	Varchar (100)	Nama penerbit Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
64.	Tgl_srut	date	Tanggal Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
65.	Jenis_barang_khusus	Varchar (20)	
66.	Jenis_penggunaan_khusus	Varchar (20)	
67.	Id_merk	Varchar (50)	Kode identitas tipe/merk kendaraan
68.	Id_kelurahan	Varchar (50)	Kode identitas kelurahan
69.	Id_jk	Varchar (50)	Kode identitas jenis kendaraan
70.	Id_kk	Varchar (30)	Kode identitas klasifikasi kendaraan

71.	Id_sk	Varchar (50)	
72.	Id_w	Varchar (50)	
73.	Id_warna	Varchar (50)	Kode identitas warna kendaraan
74.	Plat_dasar	Varchar (30)	Plat dasar
75.	Id_bb	Varchar (30)	Kode identitas bahan bakar kendaraan
76.	Id_jp	Varchar (30)	Kode identitas jenis pendaftar
77.	Id_penguji	Int (2)	Kode identitas petugas penguji
78.	Id_kota	Varchar (50)	Kode identitas kota
79.	Id_bengkel	Varchar (30)	Kode identitas daftar bengkel karoseri
80.	H_uji	date	Tanggal pengujian
81.	No_telp	Varchar (15)	Nomor telepon pemilik kendaraan
82.	Dm_panjang	int(10)	
83.	Dm_tinggi	int(10)	
84.	Dm_lebar	int(10)	
85.	Volume	int(10)	
86.	Jenis_muatan	varchar(20)	Jenis muatan kendaraan
87.	Bk	varchar(10)	
88.	Orang	int(2)	
89.	Jbki	int(10)	Jumlah Berat Kombinasi Kendaraan yang Diizinkan (berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor)
90.	Id_kecamatan	varchar(50)	Kode identitas kecamatan
91.	Gc	varchar(10)	
92.	Kelulusan	text	Hasil akhir pengujian
93.	Dt_panjang	int(10)	
94.	Dt_lebar	int(10)	
95.	Dt_tinggi	int(10)	
96.	Dt_volume	int(10)	
97.	Dt_jm	varchar(30)	
98.	Dt_bjm	int(10)	
99.	Dt_bahan	varchar(10)	
100.	Ks	varchar(10)	
101.	Kondisi	varchar(20)	Menyimpan kondisi kendaraan
102.	Kota_asal	varchar(100)	Menyimpan data kota asal
103.	Jenis_rumah	text	Jenis rumah
104.	Hal_bukuuji	int(1)	
105.	link	varchar(255)	

KAMUS DATA APLIKASI SIMDA

Unit Kerja / OPD	BPPKAD
Kategori	Administrasi
Aplikasi	Sistem Informasi

A. KAMUS DATA KEGIATAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Kd_urusan	tinyint	Kode urusan kegiatan
2.	Kd_bidang	Tinyint	Kode bidang
3.	Kd_program	Tinyint	Kode program
4.	Kd_keg	Smallint	Kode kegiatan
5.	Ket_kegiatan	Varchar(255)	Diskripsi kegiatan

B. KAMUS DATA REFERENSI BANK

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Kd_bank	tinyint	Kode bank
2.	Nm_bank	Varchar(50)	Nama bank
3.	No_rekening	Varchar(50)	Nomor rekening bank
4.	Kd_rek_1	tinyint	Kode rekening kegiatan 1
5.	Kd_rek_2	tinyint	Kode rekening kegiatan 2
6.	Kd_rek_3	tinyint	Kode rekening kegiatan 3
7.	Kd_rek_4	tinyint	Kode rekening kegiatan 4
8.	Kd_rek_5	tinyint	Kode rekening kegiatan 5

C. KAMUS DATA REFERENSI ENTRY

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Tahun	smallint	Tahun
2.	Kd_urusan	tinyint	Kode urusan
3.	Kd_bidang	tinyint	Kode bidang
4.	Kd_unit	tinyint	Kode unit skpd
5.	Kd_sub	smallint	Kode sub kegiatan
6.	Kd_penandatanganan	tinyint	Kode identitas penandatanganan
7.	Nm_penandatanganan	Varchar (50)	Nama penandatanganan
8.	Nip_penandatanganan	Varchar (21)	Nip penandatanganan
9.	Jbt_penandatanganan	Varchar (75)	Jabatan penandatanganan
10.	Jns_dokumen	Varchar (10)	Jenis dokumen

D. KAMUS DATA REFERENSI JABATAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Kd_jab	tinyint	Kode jabatan
2.	Nm_jab	Varchar (50)	Nama jabatan

KAMUS DATA APLIKASI SIMRS

Unit Kerja / OPD	RSUD Tjitrowardojo
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Informasi Rumah Sakit

A. KAMUS DATA PASIEN APS

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Nomr	Varchar (10)	Nomor pasien aps
2.	Title	Varchar (10)	
3.	Nama	Varchar (100)	Nama pasien
4.	Tempat	Varchar (64)	Tempat lahir pasien
5.	Tgllahir	Date	Tanggal lahir pasien
6.	Jeniskelamin	Varchar (1)	Kode jenis kelamin pasien
7.	Alamat	Varchar (100)	Alamat pasien
8.	Kelurahan	Varchar (200)	Nama kelurahan tempat tinggal pasien
9.	Kdkecamatan	Int(11)	Kode kecamatan
10.	Kota	Varchar (50)	Nama kota tempat tinggal pasien
11.	Kdprovinsi	Int(5)	Kode provinsi
12.	Notelp	Varchar (64)	Nomor telepon pasien
13.	Noktp	Varchar (32)	Nomor ktp
14.	Suami_ortu	Varchar (32)	Nama suami pasien
15.	Pekerjaan	Varchar (32)	Pekerjaan pasien
16.	Status	Int(11)	Status
17.	Agama	Int(11)	Agama pasien
18.	Pendidikan	Int(11)	Pendidikan terakhir pasien
19.	Kdcarabayar	Int(11)	Kode cara pembayaran
20.	Nip	Varchar (16)	Nomor induk pegawai

B. KAMUS DATA PENDAFTARAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Nomr	Varchar (6)	Nomor pendaftaran pasien
2.	tglreg	Date	Tanggal registrasi
3.	kddokter	Int(11)	Kode identitas dokter yang menangani
4.	Kdpoly	Int(11)	Kode identitas poly yang dituju
5.	Kdrujuk	Int(11)	Kode rujukan pasien
6.	Kdcarabayar	Int(11)	Kode cara pembayaran
7.	nojaminan	Varchar(32)	Nomor jaminan kesehatan
8.	Shift	Int(11)	
9.	Status	Int(11)	
10.	Pasienbaru	Int(11)	
11.	Nip	Varchar (16)	Nip pegawai bertugas
12.	idxdaftar	Int(11)	
13.	Ketrujuk	Varchar (50)	Keterangan rujukan
14.	unit	Varchar (10)	Unit yang menerima pasien

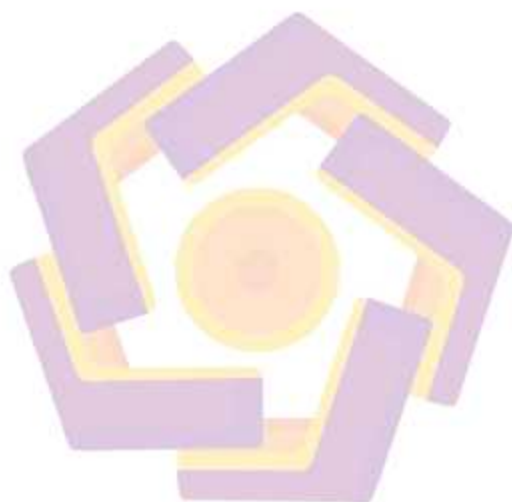
KAMUS DATA APLIKASI E-SPPT

Unit Kerja / OPD	BPPPKAD
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Sistem Elektronik

A. KAMUS DATA KELUARGA MISKIN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	KD_PROPINSI	CHAR (2 Byte)	Kode provinsi
2.	KD_DATI2	CHAR (2 Byte)	Kode daerah tingkat 2 / kota/kabupaten.
3.	KD_KECAMATAN	CHAR (3 Byte)	Kode kecamatan
4.	KD_KELURAHAN	CHAR (3 Byte)	Kode kelurahan
5.	KD_BLOK	CHAR (3 Byte)	
6.	NO_URUT	CHAR (4 Byte)	Nomor urut
7.	KD_JNS_OP	CHAR (1 Byte)	Kode jenis
8.	THN_PAJAK_SPPT	CHAR (4 Byte)	Tahun pajak SPPT
9.	SIKLUS_SPPT	NUMBER (2)	Nomor siklus SPPT
10.	KD_KANWIL	CHAR (2 Byte)	Kode kantor wilayah
11.	KD_KANTOR	CHAR (2 Byte)	Kode kantor
12.	KD_TP	CHAR (2 Byte)	
13.	NM_WP_SPPT	VARCHAR2 (30 Byte)	Nama wajib pajak SPPT
14.	JLN_WP_SPPT	VARCHAR2 (30 Byte)	Nama alamat jalan wajib pajak
15.	BLOK_KAV_NO_WP_SPPT	VARCHAR2 (15 Byte)	Nomor blok/kavling waib pajak
16.	RW_WP_SPPT	CHAR (2 Byte)	Nomor RW wajib pajak
17.	RT_WP_SPPT	CHAR (3 Byte)	Nomor RT wajib pajak
18.	KELURAHAN_WP_SPPT	VARCHAR2 (30 Byte)	Nama kelurahan wajib pajak
19.	KOTA_WP_SPPT	VARCHAR2 (30 Byte)	Nama kota wajib pajak
20.	KD_POS_WP_SPPT	VARCHAR2 (5 Byte)	Kode pos wajib pajak
21.	NPWP_SPPT	VARCHAR2 (15 Byte)	NPWP wajib pajak
22.	NO_PERSIL_SPPT	VARCHAR2 (5 Byte)	Nomor persil tanah wajib pajak
23.	KD_KLS_TANAH	CHAR (3 Byte)	Kode kelas tanah
24.	THN_AWAL_KLS_TANAH	CHAR (4 Byte)	Tahun awal kelas tanah
25.	KD_KLS_BNG	CHAR (3 Byte)	Kode kelas bangunan
26.	THN_AWAL_KLS_BNG	CHAR (4 Byte)	Tahun awal bangunan
27.	TGL_JATUH_TEMPO_SPPT	DATE	Tanggal jatuh tempo wajib pajak
28.	LUAS BUMI_SPPT	NUMBER (12)	Luas tanah wajib pajak
29.	LUAS_BNG_SPPT	NUMBER (12)	Luas bangunan wajib pajak
30.	NJOP BUMI_SPPT	NUMBER (15)	Nilai jual objek pajak (tanah)
31.	NJOP_BNG_SPPT	NUMBER (15)	Nilai jual objek pajak (Bangunan)
32.	NJOP_SPPT	NUMBER (15)	Nilai jual objek pajak (sppt)
33.	NJOPTKP_SPPT	NUMBER (8)	Nilai jual objek pajak tdk kena pajak
34.	PBB_TERHUTANG_SPPT	NUMBER (15)	Nominal pajak terhutang

35.	FAKTOR_PENGURANG_SPPT	NUMBER (12)	Nominal factor pengurangan pajak
36.	PBB_YG_HARUS_DIBAYAR_SPPT	NUMBER (15)	Nominal pajak yg harus dibayar
37.	STATUS PEMBAYARAN_SPPT	CHAR (1 Byte)	Kode status pembayaran
38.	STATUS_TAGIHAN_SPPT	CHAR (1 Byte)	Kode status tagihan pajak
39.	STATUS_CETAK_SPPT	CHAR (1 Byte)	Kode status cetak sppt
40.	TGL_TERBIT_SPPT	DATE	Tanggal terbit sppt
41.	TGL_CETAK_SPPT	DATE	Tanggal cetak sppt
42.	NIP_PENCETAK_SPPT	CHAR (18 Byte)	NIP petugas pencetak sppt
43.	STATUS_RECORD	CHAR (1 Byte)	Kode status terekam



KAMUS DATA APLIKASI PPDB

Unit Kerja / OPD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kategori	Pelayanan Publik
Aplikasi	Pendaftaran Peserta Didik Baru

A. KAMUS DATA KELUARGA MISKIN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	idartbdt	Varchar (20)	identitas rumah tangga BPD
2.	idbdt	Char (16)	Nomor basis data terpadu
3.	nik	Char (16)	NIK kepala keluarga
4.	No_kk	Char (16)	Nomor kartu keluarga
5.	nama	Varchar (100)	Nama kepala keluarga
6.	Jenis_kelamin	Char (1)	Kode jenis kelamin
7.	Tempat_lahir	Varchar (32)	Nama kota tempat lahir
8.	Tanggal_lahir	date	Tanggal Lahir

B. KAMUS DATA PENDAFTARAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Pendaftaran_id	Int	Identitas pendaftar
2.	Sekolah_id	uniqueidentifier	Id sekolah dari table sekolah
3.	Peserta_didik_id	uniqueidentifier	Id dari tabel peserta didik
4.	Penerapan_id	int	Id dari table penerapan
5.	Nomor_pendaftaran	Varchar (12)	Nomor urut pendaftar
6.	Jenis_pilihan	Numeric (1,0)	Kode pemilihan 1
7.	Jenis_pilihan_bayangan	Numeric (1,0)	Kode pemilihan 2
8.	Status_penerimaan	Numeric (1,0)	Status penerimaan
9.	Status_daftar_ulang	Numeric (1,0)	Status pendaftaran ulang
10.	Cabut_berkas	Numeric (1,0)	Status jika cabut berkas
11.	Masuk_jenis_pilihan	Numeric (1,0)	
12.	Kelengkapan_berkas	Numeric (1,0)	Kode kelengkapan berkas (Y/T)
13.	Waktu_kelengkapan_berkas	datetime	waktu input cek kelengkapan berkas
14.	Lokasi_berkas	uniqueidentifier	Lokasi berkas terupload
15.	peringkat	int	Urutan peringkat pendaftar
16.	skor	float	Nilai final pendaftar
17.	idle	Numeric (1,0)	
18.	Create_date	datetime	Waktu pendaftar mendaftar
19.	Last_update	datetime	Waktu terakhir data terupdate
20.	Soft_delete	Numeric (1,0)	

C. KAMUS DATA PESERTA DIDIK

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Peserta_didik_id	uniqueidentifier	Id dari tabel peserta didik
2.	Sekolah_id	uniqueidentifier	Id sekolah dari table sekolah
3.	Kode_wilayah	Char (10)	Kode wilayah kota
4.	nama	Varchar (100)	Nama siswa
5.	alamat	Varchar (80)	Alamat siswa
6.	Nama_dusun	Varchar (80)	Nama dusun
7.	nik	Char (16)	
8.	nisn	Char (10)	Nomor induk siswa nasional
9.	Nomor_ujian	Char(20)	Nomor ujian
10.	Jenis_kelamin	Char (1)	Kode jenis kelamin
11.	Tempat_lahir	Varchar (23)	Kota tempat lahir
12.	Tanggal_lahir	Date	Tanggal lahir
13.	Nama_ibu_kandung	Varchar (100)	Nama ibu kandung
14.	Nama_ayah	Varchar (100)	Nama ayah
15.	Nama_wali	Varchar (30)	Nama wali siswa
16.	Kebutuhan_khusus	Varchar (50)	Deskripsi kebutuhan khusus siswa
17.	No_KIP	Varchar (50)	
18.	lintang	Decimal (18,12)	
19.	bujur	Decimal (18,12)	
20.	Asal_data	Numeric (1,0)	
21.	Cabut_berkas	Numeric (1,0)	Kode pencabutan berkas pendaftaran
22.	Hapus_pendaftaran	Numeric (1,0)	Kode hapus pendaftaran
23.	Ubah_pilihan	Numeric (1,0)	Kode ubah pilihan
24.	Ubah_sekolah	Numeric (1,0)	Kode ubah sekolah
25.	Batal_verifikasi	Numeric (1,0)	Kode pembatalan verifikasi
26.	Tutup_akses	Numeric (1,0)	
27.	Nomor_kontak	Varchar (20)	Nomor kontak siswa/wali
28.	Verifikasi_dinas	Numeric (1,0)	Kode verifikasi dari dinas
29.	Verifikator_dinas	uniqueidentifier	Verifikator dinas
30.	Tanggal_verifikasi_dinas	datetime	Tanggal diverifikasi
31.	Jenjang_ppdb	int	Kod jenjang pendaftaran
32.	Anak_guru	Numeric (1,0)	Kode siswa (anak guru)
33.	Status_miskin	Numeric (1,0)	Kode status siswa dr keluarga miskin
34.	idbdt	Char (16)	Nomor BDT
35.	Create_date	datetime	Waktu input data
36.	Last_update	datetime	Waktu ubah data terakhir
37.	Soft_delete	Numeric (1,0)	

KAMUS DATA APLIKASI SUREJO

Unit Kerja / OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kategori	Data Administrasi dan Manajemen
Aplikasi	Tata Naskah Dinas Elektronik

A. KAMUS DATA PEGAWAI

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Id	Int (10)	Identitas field
2.	Id_pegawai	Int (20)	Identitas pegawai
3.	Nip	Varchar (20)	Nip lama
4.	Nip_baru	Varchar (50)	Nip baru
5.	Nama_pegawai	Varchar (50)	Nama lengkap
6.	Gelar_nonakademik	Varchar (25)	Gelar pegawai yg bersifat nonakademik
7.	Gelar_depan	Varchar (25)	Gelar akademik (depan)
8.	Gelar_belakang	Varchar (25)	Gelar akademik (belakang)
9.	Gender	Varchar (2)	Kode jenis kelamin
10.	Tempat_lahir	Varchar (50)	Kota kelahiran
11.	Tanggal_lahir	Date	Tanggal lahir
12.	Status_perkawinan	Varchar (20)	Status pernikahan
13.	Status_kepegawaian	Varchar (100)	Status pegawai (cpns/pns)
14.	Tmt_cpns	Date	Tanggal diangkat cpns
15.	Tmt_pns	Date	Tanggal diangkat pns
16.	Kode_golongan	Int (11)	Kode identitas golongan
17.	Nama_golongan	Varchar (100)	Jenis golongan kepegawaian
18.	nama_pangkat	Varchar (100)	Pangkat sesuai golongan
19.	Tmt_pangkat	Date	Tanggal perubahan pangkat
20.	Mk_gol_tahun	Int (3)	
21.	Mk_gol_bulan	Int (3)	
22.	Id_unor	Int (11)	Kode identitas table unor
23.	Kode_unor	Varchar (100)	Kode dinas hingga seksi
24.	Nama_unor	Varchar (255)	nama dinas hingga seksi dim dinas tsbt
25.	Jab_type	Varchar (100)	Kode tipe jabatan pegawai (js/jft/jfu)
26.	Id_jenjang_jabatan	Int (11)	Kode identitas jenjang jabatan
27.	Nomenklatur_jabatan	Varchar (255)	Jabatan pegawai
28.	Nomenklatur_pada	Varchar (255)	Bidang yang mengampu
29.	Tugas_tambahan	Varchar (255)	Tugas tambahan diluar tugas pokok
30.	Tmt_jabatan	Date	Tanggal perubahan jabatan
31.	Kode_esel	Int (4)	Kode eselon
32.	Nama_esel	Varchar (100)	Nama eselon

33.	Tmt_ese	Date	Tanggal perubahan eselon
34.	Nama_jenjang	Varchar (100)	Jenis jenjang pendidikan terakhir
35.	Nama_jenjang_rumpun	Varchar (100)	Nama rumpun jenjang
36.	Tanggal_lulus	Date	Tanggal kelulusan
37.	Last_update	Datetime	Waktu terakhir data diperbarui

B. KAMUS DATA SURAT (INBOX)

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	id_inbox	Int (11)	Kode identitas inbox
2.	id_parent	Int (11)	
3.	id_surat	Int (11)	Kode identitas surat (table surat)
4.	mailto	Varchar (100)	kode pegawai yang ditujukan surat
5.	mailto_unor	Varchar (100)	Kode unor tujuan
6.	mailto_unor_pegawai	Text	Data pegawai yang dituju
7.	Mailform	Varchar (100)	Kode pegawai yang buat surat
8.	Mailform_unor	Varchar (100)	Kode unor pembuat surat
9.	Mailform_unor_pegawai	Text	Data pegawai pembuat surat
10.	Status	Int (1)	
11.	Viewed	Datetime	Waktu surat dilihat
12.	File_name	Varchar (255)	Lokasi isi lampiran
13.	Catatan	Text	Deskripsi catatan surat
14.	Signature_by	Int (11)	
15.	Disposisi	Smallint (1)	
16.	Disposisi_bentuk	Varchar (255)	Bentuk disposisi
17.	Disposisi_catatan	Text	Deskripsi catatan disposisi
18.	Notif_text	Text	Notifikasi disposisi
19.	Qrcode	Text	Data qrcode
20.	Cdd	Timestamp	Waktu surat terdisposisi
21.	Cdi	Varchar (50)	

KAMUS DATA APLIKASI SIMPEG

Unit Kerja / OPD	Badan Kepegawaian Daerah
Kategori	Data Kepegawaian
Aplikasi	SIM Kepegawaian

A. KAMUS DATA PEGAWAI

No.	Nama Variabel	Type Data	Deskripsi
1.	A_00	Varchar (2)	Kode kabupaten
2.	A_01	Varchar (6)	
3.	A_02	Varchar (6)	
4.	A_03	Varchar (6)	
5.	A_04	Varchar (6)	
6.	A_05	Varchar (6)	
7.	B_02	Varchar (18)	NIP lama
8.	B_02B	Varchar (18)	NIP baru
9.	B_03A	Varchar (30)	Gelar depan
10.	B_03	Varchar (120)	Nama lengkap pegawai
11.	B_03B	Varchar (60)	Gelar belakang
12.	B-04	Varchar (60)	Tempat Lahir
13.	B_05	Date	Tanggal lahir
14.	B_06	Varchar (3)	Kode jenis kelamin
15.	NIK	Varchar (16)	NIK pegawai
16.	B_GOLDARAH	Varchar (6)	Golongan darah
17.	B_07	Varchar (3)	
18.	B_08	Varchar (90)	
19.	B_09	Varchar (6)	
20.	B_10	Varchar (6)	
21.	B_11	Varchar (6)	
22.	B_12	Varchar (600)	Alamat rumah pegawai
23.	B_EMAIL	Varchar (150)	Alamat e-mail
24.	C_01	Varchar (12)	
25.	C_02	Date	
26.	D_01	Varchar (6)	
27.	D_02	Varchar (90)	
28.	D_03	Date	
29.	D_04	Date	
30.	D_05	Varchar (6)	
31.	D_06	Varchar (12)	
32.	D_07	Date	
33.	NOSPMT	Varchar (90)	
34.	Tmt_spm	Date	
35.	Tglspmt	Date	
36.	Nosttp	Varchar (90)	

37.	Penyelenggara	Varchar (90)	
38.	Tempat	Varchar (90)	
39.	Akt	Varchar (6)	
40.	Mulai	Date	
41.	selesai	Date	
42.	Jpl	Varchar (4)	
43.	Tglsttp	Date	
44.	E_01	Varchar (6)	
45.	E_02	Varchar (90)	
46.	E_03	Date	
47.	E_04	Date	
48.	E_05	Varchar (6)	
49.	E_06	Varchar (3)	
50.	E_07	Varchar (12)	
51.	F_01	Varchar (6)	
52.	F_02	Date	
53.	F_TMT	Date	
54.	F_SK	Varchar (240)	
55.	F_03	Varchar (6)	Kode golongan
56.	F_PK	Varchar (21)	Nama golongan
57.	F_04	Varchar (12)	
58.	Kd_penetap	Varchar (2)	
59.	G_01	Date	
60.	G_SK	Varchar (150)	
61.	G_TSK	Date	
62.	G_02	Varchar (12)	
63.	G_03	Double	
64.	G_04	Varchar (9)	
65.	H_1A	Varchar (6)	
66.	H_1B	Varchar (12)	
67.	H_02	Varchar (12)	
68.	H_3A	Varchar (3)	
69.	H_3B	Varchar (3)	
70.	H_3C	Varchar (3)	
71.	H_4A	Varchar (6)	
72.	H_4B	Date	
73.	H_05	Varchar (3)	
74.	H_6A	Varchar (12)	
75.	H_6B	Varchar (3)	
76.	H_07	Varchar (12)	
77.	I_00	Varchar (3)	
78.	I_01	Varchar (3)	
79.	I_02	Varchar (90)	
80.	I_03	Date	
81.	I_04	Date	
82.	I_05	Varchar (30)	

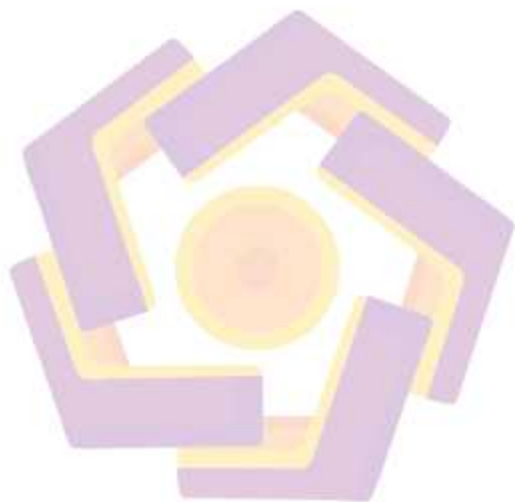
B. KAMUS DATA TABLOK08

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	Kodkab	Char (2)	Kode kabupaten
2.	Kd	Char (2)	Kode
3.	Nm	Varchar (160)	
4.	nmsingkat	Varchar (50)	
5.	Alamat	Varchar (100)	
6.	Kota	Varchar (20)	
7.	Telp	Varchar (20)	
8.	Fax	Varchar (20)	
9.	Perbub	Varchar (30)	
10.	Aktif	Tinyint (1)	
11.	Urutuk	Int (11)	
12.	Website	Varchar (255)	
13.	email	Varchar (255)	

C. KAMUS DATA RIWAYAT KEPANGKATAN

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi
1.	ID	Int (10)	
2.	A_01	Varchar (4)	
3.	A_02	Char (2)	
4.	A_03	Char (2)	
5.	A_04	Varchar (4)	
6.	A_05	Varchar (2)	
7.	PF_01	Varchar (18)	
8.	B_03	Varchar (30)	
9.	PF_02	Smallint (6)	
10.	PF_03	Char (2)	
11.	PF_04	Varchar (150)	
12.	PF_05	Date	
13.	PF_06	Date	
14.	PF_07	Varchar (4)	
15.	PF_08	Varchar (50)	
16.	PF_09	Varchar (4)	
17.	PF_10	Varchar (50)	

Lampiran F. Matriks Rekapitulasi Tahapan Penelitian



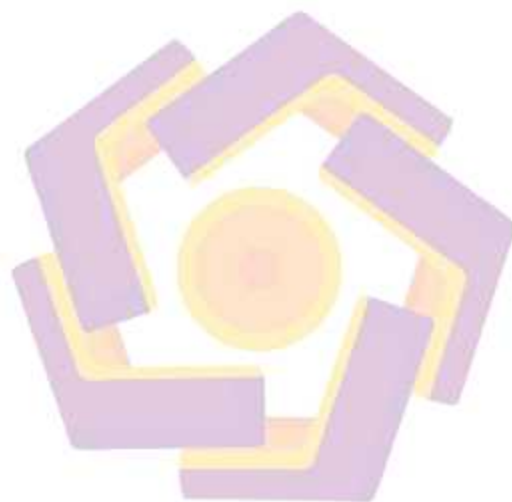
Tabel 4.15 Matriks Rekapitulasi Tahapan Penelitian

No.	Tahapan	Tujuan	Kegiatan	Subyek	Instrumen	Hasil/Output
1.	Pendahuluan	- Untuk memastikan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah konsep penelitian sudah cukup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tujuan dan rumusan masalah 2. Melakukan tinjauan pustaka 3. Menyusun kerangka konseptual 	- Peneliti	- Jurnal - Dokumen peraturan	- Tujuan penelitian - Rumusan masalah - Kerangka konseptual
2.	Persiapan Pengumpulan Data	- Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan persetujuan untuk kegiatan pengumpulan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan form survei 2. Pemetaan OPD pada Tabel RACI 3. Pengajuan persetujuan form survei 	- Peneliti - Kabid Statistik Data dan TI Dinkominfo Kabupaten Purworejo	- Form survei - Tabel RACI - Lembar persetujuan form survei	- Form survei yang telah disetujui oleh pimpinan atau pejabat Dinkominfo Kabupaten Purworejo - Pemetaan awal OPD pada Tabel RACI
3.	Pengumpulan Data	- Mengumpulkan dan rekapitulasi data sebagai data dasar dalam penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran form survei 2. Melakukan rekapitulasi hasil survei 	- Peneliti - Penanggung jawab OPD	- Form survei - Tabel RACI	- Form survei yang telah disebarkan ke partisipan - Rekapitulasi hasil survei pada Tabel RACI
4.	Klarifikasi dan wawancara ke OPD	- Untuk klarifikasi hasil isian form survei terkait wewenang dan tanggung jawab data tiap OPD - Mengetahui kondisi eksisting data dan sistem informasi OPD dan kebutuhan data antar OPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara langsung ke OPD untuk klarifikasi hasil isian form survei, wewenang dan tanggung jawab data tiap OPD 2. Melakukan inventaris kondisi eksisting data dan sistem informasi tiap OPD 3. Melakukan inventaris kebutuhan data antar OPD 	- Peneliti - Pimpinan atau pejabat OPD - Pengelola data OPD	- Rekapitulasi hasil survei - Dokumen tugas pokok fungsi tiap OPD	- Data update hasil klarifikasi terhadap isian form survei berupa wewenang dan tanggung jawab data tiap OPD - Data hasil inventaris kondisi eksisting data dan sistem informasi tiap OPD dan kebutuhan data antar OPD

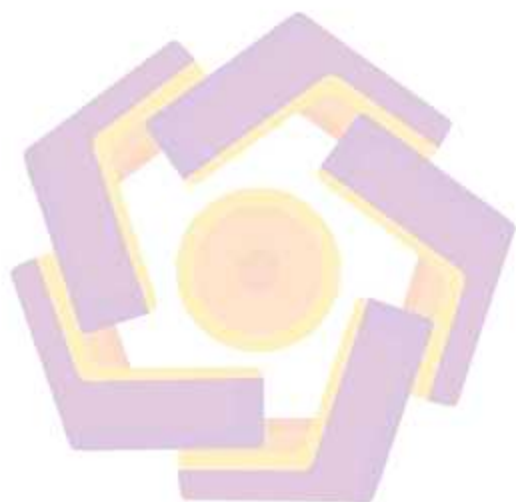
5.	Pengolahan data primer	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui wewenang dan tanggung jawab data tiap OPD. - Mengetahui kebutuhan data antar OPD yang menjadi dasar interoperabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan wewenang dan tanggung jawab data tiap OPD pada Tabel RACI 2. Pemetaan kebutuhan data antar OPD pada Tabel RACI 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Tabel RACI 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan pada Tabel RACI berupa wewenang dan tanggung jawab data tiap OPD dan kebutuhan data antar OPD
6.	Focus Group Discussion	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil pengumpulan data dan rekapitulasi data kepada OPD - Menghasilkan pembahasan bersama OPD terkait kebutuhan data lintas OPD dan rencana pengembangan sistem informasi - Memaparkan hasil penelitian kepada pejabat dan tim teknis Dinkominfo Kabupaten Purworejo - Menghasilkan pembahasan bersama pejabat dan tim teknis terkait kebutuhan data lintas OPD dan rencana pengembangan sistem informasi 	<p>FGD I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan dan konfirmasi hasil pengumpulan data dan rekapitulasi data pada Tabel RACI. 2. Pembahasan bersama terkait kebutuhan data lintas OPD dan rencana pengembangan sistem informasi. <p>FGD II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan hasil penelitian bersama tim Dinkominfo Kabupaten Purworejo 2. Pembahasan terkait data dan sistem informasi eksisting dan rencana pengembangan sistem informasi yang akan datang sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti - Pimpinan atau pejabat beserta pengelola data atau sistem pada OPD - Peneliti - Kepala Bidang Statistik Data dan TI beserta tim teknis Dinkominfo Kabupaten Purworejo 	<ul style="list-style-type: none"> - Tabel RACI - Dokumen hasil rekapitulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengolahan data pada Tabel RACI yang telah dipaparkan ke OPD - Update data hasil FGD berupa kebutuhan data lintas OPD dan rencana pengembangan sistem informasi - Hasil penelitian yang telah dipaparkan ke pimpinan atau pejabat beserta tim teknis Dinkominfo Kabupaten Purworejo - Bahan untuk penyusunan rekomendasi terkait data dan sistem informasi eksisting dan rencana pengembangan sistem informasi yang akan datang

7.	Analisis Interoperabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan kebutuhan data lintas OPD yang dijadikan dasar interoperabilitas. - Melakukan analisis data primer yang paling dibutuhkan oleh OPD lain - Melakukan analisis OPD yang paling berpengaruh terhadap eksistensi data primer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan interoperabilitas data dan sistem informasi berdasarkan pemetaan data primer pada tabel RACI. 2. Analisis vertikal dan horisontal pada Tabel RACI 	- Peneliti	- Tabel RACI	- Analisis interoperabilitas berupa : kebutuhan data antar OPD, analisis data primer yang paling dibutuhkan oleh OPD lain, analisis OPD yang paling berpengaruh terhadap eksistensi data primer
8.	Analisis perbandingan data primer	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbandingan data primer hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan data primer pada Pemerintah Kota Magelang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan data primer pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kota Magelang 	- Peneliti	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar OPD, penyelenggaraan urusan dan data primer pada Pemerintah Kabupaten Purworejo - Daftar OPD, penyelenggaraan urusan dan data primer pada Pemerintah Kota Magelang 	- Perbandingan data primer terhadap OPD yang ada baik pada Pemerintah Kabupaten Purworejo maupun Pemerintah Kota Magelang
9.	Pengujian Interoperabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengujian beban (<i>load test</i>) terhadap sampel sistem informasi yang menjadi provider data dalam interoperabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian beban (<i>load test</i>) terhadap sampel sistem informasi yang menjadi <i>provider</i> data dalam interoperabilitas dengan menggunakan <i>tool</i> aplikasi Apache JMeter 	- Peneliti	- Aplikasi Apache Jmeter	- Sistem informasi yang merupakan sampel provider data dalam interoperabilitas yang telah diuji menggunakan <i>tool</i> aplikasi Apache JMeter
10.	Penyusunan Rekomendasi, Kesimpulan, Dokumen Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan sistem informasi yang akan datang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rekomendasi dengan berdasarkan analisis PEST dan analisis Mc. Farlan 2. Penyusunan kesimpulan 	- Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis tabel PEST 2. Analisis tabel Mc. Farlan 3. Dokumen 	- Rekomendasi untuk pengembangan sistem informasi yang akan datang berdasarkan Analisis

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian - Penyusunan dokumen laporan keseluruhan hasil penelitian 	3. Penyusunan dokumen laporan		PEST dan Analisis Mc. Farlan <ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan dari keseluruhan penelitian - Dokumen laporan hasil penelitian
--	--	--	-------------------------------	--	--



Lampiran G. Dokumentasi dan Agenda





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 Telp/Fax. (0275) 7530915
email: dinkominfo@purworejokab.go.id website :dinkominfo.purworejokab.go.id

Purworejo, 26 Oktober 2020

Nomor : 543 / 415 / 2020
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pendaftaran Sistem Informasi
dan Kebutuhan Data OPD

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Purworejo
di
Purworejo

Dalam rangka keperluan penelitian akademisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika terkait pelaksanaan Smart City di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka diperlukan pendataan sistem informasi eksisting dan kebutuhan data antar OPD.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah untuk dapat menugaskan 1 orang Pranata Komputer atau Staf Teknis yang membidangi IT dan data untuk mengisi form pendataan sistem informasi secara online dengan alamat Form URL : <https://s.id/DataPrimer>.

Pengisian form paling lambat hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020,
Contact Person : Rahayu Slamet, ST., M.Eng (Kasi TI) HP : 081328433455.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO



STEPHANUS AAN ISA NUGROHO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19810528 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 Telp/Fax. (0275) 7530915
email: dinkominfo@purworejokab.go.id website :dinkominfo.purworejokab.go.id

Purworejo, 03 November 2020

Nomor : 493/000 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi Form Survei dan
Kebutuhan Data OPD

Kepada Yth. :
Para Pimpinan OPD

di
Purworejo

Menindaklanjuti surat Dinkominfo Kabupaten Purworejo nomor : 543/415/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Pendataan Sistem Informasi dan Kebutuhan Data OPD dalam rangka keperluan penelitian akademisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purworejo terkait pelaksanaan Smart City di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka dengan ini kami memberikan ijin dan menugaskan kepada Saudara Turah Suhono untuk datang langsung ke OPD dalam rangka klarifikasi dan pendalaman terhadap isian form survei yang telah dikirim oleh OPD.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

An. Di KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO
KABID STADATI
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
USBI PALUPI, SE., M.Si
NIP. 19730303 199803 2 007

DAFTAR HADIR

Agenda : IN DEPTH INTERVIEW / WAWANCARA
 Instansi : OPO DI lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
 Tanggal : 16 November s/d 11 Desember 2020

NO	NAMA	OPD	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Eky Purwanto	BKPD	Kabid PK	
2	Budi Setiawan	Bes. Pembangunan	Prakom	
3	Ekaningsih	Dinkes	Subdin	
4	WIDIATI	KEC. PURWOREJO	SEKCAM	
5	Iman Nasul	Kec. Purworejo	Prakom	
6	Muli Tarnandi	Kec. Katigoring	Prakom	
7	AGUS WISNANTA	Dinkes	SIAP	
8	B. GATOT	DISTWIS	SEKMIN.	
9	HENI SUSANTI	-	Kasubag Umum	
10	Sriyati	-	Prakom	
11	Umbah herlawati	Duiperkumtan	Kabid Perkim	
12	Kurniyanto	Setda	Stat Kesra	
13	HADI P	Din LH	Dir. MKL	
14	Dona TJ Ardi	Din LH	Prakom	
15	SITI CHOENIYAH	DINARBUS	Subdin	
16	RESA DELIMA N.W.	DINARBUS	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	
17	EHE 2	"	Prakom	
18	Parwo	Kasubag Lal	Ka TU	
19	Jani Purwanto	Kesbangal	Pro Kom	
20	SINI ARDIANI	"	BENDAHARA	
21	Istri Banaton	Din PPKP	Pelaksana	
22	Heryawan JP.	Din PPKP	Prakom	
23	Pri Wihjuning sil	Din KulkMP	Selektoris	
24	Y. Agung S	"	Prakom	
25	Hesti K. S.	"	Prakom	

26. MATHYU JASCA S
 27. RUTH PERWANTO

SETWAN
 setwan

KASUB UMUM
 DEN+WUMAS
 Prakom

DAFTAR HADIR

Agenda : IN PEPTIT interview / wawancara

Instansi : OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

NO	NAMA	OPD	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Andang NB	DNWPRBUD	KABID PENGET. DESKON	
2	Dyah Seti	- II -	JFT Prakom	
3	Dyah R	Perekonomian	Kacubag PUD	
4	Sri Handini	Perencanaan	Staf Bina Usaha	
5	Yunita D O	Perekonomian	Kasubag BU	
6	Sunarno	SantPal.PP.	fungsiPalPP	
7	AGUS PRASITIKO	PUPL PP	kepala	
8	Agus Supriyanto	Din perisalean	Kasubag PEPEI	
9	Indah Etik R	DPUPR	Sukbag Umpeg	
10	Hilmi Hidayat	DPUPR	Prakom	
11	Dwi Rahmanto	DPUPR	Kasi PR irigasi	
12	Zaini A	- - -	Staf bid Irigr	
13	Adi Gondow	Dinas PUPR	Plt PIP	
14	Wahyu Mustika M	Bappeda	Kabid Penlembangdal	
15	M. Faisal Ceza.	- - -	Prakom Bappeda.	
16	Bambang Surtianto	Isag orgop.	Kasubag ketata labraan	
17	AGUS ARI	DNWPERMADAS	KABID	
18	Smetyowati	Dipermas	Kasi PLED	
19	Rusniyany	Dipermas	Kasi Kapasitas	
20	Agus Purwanu	Dipermas	Staf	
21	Santa Hidayat	inspektoral	Prakom	
22	Suparno	- II -	Dubca 4	
23	Latan W	- - -	Prakom	
24	YOGA	ARD	Prakom	
25	Wari H	BLED	Kanbid PDI	
26.	Samantono, AMDTEM	RWCS-	KanD. IPDE	
27	Kedi Ariyanto	Kesub	Prakom	

DAFTAR HADIR

Agenda : IN DEPTH INTERVIEW / WAWANCARA
 Instansi : OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
 Tanggal : 16 November s/d 11 Desember 2020

NO	NAMA	OPD	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Puguh Trihatmoko	BPPKAD	Kabid PAB & PABTB	
2	Ary P	BPPKAD	Kasubid Peramil	
3	M. JUMALI	- - -	Kasubid PAB	
4	Kwahyuni W	BPPKAD	Kasubid Pelugmas PAB	
5	Agus E	BPPKAD	Staf Pelugmas	
6	Tri Nugraha	BPPKAD	Subbid perencanaan	
7	LEYA NH	BPPKAD	Subbid Pelaksanaan dan Pelaksana	
8	Triatmaji W	BPPKAD	Kasubid Pembinaan & Pelaporan	
9	Karmone	Din PMPSP	Kasi PD per I	
10	Veny Yutha	DIN PMPSP	Kasi Masdal Periz	
11	Agus Rizkiyanti	Din PMPSP	Staf DINPMPSP	
12	Sigit K	BAG. PBT	Kasubid	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telepon (0275) 321012, Fax (0275) 322791
Email : setda@purworejokab.go.id Website : www.setda.purworejokab.go.id

Purworejo, 30 November 2020

Nomor : 005 / 8227 / 2020
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Undangan

Kepada Yth:
Kepala Perangkat Daerah
se-Kab. Purworejo
di
Purworejo

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Desember 2020
Waktu : terlampir
Tempat : Laboratorium Komputer Dinkominfo
(Gedung Sekretariat Daerah lantai 1 sayap barat)
Acara : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
Kepemerintahan Berbasis Elektronik serta
Kesiapan Purworejo Smart City 2021

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

An. BUPATI PURWOREJO
SEKRETARIS DAERAH
SETDA
Drs. SAID ROMADHON
Pembina Utama Madya
NIP. 19640122 198903 004



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Proklamasi No 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telp./Fax: (0275) 321012 E-mail: dinkominfo@purworejokab.go.id Website: dinkominfo.purworejokab.go.id


DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Selasa, 1 Desember 2020
 Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Laboratorium Komputer Dinkominfo Kab. Purworejo
 Acara : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) serta Kesiapan Purworejo Smart City 2021

No	Nama	Instansi	Tanda tangan
1		Sekretariat Daerah	1
2		Dinkominfo	2
3	S. Saepu	Dinkominfo	3
4	Liliana Yuni K.	Dinkominfo	4
5	Eris	Dinkominfo	5
6	K. Komelelaell	Sekretariat DPRD	6
7	Samsa Yuliana	Inspektorat	7
8	WYOTOROZO	Dindikpora	8
9		Dinas Kesehatan	9
10	Hilmi Hidayat	DINPUPR	10
11	Widyawat DA.	Dinperkimtan	11
12	Badr Rukya	DinsosdukKBPPPA	12
13	Afiza Kurniazada	DPPKP	13
14	Dona PJ Ardi	DinLH	14
15	Novita	Dindukcapil	15
16	Witoni S	Dinpermasdes	16
17	Heni Susanti	Dinhub	17
18	Dyah Setianingtyas	Dinparbud	18
19	Eti E	Dinarpus	19
20	Sri Wahyuningsih	DINKUKMP	20
21	Dwi Asti Cahya	DINPMPTSP	21
22		Dinperinaker	22
23	Triyana	SatPol PP Damkar	23
24	Karyadi	Bappeda	24
25	Kori H.	BKD	25
26	A. AMIN F	BPPKAD	26
27	K. Komelelaell	BPB164	27

No	Nama	Instansi	Tanda tangan
28		Kantor Kesbangpol	28
29	Jamiatuningsih	RSUD	29
30	Pangoto	Kecamatan Grabag	30
31	Tejo Lando	Kecamatan Ngombol	31
32	Harjono	Kecamatan Purwodadi	32
33	Iri Subryono	Kecamatan Bagelen	33
34	Fln Sro	Kecamatan Kaligesing	34
35	Imam M	Kecamatan Purworejo	35
36	Musadad	Kecamatan Banyuurip	36
37	Sri W	Kecamatan Bayan	37
38	Galuh BP	Kecamatan Kutoarjo	38
39		Kecamatan Butuh	39
40	Suciyati	Kecamatan Pituruh	40
41	Joko Susilo	Kecamatan Kemiri	41
42		Kecamatan Bruno	42
43	Purpaning	Kecamatan Gebang	43
44	Agus A	Kecamatan Loano	44
45	Budi U	Kecamatan Bener	45
46	Hesti	DINCUKMP	46
47	Kasuludin Cahyadi	DINSAS	47
48	Sriyati	Dinkub	48
49	Tonah Subono	Setda	49
50	Joko Susilo	kec.ke	50

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


RAHAYU SLAMET, ST.M.Eng
NIP. 19760830 200312 1 006

DAFTAR HADIR

Agenda : Forum Group Discussion (FGD)
 Instansi : DINAS KOMINFO KAB. PURWOREJO
 Tanggal : 29 Desember 2020

NO	NAMA	OPD	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sri Pujiati	Dinas Kominfo	Kabid. Citadati	
2	Klara Juri	-	Kasi Statistik	
3	Hertambang K	- //	Network support	
4	Melinda Putri E	Dinkominfo	Analisis SI	
5	Bagus Rahmanto	Dinkominfo	Tek. Jaringan	
6	Rahayu Suci	Dinkominfo	Kasi TI	
7	Eli Setya	Dinkominfo	Prakom	
8	Eko Septianb	Dinkominfo	Prakom	
9	Yusuf Sapmi	-	Tim Teknik	
10	Ivandi J.P	Dinkominfo	Tim Teknik	
11	TURAH SUTOWO		Peneliti	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Foto Kegiatan



Wawancara dengan Pimpinan dan Pengelola TI OPD



Forum Group Discussion Bersama OPD



Forum Group Discussion Bersama OPD